



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT PESISIR (PEMP)  
STUDI KASUS:  
SWAMITRA MINA PANTURA JAYA, CILINCING JAKARTA  
UTARA DAN SWAMITRA MINA MITRA USAHA,  
MUARA GEMBONG JAWA BARAT**

**TESIS**

**DARMAYANTI**

**0706306106**

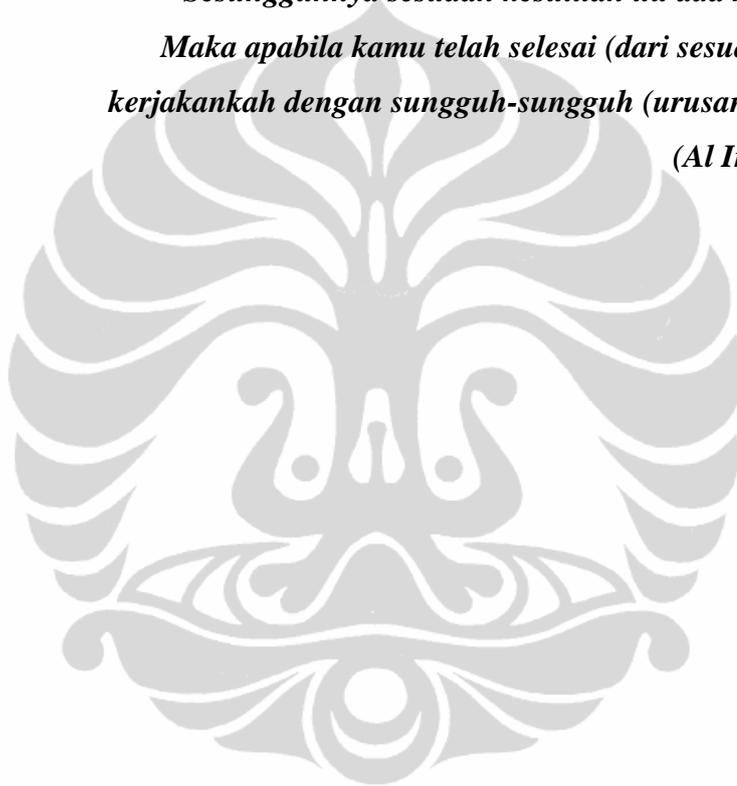
**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JANUARI 2010**

*Bila anda telah menyelesaikan tugas anda kemarin,  
kemudian dapat menapakkan kaki secara mantap hari ini, maka bila ada awan  
yang menutupi matahari esok, anda tidak akan kehilangan jalan anda.*

*(Goethe)*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),  
kerjakankah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.*

*(Al Insyirah:6-7)*



*Kupersembahkan karya ini  
kepada kedua orang tuaku (almarhum), kakak dan adikku.  
Teristimewa untuk kedua orang Karunia Allah SWT kepadaku;*

*Suamiku tercinta Mohammad Muslih  
dan buah hati kami Fawzhia Akhdezty Muslih*

*Subhanallah !*



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT PESISIR (PEMP)  
STUDI KASUS:  
SWAMITRA MINA PANTURA JAYA, CILINCING JAKARTA  
UTARA DAN SWAMITRA MINA MITRA USAHA,  
MUARA GEMBONG JAWA BARAT**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ekonomi (ME)

**DARMAYANTI**

**0706306106**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK-KEMISKINAN  
JAKARTA  
JANUARI 2011**

**Universitas Indonesia**

Evaluasi program..., Darmayanti, FE UI, 2010.

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Januari 2011



**(Darmayanti)**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Darmayanti  
NPM : 0706306106  
Tanda tangan :



Tangga : Januari 2011.

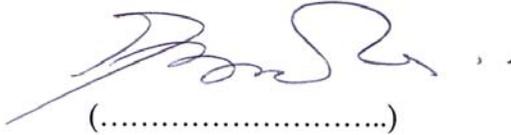
## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Darmayanti  
NPM : 0706306106  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Studi Kasus: Swamitra Mina Pantura Jaya, Cilincing Jakarta Utara dan Swamitra Mina Mitra Usaha, Muara Gembong Jawa Barat.

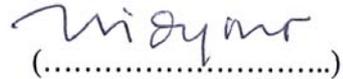
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

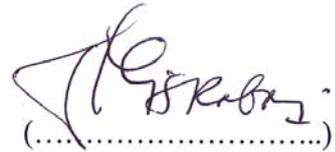
Pembimbing : Dra. Budi Sulistyawati, MA.

  
(.....)

Penguji : Dr. Ir. Widyono Soetjipto

  
(.....)

Penguji : Darlis Rabai, SE., MA.

  
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2011

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Budi Sulistyawati, MA., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Happy Simanjuntak, SH; Direktur Pengawasan Sumberdaya Perikanan, selaku atasan saya di kantor yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi ini;
3. Bapak Kris Tatang dan Ahadar Tuhuteru, S.Pi, selaku manajer Swamitra Mina yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan;
4. Orang tua, kakak dan adik yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
5. Teristimewa suami, dan buah hati kami "*Fawzhia*" yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya; serta
6. Teman-teman MPKP Angkatan 18, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan studi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 8 Januari 2011



**Darmayanti**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darmayanti  
NPM : 0706306106  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Kekhususan : Manajemen Sektor Publik (Kemiskinan)  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Studi Kasus: Swamitra Mina Pantura Jaya, Cilincing Jakarta Utara dan Swamitra Mina Mitra Usaha, Muara Gembong Jawa Barat.

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Januari 2011  
Yang menyatakan,



(Darmayanti)

## ABSTRAK

Nama : Darmayanti  
NPM : 0706306106  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Studi Kasus: Swamitra Mina Pantura Jaya, Cilincing Jakarta Utara dan Swamitra Mina Mitra Usaha, Muara Gembong Jawa Barat.

Program PEMP KKP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), serta penggalangan partisipasi masyarakat berbasis sumber daya lokal. Program tersebut dirancang menggunakan pendekatan kelembagaan, yakni dengan membangun Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir - Mikro Mitra Mina (LEPP-M3). Salah satu kegiatannya adalah Swamitra Mina yang bermitra dengan Bank Bukopin. Cilincing dan Muara Gembong merupakan lokasi penerima program PEMP. Cilincing dan Muara Gembong mempunyai karakteristik yang sama yaitu wilayahnya berada di pantura, sebagian besar penduduknya berasal dari Jawa, mempunyai permasalahan kredit macet yang dipengaruhi oleh cuaca yang buruk, serta permasalahan rentenir. Namun kredit bermasalah yang terjadi di Swamitra Mina Pantura Jaya lebih kecil dibandingkan dengan Swamitra Mina Mitra Usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala di 2 swamitra mina, menganalisis dampak program PEMP terhadap peningkatan kesejahteraan, dan memberikan masukan/rekomendasi untuk perbaikan program di 2 swamitra mina tersebut, melalui analisis kualitatif dan analisis SWOT.

Penelitian ini menggambarkan karakteristik masyarakat Cilincing dan Muara Gembong, serta menguraikan kinerja Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha. Selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan, penentuan skala prioritas permasalahan berdasarkan pohon masalah, kemudian menentukan alternatif solusi yang dianalisa dengan SWOT untuk didapatkan solusi terbaik. Berdasarkan hasil penetapan solusi terbaik maka diusulkan rekomendasi dengan membuat skenario *action plan*. Rekomendasi tersebut adalah penyelesaian kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Kata Kunci: Program PEMP, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Swamitra Mina.

## ABSTRAC

*Name* : Darmayanti  
*NPM* : 0706306106  
*Study Program* : Magister of Public Planning and Policy  
*Title* : *Evaluation on Economic Empowerment for Coastal Community (PEMP) Programme : Study case on Case Study Swamitra Mina Pantura Jaya, Cilincing North Jakarta and Swamitra Mina Mitra Usaha, Muara Gembong, West Java.*

This thesis has aim generally to analyze the implementation of *Economic Empowerment for Coastal Community (PEMP) Program* by describing, identifying and analyzing the project recipients, Swamitra Mina Pantura Jaya and Swamitra Mina Mitra Usaha. PEMP Program which was initiated by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia conducted with purpose to increase coastal community welfare through empowering *Micro Finance Institution (LKM)* and enhancing community's participation in economic activities by using local resources. This program has employed institutional-based approach by establishing a Cooperative institution namely Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir - Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) which together with Bank Bukopin launched Swamitra Mina scheme. Cilincing and Muara Gembong as recipient location have a same condition as follows: located along north java seaside, predominantly with small scale and seasonal fisher's from javanese ethnic, and have a longtime problem with rentenir (lender money). All these factors have considerable role in creating credit problem although, based on the observation, credit problem in Swamitra Mina Pantura Jaya Group is smaller than Swamitra Mina Mitra Usaha.

This thesis has purposes i.e: (i) to analyze factors that have contribution to the credit problem of these two group of fisheres (ii) to analyze the impact of PEMP Program to the community welfare and (iii). To provide recommendation for the project implementation improvement. In achieveng the purposes, this thesis will emply SWOT analysis.

At the outset, this thesis identify the problem and prioritize the problem scale by using problem tree. Best alternative solutions will be determined by using SWOT. Based on the study, the best solution recommended to overcome fishers' credit problem is to make *action plan* which consider *rescheduling, reconditioning, and restructuring* as problem solving.

Key words: PEMP Program, coastal community, empowerment, Swamitra Mina scheme.

## DAFTAR ISI

Halaman:

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRAC</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1     Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah/Ruang Lingkup Penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Pemikiran	7
1.6. Metodologi Penelitian	11
1.7. Sistematika Penulisan	21
2     Landasan Teori	22
2.1. Teori Kemiskinan, Pemerataan dan Kesejahteraan	22

2.2.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	30
2.3.	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	38
2.4.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)	49
3	Hasil Studi Lapangan	56
3.1.	Karakteristik Masyarakat Cilincing Jakarta Utara	56
3.2.	Karakteristik Masyarakat Muara Gembong Bekasi	71
3.3.	Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing Jakarta Utara	85
3.4.	Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong Bekasi	94
3.5.	Perbandingan Pelaksanaan Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha	103
4	Identifikasi Permasalahan dan Analisa SWOT	109
4.1.	Identifikasi Permasalahan	109
4.2.	Skala Prioritas Permasalahan	112
4.3.	Alternatif Solusi	115
4.4.	Analisa SWOT	117
4.5.	Analisa Kualitatif	132
4.6.	Solusi Terbaik	134
5	Rekomendasi Skenario Action Plan	136
5.1.	Kesimpulan	136
5.2.	Rekomendasi	139
	DAFTAR PUSTAKA	152
	LAMPIRAN	156

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman:
Gambar 1.1. Matriks SWOT	19
Gambar 1.2. Kerangka Analisa	20
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Pengelola Program PEMP 2006.	53
Gambar 2.2. Bagan Mekanisme Operasional Kegiatan Penjaminan Tunai ( <i>cash collateral</i> )	55
Gambar 3.1. Diagram Venn Kelembagaan Masyarakat Cilincing	63
Gambar 3.2. Diagram Venn Kelembagaan Masyarakat Muara Gembong	77
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Koperasi LEPP M3 Swamitra Mina Pantura Jaya	86
Gambar 3.4. Struktur Organisasi Koperasi LEPP M3 Swamitra Mina Mitra Usaha	95

## DAFTAR TABEL

	Halaman:
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan.	56
Tabel 3.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Cilincing menurut persebarannya, Tahun 2006.	59
Tabel 3.3. Pinjaman kepad Rentenir	62
Tabel 3.4. Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur BPP Kecamatan Cilincing 2006	65
Tabel 3.5. Jumlah dan Persentasi Masyarakat Sasaran Menurut Tingkat Jenis Usaha per Oktober Tahun 2010	66
Tabel 3.6. Jumlah dan Persentasi Masyarakat Sasaran Menurut Tingkat Pendidikan	69
Tabel 3.7. Penggunaan Waktu Sehari Masyarakat Cilincing	71
Tabel 3.8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa	72
Tabel 3.9. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Muara Gembong menurut persebarannya, Tahun 2010	74
Tabel 3.10. Pinjaman kepad Rentenir	77
Tabel 3.11. Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur BPP Kecamatan Muara Gembong 2010	79
Tabel 3.12. Jumlah dan Persentasi Masyarakat Sasaran Menurut Tingkat Jenis Usaha per Oktober Tahun 2010	80
Tabel 3.13. Jumlah Keterlibatan Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan Rumah Tangga Buruh Perikanan (RTBP) dalam Kegiatan Perikanan Kecamatan Muara Gembong Tahun 2010	82
Tabel 3.14. Jumlah dan Persentasi Masyarakat Sasaran Menurut Tingkat Pendidikan	83
Tabel 3.15. Penggunaan Waktu Sehari Masyarakat Muara Gembong	85
Tabel 3.16. Kualifikasi Pendidikan Pengurus Koperasi LEPP M3 Pantura Jaya (2005-2010)	88
Tabel 3.17. Nasabah Swamitra Mina Pantura Jaya Berdasarkan Jenis Usaha	89
Tabel 3.18. Sumber Modal Koperasi LEPP M3 Swamitra Mina Pantura Jaya	90
Tabel 3.19. Pendapatan Nasabah Berdasarkan Bidang Usaha	91
Tabel 3.20. Kualifikasi Pendidikan Pengurus Koperasi LEPP M3 Mitra Usaha (2005-2009)	97

Tabel 3.21.	Nasabah Swamitra Mina Mitra Usaha Berdasarkan Jenis Usaha	97
Tabel 3.22.	Sumber Modal Koperasi LEPP M3 Swamitra Mina Mitra Usaha	98
Tabel 3.23.	Perbandingan Pelaksanaan Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha	103
Tabel 4.1.	Identifikasi Permasalahan Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha	109
Tabel 4.2.	Identifikasi Akar Permasalahan pada Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha	111
Tabel 4.3.	Identifikasi penentuan prioritas permasalahan pada Swamitra Mina Pantura Jaya	113
Tabel 4.4.	Identifikasi penentuan prioritas permasalahan pada Swamitra Mina Usaha	114
Tabel 4.5.	Alternatif Solusi dari Prioritas Permasalahan Swamitra Mina Pantura Jaya	115
Tabel 4.6.	Alternatif Solusi dari Prioritas Permasalahan Swamitra Mina Mitra Usaha	116
Tabel 4.7.	Matrik Identifikasi SWOT pada Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing	118
Tabel 4.8.	Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)/(Sistem Analisis Faktor Strategi Internal) Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing	121
Tabel 4.9.	External Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)/(Sistem Analisis Faktor Strategi Eksternal) Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing	122
Tabel 4.10.	Matrik SWOT Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing untuk Jangka Pendek	123
Tabel 4.11.	Hasil Analisis SWOT Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing	124
Tabel 4.12.	Matrik Identifikasi SWOT pada Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong	125
Tabel 4.13.	Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)/(Sistem Analisis Faktor Strategi Internal) Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong	128
Tabel 4.14.	External Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)/(Sistem Analisis Faktor Strategi Eksternal) Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong	129
Tabel 4.15.	Matrik SWOT Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing untuk Jangka Pendek	130

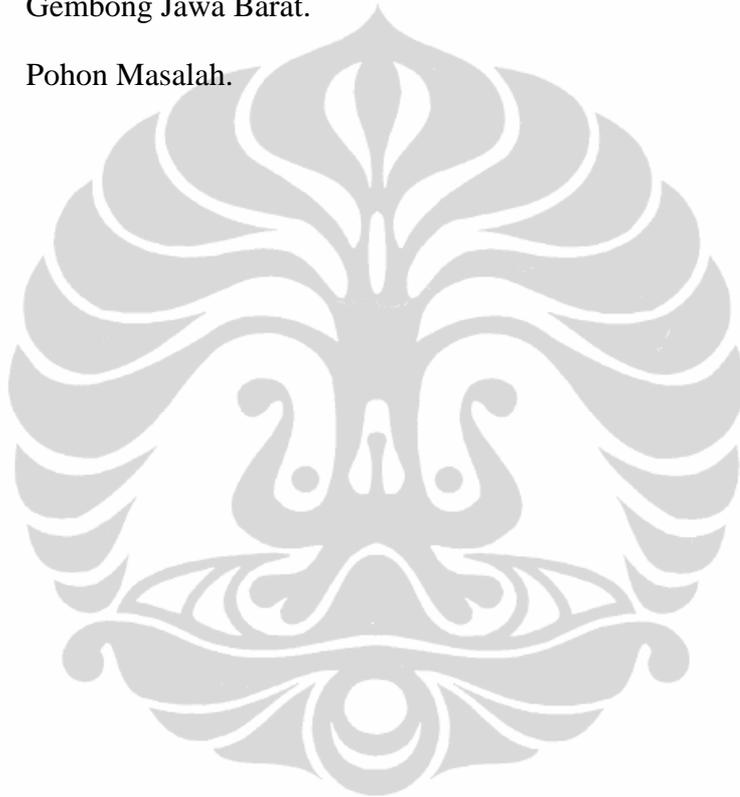
Tabel 4.16.	Hasil Analisis SWOT Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing	131
Tabel 5.1.	Implementasi Rencana Kerja Jangka Pendek Pada SwamitraMina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha	140
Tabel 5.2.	Implementasi Rencana Kerja Jangka Menengah	142
Tabel 5.3.	Implementasi Rencana Kerja Jangka Panjang	149



## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman:

Lampiran 1.	Peta Lokasi Kecamatan Cilincing (Wikipedia, 2008)	156
Lampiran 2.	Daftar Nasabah Swamitra Mina Pantura Jaya, Cilincing Jakarta Utara.	157
Lampiran 3.	Daftar Nasabah Swamitra Mina Mitra Usaha, Muara Gembong Jawa Barat.	165
Lampiran 4.	Pohon Masalah.	175



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan. Dalam sebaran pulau inilah, 237,6 juta jiwa penduduk Indonesia bermukim<sup>1</sup>. Data faktual ini menunjukkan bahwa pembangunan berbasis kepulauan merupakan prasyarat utama kemajuan bangsa Indonesia. “Pembangunan Indonesia harus berorientasi pada aspek kelautan dengan memperhatikan kehidupan rakyat yang tersebar di berbagai pulau”. Pesan ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kelautan dengan kekhasan budaya bahari yang melimpah ruah. Sayangnya, kodrat sebagai negara kepulauan ini terus diingkari hingga berakhirnya kalender 2009<sup>2</sup>.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan mempunyai lebih dari 17,5 ribu buah pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Sekitar 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah perairan dengan luas wilayah pengelolaan perikanan sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>, yang mengandung potensi sumberdaya ikan yang melimpah dan tersebar di seluruh perairan Indonesia. KKP menghitung potensi perikanan tangkap 6,817 Juta ton ikan per tahun (2005) dan potensi lahan budidaya 1.137.756 Ha (2005); sebanyak 70 persen dari 60 cekungan migas Indonesia berada di laut; dan 9,1 milyar barel cadangan minyak bumi ada di laut (DKP, 2009)<sup>3</sup>, yang pemanfaatannya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945).

Bertolak dari UUD’45 dibentuklah UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan telah dirubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, selanjutnya sebagai penyempurnaan dirubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pada Pasal 3

---

<sup>1</sup><http://id.news.yahoo.com/antr/20100816/tbs-presiden-jumlah-penduduk-indonesia-2-251e945.html>. 16 Agustus 2010.

<sup>2</sup> <http://kiara.or.id/content/view/677/71/> Jum’at, 5 Maret 2010.

<sup>3</sup> <http://kiara.or.id/content/view/677/71/> Jum’at, 5 Maret 2010.

UU No. 31 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil.

Revolusi biru (*blue revolution*) yang ditandai dengan motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap yang berlangsung intensif sejak awal tahun 70-an hingga saat ini telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan lingkungan di kalangan masyarakat pesisir. Salah satu masalah sosial yang serius adalah kemiskinan yang menimpa sebagian masyarakat pesisir. Jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir sekitar 5.254.400 jiwa atau 32,14% dari jumlah total masyarakat pesisir, yakni 16.420.000 jiwa. Mereka hidup dan tersebar pada 294 kabupaten/kota pesisir atau 8.090 desa pesisir. Menurut data Maret 2006, jumlah total penduduk miskin di Indonesia sekitar 39,05 juta jiwa atau 17,75% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 222 juta jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir sebesar 13,45% dari total penduduk miskin Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa kawasan pesisir merupakan salah satu kantong kemiskinan nasional yang potensial dan menyumbang terhadap berlangsungnya keterbelakangan sosial (Kusnadi, 2009).

Masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: (1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, (2) keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha, (3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, (4) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, (5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan (6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi, 2006).

Masalah-masalah diatas tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, misalnya masalah kemiskinan. Masalah ini dapat disebabkan oleh hubungan-hubungan korelatif antara keterbatasan akses, lembaga ekonomi belum berfungsi, kualitas SDM rendah, degradasi sumber daya lingkungan, dan belum adanya ketegasan kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi ke sektor maritim.

Atau sebaliknya, kemiskinan menjadi penyebab timbulnya penurunan kualitas SDM dan degradasi sumberdaya lingkungan. Karena itu, penyelesaian persoalan kemiskinan dalam masyarakat pesisir harus bersifat integral. Kalaupun harus memilih salah satu faktor sebagai basis penyelesaian persoalan kemiskinan, lebih disebabkan karena faktor ini dapat menyelesaikan sebagian persoalan-persoalan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut. Pilihan demikian memang sulit dilakukan, tetapi harus ditempuh untuk mengefisiensikan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia yang memang terbatas.

Masalah aktual lain yang perlu diperhatikan adalah potensi untuk berkembangnya jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir cukup terbuka. Hal ini disebabkan dua hal yaitu meningkatnya degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan pesisir laut dan membengkaknya biaya-biaya operasi penangkapan karena meningkatnya harga bahan bakar minyak (bensin, solar), sehingga nelayan mengurangi kegiatan operasi penangkapannya. Degradasi lingkungan terjadi karena pembuangan limbah dari wilayah darat atau perubahan tata guna lahan di kawasan pesisir untuk kepentingan pembangunan fisik. Di samping itu, ancaman terhadap kelangsungan hidup sumberdaya perikanan berasal dari praktik-praktik penangkapan yang merusak ekosistem laut, seperti dengan pengeboman, penggunaan sianida potassium, dan digunakannya alat tangkap yang merusak. Kondisi demikian akan menyulitkan nelayan memperoleh hasil tangkapan, khususnya di daerah-daerah perairan yang sudah dalam kondisi tangkap lebih (*overfishing*). Untuk menyasati kenaikan harga bahan bakar, nelayan menggunakan bahan bakar minyak tanah dicampur dengan oli bekas atau solar. Bahan bakar oplosan ini untuk menggantikan bahan bakar bensin dan solar. Hal ini berdampak negatif terhadap kerusakan mesin perahu, sehingga dapat membebani biaya investasi nelayan. Kedua hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap perolehan pendapatan nelayan dan kelangsungan usaha nelayan.

Berbicara tentang nelayan yang selalu identik dengan kemiskinan, hal ini terlihat dari gambaran data nelayan berjumlah 3,8 juta di tahun 2006, sebanyak 56% berpendidikan SD, 26% tidak tamat SD, 26% SLTP, 11% SLTA dan hanya 1% memasuki perguruan tinggi (DKP, 2007). Sedangkan pendapatan nelayan adalah sebagai berikut:

- a. diatas Rp. 2,5 Juta/bulan sebanyak 9%.
- b. diantara Rp.1,6 Juta sampai dengan Rp. 2,5 Juta/bulan sebanyak 12%.
- c. diantara Rp. 800.000-Rp. 1,5 Juta/bulan sebanyak 44%.
- d. kurang dari Rp. 800.000/bulan sebanyak 36%.

(sumber : Majalah Demersal Kelautan dan Perikanan, Juni 2007).

Untuk mendayagunakan sumberdaya ikan Indonesia yang cukup melimpah sehingga mampu memberikan manfaat sebagai sumber utama pangan untuk manusia, penyedia kesempatan kerja dan manfaat ekonomi lainnya secara berkelanjutan diperlukan upaya yang sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, pemerintah berusaha untuk menerapkan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap secara terpadu dan terarah agar pemanfaatan sumberdaya ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.

Pemberdayaan nelayan skala kecil merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah. Kenyataan yang ada di lapangan saat ini, nelayan kecil khususnya mengalami keterbatasan dari segi permodalan, kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kegiatan penangkapan, dan pengetahuan penggunaan teknologi dalam penangkapan. Peranan nelayan yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini belum didukung oleh ketersediaan fasilitas yang baik dari pihak perbankan/lembaga keuangan yang tidak bersedia menerima jaminan/agunan berupa kapal/perahu nelayan. Sementara di satu sisi, kebanyakan nelayan tidak memiliki aset yang layak menurut pihak perbankan untuk dapat diberikan bantuan kredit.

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengamanatkan kepada pemerintah cq Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional sektor perikanan harus berpedoman pada prinsip-prinsip keberpihakan pada masyarakat miskin (*pro poor*), peningkatan lapangan kerja (*pro job*), dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro growth*). Sesuai dengan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan, dengan Visi Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2014.

Melihat jumlah masyarakat pesisir yang hidup dibawah garis kemiskinan cukup besar, maka hal ini harus diatasi dengan program-program intervensi

pembangunan, seperti Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program PEMP KKP tersebut mempunyai kegiatan pokok yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN)/stasiun pengisian BBM untuk nelayan (SPBN), dan Kedai Pesisir.

Sejak digulirkan tahun 2001 sampai dengan 2008, Program PEMP-KKP telah menjangkau 293 kabupaten/kota pesisir di seluruh Indonesia. Secara umum, Program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan budaya kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), serta penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan dilaksanakan berkelanjutan (Kusnadi, 2009).

Program PEMP yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan mengembangkan dinamika ekonomi kawasan pesisir dirancang dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, yakni dengan membangun Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir - Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) yang telah diarahkan sebagai *holding company* bagi masyarakat pesisir. Perjalanan Program PEMP sampai dengan saat ini mencerminkan kebijakan pemerintah yang cukup konsisten dalam mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi pada masyarakat pesisir. Konsistensi kebijakan Program PEMP merupakan salah satu unsur penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan di kawasan pesisir.

Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Muara Gembong merupakan lokasi penerima Program PEMP KKP melalui Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina. Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Muara Gembong mempunyai karakteristik yang sama yaitu berada di pantai utara Jawa (pantura); penduduknya berasal dari Indramayu, Cirebon, Kerawang, Brebes dan sekitarnya; Bahasa sehari-harinya bahasa sunda; mata pencahariannya adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan pedagang ikan. Namun pada pelaksanaannya Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing lebih optimal dibandingkan dengan Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong. Cuaca yang buruk membuat nelayan sulit untuk menangkap ikan di laut, sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan dan

mereka tidak dapat membayar cicilan pinjamannya. Pengembalian pinjaman yang tidak selalu lancar/kredit macet merupakan kendala pada 2 Swamitra Mina tersebut.

Melihat kenyataan ini perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program PEMP khususnya pada kegiatan Swamitra Mina di Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Muara Gembong untuk memberikan masukan/rekomendasi dan meridisain program kearah yang lebih baik.

### **1.2. Batasan Masalah/Ruang Lingkup Penelitian**

Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan program PEMP Swamitra Mina Pantura Jaya di Cilincing dan Swamitra Mina Usaha di Muara Gembong, belum maksimal berperan dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir. Hal ini diduga antara lain dipengaruhi oleh permasalahan pada pengembalian pinjaman yang tidak selalu lancar sejak tahun 2005 hingga sekarang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada:

1. Mengevaluasi kegiatan swamitra mina khususnya permasalahan kredit bermasalah.
2. Menganalisis proses faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala di 2 swamitra mina di atas.
3. Menganalisis dampak program PEMP terhadap peningkatan kesejahteraan.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala di 2 swamitra mina di atas.
2. Menganalisis dampak program PEMP terhadap peningkatan kesejahteraan.
3. Memberikan masukan/rekomendasi untuk perbaikan program di 2 swamitra mina tersebut.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis.

1. Sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian perencanaan dan kebijakan publik jurusan MSP-Kemiskinan yang akan datang.
2. Menambah konsep baru sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis.

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran kepada masyarakat untuk mengetahui peranan Program PEMP dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran kepada pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pesisir di wilayah lainnya.
3. Hasil penelitian ini dapat membantu KKP untuk meridisain program, agar pelaksanaan program lebih berhasil.

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan. Nelayan merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk lainnya (Istiana,*et.al*, 2008). Dengan indikator kemiskinan dikaitkan dengan pendapatan 1 dollar AS per hari, kemiskinan masyarakat nelayan tahun 2002 mencapai 32% (Satria, 2008). Sedangkan Nikijulw (2001) mengatakan bahwa kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir disebabkan oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural. Dan para pakar ekonomi sumber daya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumber daya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor tersebut membuat nelayan tetap dalam kemiskinannya.

Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang harus dilihat dari berbagai sisi. Dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, dengan menggunakan *Right Base Approach*, orang miskin dilihat sebagai segmen masyarakat yang tidak terpenuhi hak dasarnya (pemenuhan pangan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan berusaha, akses perumahan dan sanitasi yang layak, akses air bersih, pemilikan dan penguasaan tanah, kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, jaminan rasa aman dan partisipasi).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sementara ayat (11)-nya menjelaskan bahwa Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu system, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok sosial lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia (Kusnadi, 2009).

Pada awalnya program PEMP diinisiasi untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat pesisir, yang difokuskan pada penguatan modal melalui perguliran Dana Ekonomi Produktif (DEP). Pengelolaan DEP dilakukan oleh Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) yang sejatinya dibentuk sebagai cikal bakal *holding company* milik masyarakat pesisir. Program yang dimulai sejak tahun 2001 ini secara terus menerus mengalami berbagai penyempurnaan seiring dengan hasil evaluasi dan

masuk dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun instansi-instansi terkait lainnya. Secara periodik program ini dibagi menjadi tiga periode yaitu periode inisiasi (2001-2003), periode institusionalisasi (2004-2006), dan periode diversifikasi (2007-2009).

Untuk meningkatkan kinerja LEPP-M3, maka mulai tahun 2004 lembaga tersebut didorong menjadi koperasi. Peningkatan status kelembagaan ini diiringi oleh perubahan sistem penyaluran DEP, yang semula berstatus sebagai dana bergulir dikelola LEPP-M3 menjadi dana hibah kepada koperasi yang dijamin pada perbankan (*cash collateral*). Selanjutnya dana yang dikeluarkan oleh perbankan berstatus kredit/pinjaman dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Swamitra Mina/USP atau sejenisnya, yang merupakan salah satu unit usaha milik koperasi LEPP-M3/koperasi perikanan. Pembentukan dan pengelolaan LKM tersebut bekerjasama antara koperasi dengan bank pelaksana. LKM ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga pembiayaan alternatif, yang cepat atau lambat akan menggantikan peran rentenir. Perbankan juga dapat menyalurkan kredit melalui LKM dengan skem kredit tidak langsung (*two steps loan*). Alokasi kredit diberikan kepada LKM untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat dengan skem kredit mikro yang sesuai dengan kondisi masyarakat Cilincing dan Muara Gembong.

Program PEMP di Kecamatan Cilincing dikelola oleh Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Pantura Jaya dan di Kecamatan Muara Gembong dikelola oleh Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Mitra Usaha. Pengelolaan dana program PEMP tersebut mengalami kegagalan karena pengembalian pinjaman yang tidak selalu lancar sejak tahun 2005 hingga sekarang. Nasabah yang mengembalikan pinjaman kredit dapat dikelompokkan ke dalam angsuran lancar dan angsuran lambat. Jenis angsuran lambat terjadi karena terkait dengan masalah musim ikan atau rezeki memperoleh hasil tangkapan.

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor pendukung dan dampak program PEMP terhadap kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan Cilincing dan Muara Gembong. Selanjutnya untuk penyempurnaan program pemberdayaan masyarakat pesisir dengan merekomendasi perbaikan sistem pengelolaan dalam Koperasi LEPP-M3

Swamitra Mina Pantura Jaya dan Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Mitra Usaha.

Nikijuluw (2001) mengatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat telah menjadi *mainstream* upaya peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan. Sementara Kusnadi (2009) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam pembangunan daerah kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan. Dengan demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subjek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi yang dinamis. Program pemberdayaan harus bisa mendorong terciptanya mobilitas vertikal masyarakat nelayan.

Jika suatu kegiatan pemberdayaan hanya dilaksanakan sekali tanpa dilanjutkan dengan program pemberdayaan pada tahap berikutnya atau tidak didukung oleh kegiatan pendampingan pasca kegiatan, niscaya hasilnya kurang baik. Kalau hal ini yang terjadi, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk menangani kegiatan pemberdayaan akan terbuang percuma. Kita harus memahami sepenuhnya bahwa kegiatan pemberdayaan merupakan proses sosial yang membutuhkan waktu relatif panjang. Oleh sebab itu, perencanaan terarah untuk kegiatan pemberdayaan sangat diperlukan. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemberdayaan, fokus, dan target yang akan dicapai pada setiap tahapan bisa dipetakan sejak awal, sehingga hal ini dapat memandu pencapaian hasil akhir pemberdayaan. Kerangka berpikir demikian sudah terakomodasi dalam Program PEMP, yang dilaksanakan secara bertahap dengan orientasi pencapaian target atau tujuan yang tegas (Kusnadi, 2009).

Program PEMP dalam pelaksanaannya menuju periode diversifikasi yaitu tahun 2008 keluarlah Peraturan Menteri Keuangan No. Per.99/MENKEU/2008 tentang Pelarangan Dana Bergulir, sehingga untuk melanjutkan program PEMP

tersebut, pada tahun 2008 DKP mempunyai program pemberian bantuan sosial kepada masyarakat pesisir. Selanjutnya di tahun 2009 program KKP dalam penanggulangan kemiskinan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-Mandiri KP). Namun demikian program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan tujuan mensejahterakan masyarakat pesisir harus terus dilaksanakan dan menjadi program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan misi-nya yaitu mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan, dengan Visi Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2014.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

### **1.6.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cilincing-Jakarta Utara dan Kecamatan Muara Gembong Bekasi pada tahun 2010. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah pesisir pantai utara jawa dengan jumlah nelayan yang mempunyai banyak permasalahan, yaitu sekitar 1.700 nelayan didera kekurangan solar dan hampir 75 % nelayan di kawasan tersebut tidak bisa melaut akibat dari kenaikan harga BBM dan cuaca yang buruk, serta pengelolaan dana program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) tersebut mengalami kegagalan karena pengembalian pinjaman yang tidak selalu lancar (kredit macet).

### **1.6.2. Metode Penelitian**

Penelitian ini berupa studi kasus pada Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Pantura Jaya di Cilincing, Jakarta Utara dan Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Mitra Usaha di Muara Gembong, Bekasi.

Metode penelitian dalam mengevaluasi program PEMP di Cilincing dan Muara Gembong ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, dengan responden nelayan,

pedagang ikan, pengolah ikan dan pembudidaya ikan, ketua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, pengurus koperasi LEPP-M3, dan aparat setempat di Cilincing dan Muara Gembong, serta laporan terinci dari pandangan responden masyarakat di Kecamatan Cilincing dan Muara Gembong serta instansi terkait, untuk melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3)<sup>4</sup> mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumen dan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada anggota dan pengurus koperasi LEPP-M3, untuk mendapatkan data primer yaitu:

1. Proses pencairan Dana Ekonomi Produktif (DEP) ke rekening Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Pantura Jaya di Cilincing, Jakarta Utara dan Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Usaha di Muara Gembong, Bekasi.
2. Pengelolaan Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Pantura Jaya di Cilincing dan Swamitra Mina Usaha di Muara Gembong.
3. Kinerja Swamitra Mina Pantura Jaya di Cilincing dan Swamitra Mina Usaha di Muara Gembong.
4. Sejarah masyarakat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan Kecamatan Muara Gembong Bekasi.
5. Sebaran status responden terkait usaha penangkapan ikan di Kecamatan Cilincing dan Muara Gembong.
6. Tingkat pendidikan responden di Kecamatan Cilincing dan Muara Gembong.
7. Sebaran tingkat pendapatan responden di Kecamatan Cilincing dan Muara Gembong.

---

<sup>4</sup> <http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html> (1 Desember 2009)

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan pada Swamitra Mina Pantura Jaya di Cilincing dan Swamitra Mina Usaha di Muara Gembong. Beberapa informasi yang ingin diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan populasi masyarakat nelayan Cilincing dan Muara Gembong. Tujuan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Sejumlah besar fakta dan data sekunder tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Data dokumenter yang dibutuhkan adalah otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data dari website, dan lain-lain. Data sekunder yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing dan Swamitra Mina Usaha Muara Gembong.
2. Petunjuk pelaksana (pedoman umum PEMP).
3. Jenis dukungan Pemda melalui Peraturan Perundang-undangan, sarana dan dana pendamping.
4. Jumlah anggota Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Pantura Jaya di Cilincing dan Swamitra Mina Usaha di Muara Gembong.
5. Jumlah nasabah Swamitra Mina.
6. Prosedur Swamitra Mina.

Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. Peserta FGD ini adalah anggota masyarakat dan aparat tingkat RT yang mengetahui kondisi permasalahan keluarga di Cilincing dan Muara Gembong.

Mereka adalah tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, pengurus koperasi LEPP-M3, dan aparat setempat.

FGD dilakukan melalui strategi eksplorasi terhadap permasalahan masyarakat pesisir agar pihak pemberdaya memiliki gambaran komprehensif yang dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi, dan mencatat masalah atau keluhan dengan terperinci dan teliti sebagaimana dikemukakan oleh warga masyarakat.
2. Mengidentifikasi persepsi-persepsi mereka terhadap persoalan/masalah yang ada.
3. Mengidentifikasi potensi sumber daya atau modal sosial yang bisa dieksplorasi/digali untuk mengatasi masalah tersebut.
4. Membuat urutan prioritas masalah berdasarkan nilai dampak positifnya bagi kehidupan masyarakat dan mengatasi masalah yang mendesak.
5. Merumuskan pemecahan masalah berdasarkan hasil kajian komprehensif terhadap masalah tersebut. Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan menetapkan program, yang kemudian dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang jelas dan terjangkau sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Dengan memperhatikan langkah-langkah diatas, kita akan mencoba melangkah dan bertindak mengatasi suatu masalah yang terjadi pada masyarakat pesisir Cilincing dan Muara Gembong.

### 1.6.3. Evaluasi Program PEMP

Evaluasi Program PEMP dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, kendala dan rencana tindak lanjut. Evaluasi program PEMP dilaksanakan pada tahap persiapan (input), tahap pelaksanaan (proses), dan tahap perkembangan (output). Sasaran evaluasi adalah kegiatan program PEMP tahun sebelumnya.

Indikator evaluasi program PEMP adalah sebagai berikut:

1. **Tahap persiapan (*Input*)**, yaitu:
  - a) Organisasi

- b) Penunjukkan KM, TPD, Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan.
- c) Petunjuk pelaksanaan (Pedum PEMP).
- d) Hasil identifikasi di lokasi program.
- e) Dukungan Pemda melalui Peraturan Perundangan, sarana dan dana pendamping.
- f) Sosialisasi program PEMP.
- g) Ketepatan pencairan DEP ke rekening Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan.

## **2. Tahap pelaksanaan (*Process*)**

### **a). Kinerja KM**

- (1) Terbentuknya LEPP-M3 yang berbadan hukum koperasi.
- (2) Bersama TPD melakukan pendampingan teknis dan manajemen usaha.
- (3) Memfasilitasi masyarakat pesisir untuk mengakses DEP.

### **b). Kinerja TPD**

- 1. Bersama KM melakukan pendampingan teknis dan manajemen usaha.
- 2. Melakukan pendampingan untuk mengakses DEP.

### **c). Kinerja Bank Pelaksana**

- (1) Pelatihan calon petugas LKM.
- (2) Penerapan Swamitra Mina atau sistem LKM yang lain.
- (3) Koordinasi sistem dalam pencairan DEP.

### **d). Kinerja Swamitra Mina**

- (1) Tertib Pengelolaan DEP
  - Pencatatan/pembukuan/pelaporan.
  - Pembuatan target pinjaman dan pengembalian.
- (2) Persetujuan pinjaman secara tepat sasaran, yaitu masyarakat pesisir skala usaha mikro, berusaha sebagai nelayan, pedagang, budidaya, pengolah, kegiatan yang terkait dengan kelautan dan perikanan dan tepat jumlah (perjanjian).
- (3) DEP tersalur.
- (4) Kelancaran pengembalian dan kredit macet non permodalan.

### 3. Tahap perkembangan (*Output*)

- a) Modal LKM bertambah atau berkurang. (Penambahan modal bersumber dari pengembalian pinjaman, mobilisasi dana masyarakat, dan akses modal dari bank dan non bank).
- b) Peminjam bertambah/berkurang.
- c) Manfaat dana pinjaman/SPDN dan Kedai Pesisir dalam:
  - (1) Meningkatkan produksi.
  - (2) Memperluas jenis usaha.
  - (3) Meningkatkan pendapatan nasabah.

Indikator optimalisasi operasional kegiatan swamitra mina dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir adalah melihat besarnya pinjaman yang belum dikembalikan (*outstanding*) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kredit kurang lancar (*outstanding* 1-3 bulan).
2. Diragukan (*outstanding* 4-6 bulan).
3. Kredit macet (*outstanding* lebih dari 6 bulan).

#### 1.6.4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan pangan.
2. Kesehatan.
3. Pendidikan.
4. Pekerjaan.
5. Perumahan.
6. Air bersih.
7. Kebutuhan sandang/pakaian.
8. Pemilikan asset.
9. Pendapatan.
10. Sarana ibadah.

### 1.6.5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif dan analisis SWOT, sebagai berikut:

#### 1. Analisis Kualitatif

Penelitian kualitatif yang akan penulis lakukan bertujuan menggali atau membangun suatu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data (mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir verifikasi).

Dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama atau terpisah, yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan/atau model strategi analisis verifikatif kualitatif.

Menurut Hartono (2007), dalam tradisi penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik analisis kualitatif yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu (1) Analisis Isi (*Content Analysis*), (2) Analisis Domain, (3) Analisis Taksonomik, (4) Analisis Komponensial, (5) Analisis tema Kultural, dan (6) Analisis Komparatif Konstan.

Dari beberapa teknik analisis diatas, peneliti akan memilih teknik yang paling tepat dan relevan dengan tujuan penelitian yang dirumuskan di bagian terdahulu. Menganalisa selengkap mungkin data relevan yang diperoleh di lapangan merupakan keharusan agar tujuan yang dirumuskan dalam tulisan dapat mendekati keberhasilan sesuai yang diinginkan, metode analisis yang akan digunakan adalah:

- a). Analisis Deskriptif yang bersifat kualitatif, dibantu dengan analisis SWOT untuk memotret faktor-faktor eksternal dan internal dari kegiatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- b). Analisis yang bersifat ke akar permasalahan dengan mengkaji segala kemungkinan (*Indepth Analisis*).
- c). Analisis Domain, digunakan untuk menganalisis gambaran obyek penelitian secara umum namun relatif utuh tentang obyek penelitian, dan lebih cocok untuk penelitian yang bertujuan eksplorasi.

- d). Analisis Komparatif Konstan, teknik untuk membanding-bandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat peneliti menganalisa kejadian tersebut, disamping itu juga membandingkan pelaksanaan Swamitra Mina Pantura Jaya di Cilincing dan Swamitra Mina Mitra Usaha di Muara Gembong.

## 2. Analisis SWOT

Metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan, sehingga dengan demikian perencana strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada pada saat ini yang disebut dengan analisa situasi. Model yang dapat digunakan untuk analisis situasi adalah analisis SWOT (Rangkuti, 2006).

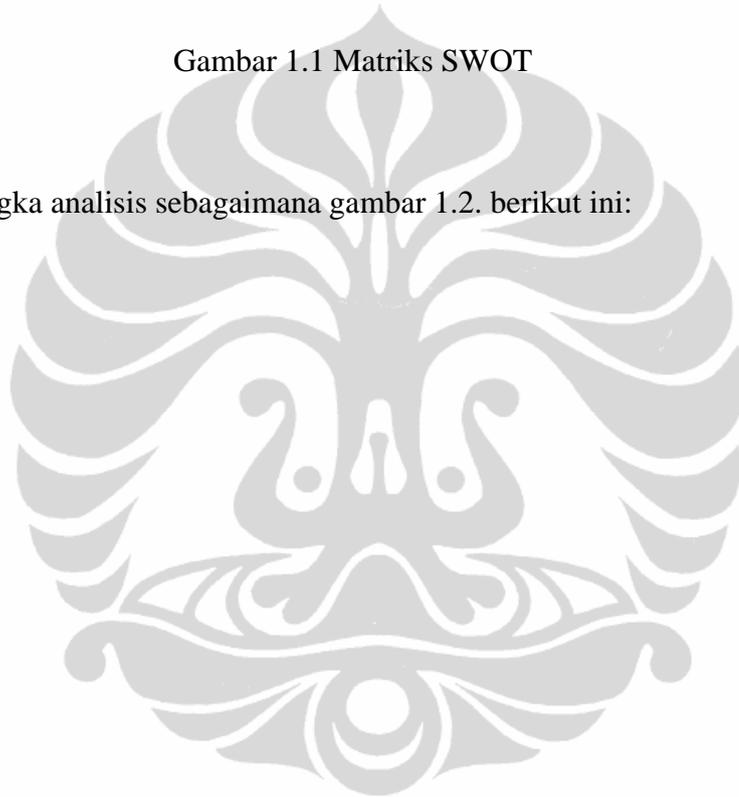
Analisis matriks SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) yaitu situasi penting yang menguntungkan dalam suatu lingkungan dan ancaman (*threats*) yaitu situasi penting yang tidak menguntungkan dengan faktor internal kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya.

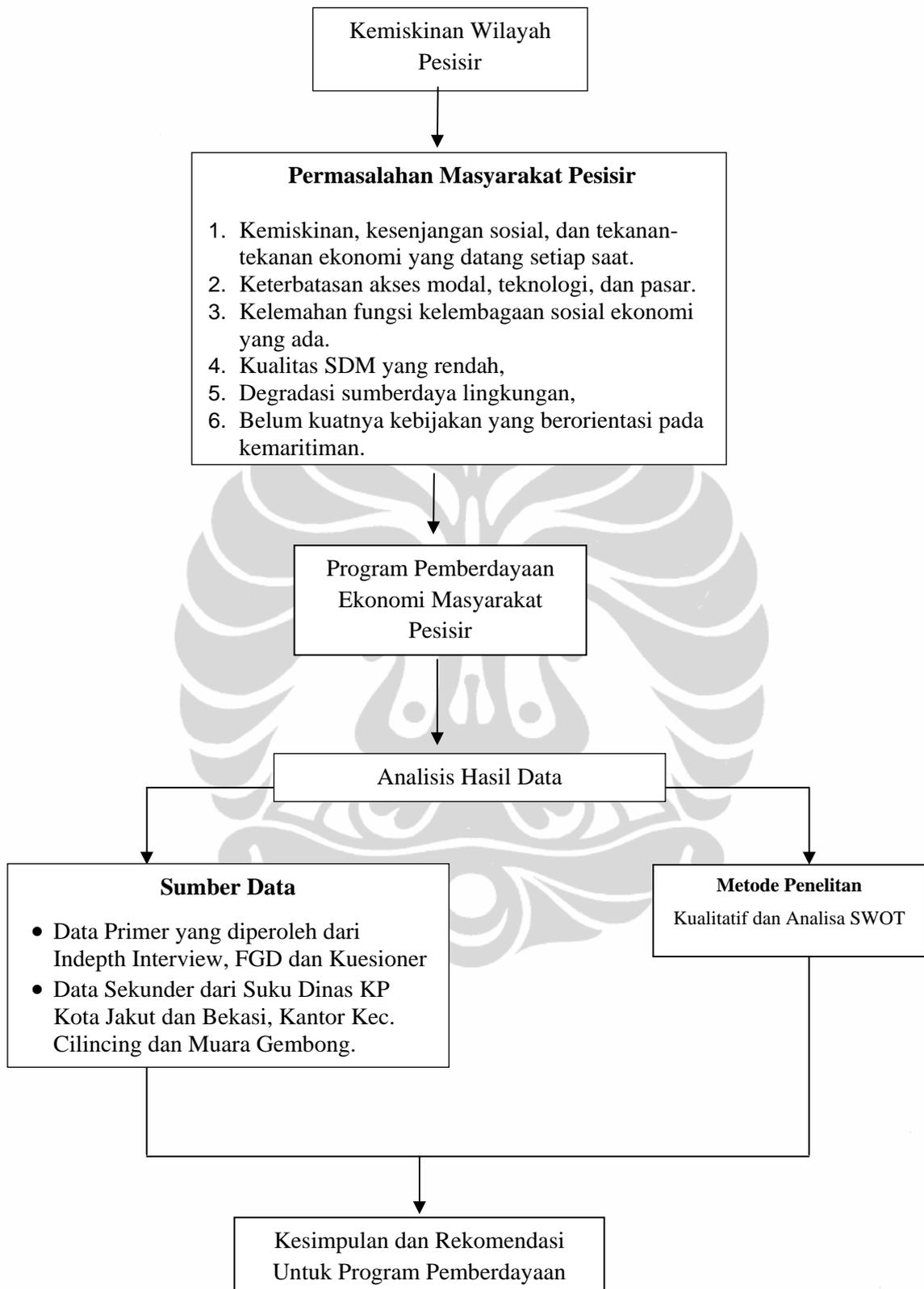
Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi (Rangkuti, 2006). Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T dan strategi S-T, seperti dapat dilihat pada Gambar 1.1.

INTERNAL EKSTERNAL	<i>Strength-S</i> Daftar 5-10 faktor-faktor kekuatan	<i>Weakness-W</i> Daftar 5-10 faktor-faktor kelemahan
<i>Opportunities-O</i> Daftar 5-10 faktor-faktor peluang	Strategi S-O Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
<i>Threats-T</i> Daftar 5-10 faktor-faktor ancaman	Strategi S-T Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi W-T Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar 1.1 Matriks SWOT

Kerangka analisis sebagaimana gambar 1.2. berikut ini:





Gambar 1.2. Kerangka Analisa

## 1.7. Sistematika Penulisan

Pembahasan akan terdiri dari lima bab dengan ringkasan isi tiap-tiap bab adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, batasan masalah/ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan pokok permasalahan pada penulisan tesis ini.

### Bab III HASIL STUDI LAPANGAN

Dalam bab ini akan disajikan hasil studi lapangan di Kecamatan Cilincing dan Muara Gembong.

### Bab IV IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ANALISA SWOT

Menyajikan identifikasi permasalahan dan analisa SWOT.

### Bab V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil analisis terhadap pokok permasalahan dan rekomendasi *action plan*.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Kemiskinan, Pemerataan dan Kesejahteraan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Bappenas, 2003). Sejalan dengan kemiskinan yang berbasis hak, menurut SNPK, permasalahan kemiskinan harus dilihat dari pendapatan atau persepsi yang dikemukakan oleh masyarakat miskin itu sendiri dan diperkuat dengan data statistik.

Semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah "garis kemiskinan internasional" (Todaro and Smith, 2009). Dan menurut Sajogyo (1970) bahwa untuk menentukan garis kemiskinan menggunakan pendekatan setara beras, yaitu untuk di pedesaan kategori rumah tangga miskin jika pengeluarannya kurang dari 320 kg, miskin sekali jika kurang dari 240 kg, paling miskin jika kurang dari 180 kg setara beras per kapita/tahun, dan untuk di perkotaan kategori rumah tangga miskin jika pengeluarannya kurang dari 480 kg, miskin sekali jika kurang dari 360 kg, paling miskin jika kurang dari 270 kg setara beras per kapita/tahun.

Sementara menurut Todaro and Smith (2009), kemiskinan absolut dapat diukur dengan angka, atau "hitungan per kepala (*headcount*)",  $H$ , untuk mengetahui seberapa banyak orang yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan absolut,  $Y_p$ . Ketika hitungan per kepala tersebut dianggap sebagai

bagian dari populasi total,  $N$ , kita memperoleh indeks per kepala (*headcount index*),  $H/N$ .

Pengertian umum pemerataan secara ekonomi yaitu bila status ekonomi/kesejahteraan seseorang dibandingkan dengan orang lain, hal ini disebut dengan analisa kemiskinan relatif atau distribusi pendapatan atau pemerataan. Distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Ukuran tingkat ketimpangan pendapatan antara dua kelompok yang ekstrem disebut rasio Kuznet, yaitu kelompok yang sangat miskin dan kelompok yang sangat kaya di dalam suatu negara (Todaro and Smith, 2009).

Selanjutnya Todaro and Smith (2009) menjelaskan bahwa metode lainnya yang lazim dipakai untuk menganalisa statistik pendapatan perorangan adalah dengan menggunakan kurva Lorenz (*Lorenz curve*). Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), semakin timpang atau tidak merata distribusinya. Dan koefisien gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya, koefisien gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35.

Ukuran kemiskinan ada tiga yaitu ukuran *poverty incidence* (menggambarkan prevalensi kemiskinan dalam suatu masyarakat), ukuran *poverty gap* (mengukur seberapa jauh jurang pendapatan si miskin dari garis kemiskinan, sehingga bisa dihitung jumlah subsidi yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan), dan ukuran *poverty severity* (mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan memberi bobot yang lebih tinggi bagi *poverty gap* yang lebih miskin dibandingkan yang kurang miskin) (Todaro and Smith, 2009).

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan fenomena sosial yang bersifat multidimensi (ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya). Beberapa teori dikembangkan untuk menjelaskan penyebab kemiskinan dan ketidakmerataan

berdasarkan pendekatan ekonomi yaitu: (1) Model 2 sektor Ricardo, dalam bukunya, *“The Principle of Political Economy and Taxation”*, tahun 1817, menjelaskan bahwa perekonomian terdiri dari 2 sektor yaitu pertanian dan industri, sementara sektor pertanian mengalami *diminishing return*. (2) Pandangan Marx yang percaya bahwa perkembangan kapitalis menciptakan distribusi income yang semakin tidak merata, tetapi ternyata sejarah membuktikan bahwa pandangan Marx adalah keliru. (3) Teori Neoklasik yang disebut juga *Marginal Productivity Theory*, dikemukakan oleh John Bates Clark (1899), teori yang sangat dominan digunakan saat ini. (4) Model *Labor-Surplus*: Lewis, yang menyatakan bahwa *inequality* tidak hanya merupakan efek pertumbuhan, tetapi justru penyebab pertumbuhan. (5) *Inverted U-curve*: Kuznet, plot *cross-country* menunjukkan bahwa bentuk U dari *inequality* (Gini) dan Y/Cap. Sedangkan teori kemiskinan berdasarkan pendekatan ekonomi-politik yaitu: (1) Perspektif Konservatif, Oscar Lewis, dan Boeke, yang memandang orang miskin sebagai segment masyarakat yang bercirikan produktifitas rendah, pendidikan rendah, pasrah, tidak punya ambisi/impian, bahkan malas. (2) Perspektif Liberal, Adam Smith dan Charles Valentine, yang memandang manusia sebagai makhluk rasional, dimana kemiskinan terjadi akibat berbagai distorsi di pasar (diskriminasi, ketimpangan pendapatan dan sebagainya). (3) Perspektif Strukturalis/Radikal, Karl Marx dan Dos-Santos, yang berpendapat bahwa struktur ekonomi, politik, sosial-lah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dimana *the rulling elite* mengeksploitasi dan membuat orang miskin tetap miskin (Todaro and Smith, 2009).

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan untuk diminimalisasi atau bahkan bila memungkinkan dihilangkan. Namun pada kenyataannya, kemiskinan masih selalu melekat dalam setiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia sehingga membutuhkan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan. Dalam menanggulangi kemiskinan dibutuhkan suatu pemikiran dan kerja keras yang sangat panjang karena kemiskinan sangatlah kompleks sehingga banyak aspek yang mempengaruhinya. Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan mensyaratkan adanya identifikasi mengenal siapa, apa, bagaimana, di

mana dan mengapa ada masyarakat miskin. Identifikasi tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan yang paling sesuai untuk menanggulangi masalah kemiskinan (Dahuri, 2001).

Pada bulan September 2000, sebanyak 191 negara anggota PBB menyetujui delapan butir *Millennium Development Goals* (MDGs), yaitu komitmen untuk mencapai kemajuan yang nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan manusia lainnya pada tahun 2015. Kedelapan tujuan tersebut sangat ambisius: untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan secara ekstrem; memberikan pendidikan dasar secara universal; mendukung persamaan gender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi tingkat mortalitas anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya; menjaga keseimbangan lingkungan; dan mengembangkan kerja sama global untuk pembangunan. Fokus pertama dari MDGs adalah menyangkut masalah kemiskinan dan kelaparan yang parah, yaitu mengurangi hingga setengah jumlah orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$1 per hari dan mengurangi hingga setengah jumlah orang yang menderita kelaparan (Todaro and Smith, 2009).

Selanjutnya Dahuri (2001) mengatakan bahwa kemiskinan adalah sebuah fenomena sosial yang tidak semata-mata diakibatkan oleh segi buruk suatu sistem sosial sesuatu masyarakat tertentu. Akan tetapi juga diperburuk oleh terdapatnya kebudayaan kemiskinan di antara orang-orang miskin. Kebudayaan Kemiskinan yang dihayati mengakibatkan bahwa mayoritas orang-orang miskin tidak mampu meninggalkan kemiskinannya, kendatipun diberikan bantuan-bantuan ekonomis yang sesungguhnya memadai, bahkan bila pun sistem sosial masyarakatnya mengalami perbaikan mendasar.

Pada kenyataannya Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2008, BPS memperkirakan sekitar 35,0 juta jiwa atau 15,4 % dari jumlah penduduk hidup dengan pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan yaitu jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar harga makanan setara 2.100 kkal sehari dan pengeluaran minimal untuk perumahan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan,

dan transportasi. Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan tersebut telah terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,2 juta jiwa atau 2,4 %, yaitu pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebanyak 37,2 juta jiwa atau 17,8%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kesejahteraan pada populasi penduduk miskin dalam memenuhi standar hidup minimalnya.

Menurut Nikijuluw (2001) kemiskinan merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir yang disebabkan oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. Hubungan antara variabel-variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas variabel-variabel ini maka kemiskinan semakin berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan. Yang jelas bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat pesisir menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka.

Sementara itu, kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabel-variabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya. Kesulitan tersebut juga disebabkan karena kompetisi antar sektor, antar daerah, serta antar institusi yang membuat ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.

Dan kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena

tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan. Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi. Umumnya pengaruh panutan (*patron*) baik yang bersifat formal, informal, maupun asli (*indigenous*) sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya pengentasan kemiskinan kultural ini. Penelitian di beberapa negara Asia yang masyarakatnya terdiri dari beberapa golongan agama menunjukkan bahwa agama serta nilai-nilai kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap status sosial ekonomi masyarakat dan keluarga.

Ketiga jenis kemiskinan diatas inilah yang ingin ditanggulangi melalui program PEMP. Karena itu visi PEMP adalah : "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan". Dari masa ke masa, pergulatan masyarakat nelayan melawan ketidakpastian kehidupan, khususnya bagi mereka yang melakukan penangkapan di wilayah perairan yang sudah dalam keadaan lebih tangkap (*overfishing*). Penantian panjang untuk menuai kesejahteraan hidup yang lebih baik setelah kebijakan modernisasi perikanan diberlakukan juga tidak kunjung tiba. Lebih dari itu, kemiskinan di kampung nelayan menjadi fenomena umum yang banyak terjadi. Berbagai studi menunjukkan fenomena kemiskinan di desa-desa pesisir pantai.

Mayoritas penduduk pesisir dan pulau-pulau kecil masih terlilit kemiskinan, sementara itu kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang secara hayati sangat produktif. Keadaan paradoks ini terutama disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar serta keterbatasan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Para nelayan kecil sangat rentan terhadap eksternalitas ekonomi seperti penurunan produktivitas sumber daya ikan akibat eksploitasi berlebihan atau kerusakan ekosistem. Perilaku yang kurang produktif (cenderung konsumtif) oleh sebagian nelayan juga mempersulit upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan fenomena yang ada terlihat bahwa populasi masyarakat pesisir diperkirakan mencapai 16,42 juta jiwa dan mendiami 8.090 desa. Menurut data BPS 2002 yang diolah SMERU, kemiskinan masyarakat pesisir mencapai Poverty Headcount Index (PHI) sebesar 0,3241. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 32% dari jumlah masyarakat pesisir yang ada merupakan penduduk miskin yang pada umumnya berakar pada keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif.

Menurut Dahuri (2001) bahwa kekakuan aset perikanan (*fixity and rigidity of fishing assets*) adalah alasan utama kenapa nelayan tetap hidup dalam kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya dari mereka untuk keluar dari kemiskinan. Kekakuan aset tersebut adalah karena sifat aset perikanan yang begitu rupa sehingga sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain. Akibatnya pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nelayan tidak mampu untuk mengalih fungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Karena itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

Sedangkan Dahuri (2001) mengajukan argumen lain yaitu bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya *opportunity cost* mereka. *Opportunity cost* nelayan, menurut definisi, adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain, *opportunity cost* adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila *opportunity cost* rendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien.

Ada juga argumen yang mengatakan bahwa *opportunity cost* nelayan, khususnya di negara berkembang, sangat kecil dan cenderung mendekati nihil. Bila demikian maka nelayan tidak punya pilihan lain sebagai mata pencahariannya. Dengan demikian apa yang terjadi, nelayan tetap bekerja sebagai nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan.

Disisi lain Dahuri (2001) mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (*preference for a particular way of life*). Pendapat Dahuri (2001) tersebut lebih menekankan

bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena *way of life* yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. *Way of life* sangat sukar dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu. Hal ini menurut Nikijuluw (2001), masyarakat pesisir/nelayan dengan kehidupan seperti ini tergolong dengan kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu dan sulit diatasi.

Berdasarkan realita dan kondisi yang terjadi pada masyarakat pesisir kita, maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir hendaknya melihat dan memperhatikan konteks sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam (kelautan dan pesisir) dan sumber daya manusia. Seperti sumber daya kelautan dalam hal ini ikan merupakan sasaran utama bagi akselerasi kegiatan ekonomi dalam masyarakat pesisir. Sangat jelas bahwa sumberdaya perikanan yang terbatas dan cenderung *over exploited* di beberapa wilayah pesisir, tidak mungkin memberikan penghasilan yang lebih baik dari peningkatan ekonomi masyarakat pesisir itu sendiri. Selain itu perlu mengurangi ketergantungan masyarakat pesisir/nelayan kita kepada pengijon atau tauke/pengamba' yang umumnya memberikan bantuan modal atau sarana perikanan kepada nelayan kita seperti perahu, jaring dan bahan bakar minyak dengan bunga yang besar bila dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan maka yang terjadi adalah beban hutang yang terus bertambah tanpa berkesudahan.

Kemiskinan yang melanda masyarakat pesisir Cilincing dan Muara Gembong merupakan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Kemiskinan tersebut melanda sebagian dari mereka yang mempunyai mata pencaharian nelayan, pengolah ikan, pedagang ikan dan pembudidaya ikan. Hal ini karena mata pencaharian mereka

tergantung dari alam/laut sehingga pendapatannya tidak memadai untuk kebutuhan sehari-hari.

Dan selanjutnya dengan berdasarkan kepada teori kemiskinan, pemerataan dan kesejahteraan yang telah diuraikan panjang lebar diatas khususnya pada pemenuhan hak-hak dasar dan standar hidup minimal, maka teori-teori tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam menganalisa fenomena kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Cilincing dan Muara Gembong.

## **2.2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Definisi masyarakat pesisir adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir (Satria, 2008).

Sementara itu, menurut Nikijuluw (2001) bahwa populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumber daya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan.

Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk mendukung kehidupannya. Namun untuk lebih operasional, definisi populasi masyarakat pesisir difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil.

Sebagian masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek. Sesuai dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 11 menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).

Menurut Syarief (2009), bahwa didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya adalah:

1. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
2. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
3. Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
4. Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Masyarakat pesisir dikenal sebagai masyarakat yang heterogen dengan berbagai pranata sosial dan faktor alam membentuk karakter mereka tersendiri.

Laut yang selalu bergelombang dan bergerak terus dengan batas tak terhingga, membentuk komunitas yang inklusif, egaliter, dinamis, energik, dan demokratis. Sejarah mencatat banyak peradaban dunia dimulai dari pesisir, hingga sekarang pusat kemajuan kota-kota dunia ada di kota pesisir seperti New York, Hongkong, Singapura. Laut dengan fungsi *high way economis* menjadi pilihan jalur aktivitas perdagangan dunia dari jaman kerajaan hingga sekarang. Kendatipun demikian, masyarakat pesisirnya masih hidup terbelakang, termasuk di negara Indonesia. Masyarakat pesisir menyumbang angka kemiskinan yang terbesar dalam struktur komunitas sosial. Dengan presentasi 32% masyarakat pesisir di bawah garis kemiskinan menunjukkan angka yang tinggi. Tidak heran program pemerintah pusat melalui instansinya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusung banyak program peningkatan status sosial ekonomi masyarakat pesisir (Tuhuteru, 2006).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kekuatan dan kapasitas masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya, selain itu pemberdayaan masyarakat merupakan proses sosialisasi yang multidimensi untuk membantu masyarakat melakukan kontrol terhadap kondisi sosial mereka, terutama berkaitan dengan isu yang mereka anggap penting, dan pemberdayaan masyarakat adalah kontrol masyarakat yang erat bersinggungan dengan kebijakan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat guna mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu penting yang mereka hadapi. Hal-hal yang dominan perlu dilakukan adalah memberikan informasi dan penjelasan atas kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah penting masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan agar berpihak pada kepentingan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk advokasi dan negosiasi. Proses pemberdayaan terjadi pada saat masyarakat mampu mengidentifikasi masalah dan penyebab kemiskinan, serta sumber daya yang tersedia di wilayahnya, mengkaji alternatif penyelesaian masalah kemiskinan dan memutuskan tindakan dan bagaimana tindakan tersebut harus diambil.

Masyarakat yang diberdayakan memiliki kebebasan memilih dan mewujudkan pilihan dalam suatu proses mengambil keputusan, masyarakat

miskin sebagai aset dan mitra dalam pembangunan, melalui: pengembangan institusi dan sumberdaya, fasilitasi terhadap akses informasi, dan penciptaan lingkungan yang mendukung (*enabling condition*) untuk terjadinya reformasi kebijakan dan institusi, peningkatan kapasitas untuk advokasi dan negosiasi. Pemberdayaan terjadi jika interaksi berlangsung secara saling hormat menghormati, bertoleransi dan ada dukungan sosial.

Mempertimbangkan karakteristik masyarakat pesisir, khususnya nelayan sebagai komponen yang paling banyak, serta cakupan atau batasan pemberdayaan maka sudah tentu pemberdayaan nelayan patut dilakukan secara komprehensif. Pembangunan yang komprehensif adalah pembangunan dengan memiliki ciri-ciri (1) Berbasis lokal, (2) Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, (3) Berbasis kemitraan, (4) Secara holistik atau multi aspek, dan (5) Berkelanjutan (Syarief, 2009).

Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan menitik beratkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya peningkatan produksi. Hal ini merubah prinsip-prinsip yang telah dianut selama ini yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih diarahkan kepada pemenuhan target-target variabel ekonomi makro seperti pengurangan inflasi, peningkatan ekspor, peningkatan devisa, penurunan pengangguran. Titik berat tujuan atau sasaran pembangunan holistik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan semakin sejahtera maka indikator ekonomi makro seperti di atas akan dengan sendirinya dicapai.

Berbagai program, proyek dan kegiatan telah dilakukan untuk mengentaskan nelayan dari kemiskinan. Namun ternyata jumlah nelayan kecil secara magnitute tetap bertambah. Desa-desa pesisir semakin hari semakin luas areanya dan banyak jumlahnya. Karena itu meskipun banyak upaya telah dilakukan, umumnya bisa dikatakan bahwa upaya-upaya tersebut belum membawa hasil yang memuaskan (Nikijuluw, 2001).

Hanya baru pada akhir tahun 1990, program pemberdayaan masyarakat sebagai ganti program pembinaan masyarakat mulai mendapat tempat karena bukti dan pengalaman empiris di banyak negara. Program pemberdayaan masyarakat seakan-akan menjadi *new mainstream* dalam pembangunan, dikembangkan dan dipromosikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Program pemberdayaan masyarakat berhasil di banyak tempat karena militansi (*sifat ngotot untuk berhasil*) LSM untuk melaksanakannya. Program pemberdayaan masyarakat adalah program pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat, program yang berpangkal dan berbasis masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, program yang berasal dari bawah yang berarti bahwa masyarakatlah yang mengusulkannya, serta program yang bersifat advokasi karena peran orang luar hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternative pemecahan masalah kepada masyarakat (Nikijuluw, 2001).

Selanjutnya Nikijuluw (2001) menjelaskan pula bahwa program pemberdayaan masyarakat telah menjadi *mainstream* upaya peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan. Dengan pemberdayaan masyarakat maka pembangunan tidak mulai dari titik nadir, tetapi berawal dari sesuatu yang sudah ada pada masyarakat. Pemberdayaan berarti apa yang telah dimiliki oleh masyarakat yaitu sumberdaya pembangunan yang perlu dikembangkan sehingga semakin nyata manfa'atnya bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan program-program yang ada maka Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu *directaction* program dengan sasaran masyarakat pesisir. Program ini dimulai pada tahun 2001 dengan sistem *block grant* kepada kabupaten/kota penerima program.

Menurut Kusnadi (2009), Pelaksanaan program PEMP dibagi menjadi tiga periode sebagai berikut:

1. Periode inisiasi (2001-2003) adalah periode membangun, memotivasi, dan memfasilitasi masyarakat pesisir agar mampu memanfaatkan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) yang telah dibentuk sebagai cikal-bakal *holding company* masyarakat pesisir. Aktivitas pada periode ini untuk mengatasi masalah rendahnya budaya kewirausahaan masyarakat dan tersumbatnya akses permodalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir.
2. Periode institusionalisasi (2004-2006) merupakan periode untuk menjadikan LEPP-M3 sebagai lembaga berbadan hukum koperasi, sehingga LEPP-M3 dapat memperluas usaha ekonomi secara legal.

3. Periode diversifikasi (2007-2009) merupakan periode perluasan unit usaha Koperasi LEPP-M3. Melalui perluasan usaha diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat pesisir.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti hasil penelitian Maddusila (2009) yang berjudul “Analisis Kelembagaan Ekonomi yang Dibutuhkan Masyarakat Nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan”, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Masih terdapat perbedaan kebutuhan antara pemanfaat dan pembuat kebijakan program berupa: (a) Prosedur Pengurusan (b). Besarnya dana pinjaman (c). Pelaksanaan dilapangan.
2. Program pemberdayaan pada nelayan belum menyentuh langsung ke pola kegiatan nelayan yang terkait dengan hubungan kerjasama dengan punggawa, sehingga ada kecenderungan akan menyulitkan dalam pengembalian pinjaman.
3. Kecenderungan nelayan meminjam pada lembaga non formal seperti punggawa dan peminjam uang karena (a). Cepat dan mudah (b). Tanpa potongan (c). Tanpa prosedur administrasi (d). Dapat dilanjutkan selama agunan masih sesuai taksiran.
4. Kelembagaan PEMP sebagai salah satu model untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pada dasarnya telah sesuai, namun masih lemah dalam pembinaan lanjutan yaitu pasca pemberian dana dan monitoring yang berkelanjutan.
5. Pembentukan semacam lembaga pengelola seperti LPM3, sebagai penyalur dana ke kelompok, hendaknya bukan menjadi tandingan bagi kelembagaan yang ada di desa. Karena itu perlu modifikasi dengan membentuk Mitra Desa berbadan hukum.
6. Model pengembangan program akan lebih efektif bila melibatkan punggawa atau pemilik akses SD ekonomi sebagai Mitra dengan memanfaatkan dana pemerintah dalam bentuk program dana produktif.

7. Untuk menunjang konsep model tersebut peran Perguruan Tinggi sebagai fasilitator pengembangan SDM dan LSM selaku pengawas harus dimasukkan dalam sistem.
8. Model pengembangan program akan lebih efektif bila melibatkan punggawa atau pemilik akses sumberdaya ekonomi sebagai Mitra dengan memanfaatkan dana pemerintah dalam bentuk program dana produktif.
9. Manfaat yang akan diperoleh dari konsep model yang ditawarkan adalah terjadi hubungan yang sinergis antara punggawa, nelayan dan pemerintah sehingga memberikan keuntungan bukan hanya dari segi ekonomi tapi akan meningkat posisi tawar nelayan.

Sementara berdasarkan penelitian Fauzan (2004) yang berjudul “Keberadaan LKM Swamitra Mina di Kabupaten Lombok Timur” mengangkat permasalahan tentang kemiskinan struktural yang terjadi pada masyarakat pantai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode participatory action research (PAR). Dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada umumnya daerah pantai di wilayah Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah penghasil ikan dan tempat pengembangan tambak, meliputi tambak udang/Lobster disekitar Kecamatan Keruak dan Sambelia.
2. Hadirnya LKM Swamitra Mina di wilayah pesisir, secara bertahap berperan dalam mengurangi tengkulak dan rentenir, sehingga LKM dapat memobilisasi dana masyarakat dengan adanya suku bunga tabungan yang menarik.
3. Kepada masyarakat pantai perlu diusahakan tunjangan modal dalam bentuk pemberian bantuan kredit lunak dengan prosedur yang sederhana dan mudah, misalnya melalui koperasi nelayan atau dengan bantuan dana bergulir (revolving fund).
4. Program tindak lanjut dari riset ini pada dasarnya merupakan aktivitas pengulangan dari kegiatan refleksi pemetaan ulang penyusunan rencana tindak, pelaksanaan rencana tindak, dan monitoring dan evaluasi.

Dan berdasarkan hasil penelitian Mardiana E.Fachry. dan Asni Azis (2006) (Analisis Penguatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan) di Desa Tamalate dan Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan analisis

deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jenis usaha yang diusahakan perempuan pesisir dan dianggap berpotensi untuk dikembangkan karena terkait dengan kondisi masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan adalah (1). Sembako (2). Pengolahan hasil perikanan (3). Simpan Pinjam dan (4). dagang. Bentuk pemberdayaan yang diinginkan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga nelayan adalah (1). Pelatihan ketrampilan dan SDM (2). Bantuan modal (3). Perbaikan sarana usaha dan (4). Pendampingan usaha.

Selanjutnya dari hasil penelitian Dharmayuni (2007) (Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Outstanding* Pinjaman pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Studi Kasus Swamitra Mina Pantura Jaya, Cilincing Jakarta Utara), menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (statistik parametrik dan ekonometrik). Hasil penelitian tersebut adalah resiko pinjaman tidak kembali akan lebih besar jika dana dipinjamkan kepada masyarakat dengan jenis usaha atau profesi yang berhubungan dengan hasil laut, profesi nelayan dan pembudidaya ikan memiliki resiko paling tinggi untuk tidak mengembalikan pinjaman, dan program PEMP yang memanfaatkan dana DEP tidak sepenuhnya berhasil karena terbukti dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah tersebut tidak dapat berputar dengan maksimal sehingga prinsip pemberdayaan, yaitu *helping the poor to help themselves* belum terlihat hasilnya.

Kemudian dari hasil penelitian Hanum (2009) (Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan, Studi Kasus Masyarakat Pesisir di Tanjung Gundap, Kecamatan Sagulung, Kota Batam)", yang menggunakan metode kualitatif (*Participatory Rural Appraisal/PRA*) dan metode kuantitatif (*Analytical Hierarchy Process/AHP*). Rekomendasi skenario *action plan* yang diusulkan adalah pembuatan sarana dan prasarana (pengolahan limbah dan sampah, air bersih, MCK, listrik dan jalan umum), pemberian modal usaha produktif di bidang lingkungan.

*Learning point* yang dapat diambil dari hasil-hasil studi yang diuraikan diatas adalah sebagai pedoman dalam penelitian ini yaitu mengenai metode kualitatif sebagaimana penelitian Maddulisa, Mardiana dan Asni; pembahasan tentang keberadaan LKM Swamitra Mina pada penelitian Fauzan; dan pembahasan pemberdayaan masyarakat pesisir pada penelitian Hanum.

### 2.3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti yaitu dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dan dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Sementara di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai *workfare*<sup>5</sup>.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Ayat (2)-nya menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sementara ayat (10)-nya menjelaskan bahwa pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang

---

<sup>5</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>. Senin, 1 Maret 2010.

mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kesejahteraan sosial dapat berarti kesejahteraan sebuah masyarakat. Dalam ekonomi, Kesejahteraan sosial adalah pendayagunaan orang yang dianggap dalam sebuah kesatuan dan merupakan penyediaan pelayanan sosial di berbagai bidang, untuk keuntungan masyarakat individu. Penggunaan ini memiliki gagasan yang mirip dengan negara sejahtera. Di Indonesia Kesejahteraan Sosial juga digunakan sebagai nama disiplin akademik, yaitu sisi terapan dari ilmu sosiologi. Kesejahteraan sosial harus dibedakan dengan sejahtera. Di Amerika Serikat, *sejahtera* kadangkala dianggap sinonim dengan penyediaan bantuan finansial dalam bentuk jaminan sosial. Kesejahteraan sosial dapat dihubungkan dengan pelayanan kerja sosial<sup>6</sup>.

Menurut Todaro and Smith (2009), kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan per kapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan dan tingkat ketimpangan. Dalam pemberantasan kemiskinan absolut harus diperhatikan pula ketimpangan relatif, karena ketimpangan pendapatan yang ekstrem menyebabkan inefisiensi ekonomi, dan ketimpangan dapat menyebabkan alokasi asset yang tidak efisien, disamping itu ketimpangan yang terjadi di antara penduduk yang berada di atas garis kemiskinan adalah bahwa disparitas pendapatan yang ekstrem melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang ekstrem pada umumnya dipandang tidak adil. Tingkat ketimpangan berhubungan dengan insentif untuk bekerja keras atau berinovasi. Namun demikian, sebagian besar orang akan memilih negara dengan tingkat ketimpangan yang lebih kecil daripada yang sekarang terjadi di dunia, karena banyak ketimpangan yang kita lihat di dunia ini disebabkan oleh keberuntungan atau faktor-faktor eksternal, seperti kemampuan untuk memukul bola dengan tongkat yang dibawa sejak lahir, atau hanya mendapatkan warisan sifat keturunan dari nenek buyutnya. Untuk semua alasan ini, maka rumus kesejahteraan,  $W$ , adalah  $W = W(Y,I,P)$  dimana  $Y$  adalah pendapatan per kapita dan berhubungan positif dengan fungsi kesejahteraan kita,  $I$  adalah ketimpangan dan berhubungan

---

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan_sosial). Senin 1 Maret 2010.

negatif, dan P adalah kemiskinan absolut dan juga berhubungan negatif. Ketiga komponen ini mempunyai signifikansi yang berbeda-beda, dan kita perlu mempertimbangkan ketiga elemen ini semua untuk mendapatkan penilaian menyeluruh terhadap kesejahteraan di Negara berkembang.

Selanjutnya Akhmadi *et. All.* (2006) mengungkapkan bahwa kesejahteraan keluarga diklasifikasi menjadi empat yaitu: (1) kaya atau *beunghar*, (2) menengah atau *sedang*, (3) miskin, dan (4) sangat miskin atau *miskin pisan*. Dan tujuh indikator kesejahteraan keluarga adalah pendapatan, pekerjaan, kepemilikan aset, kondisi rumah, pendidikan anak, kesehatan, dan pola makan (Smeru, Desember 2006). Indikator kesejahteraan dilihat secara moneter dan non-moneter, indikator moneter adalah pendapatan dan konsumsi, sedangkan indikator non-moneter adalah *morbidity*, rasio pendidikan/dokter, angka melek huruf, *school enrollment*, kekurangan gizi, dan aspek non-ekonomi lain yang tidak mudah dikuantifisir, dan indeks komposit yaitu kombinasi indikator non dan moneter, misalnya Indeks Pembangunan Manusia (HDI).

Departemen Sosial yang sekarang adalah Kementerian Sosial merupakan salah satu unsur Pemerintah pusat di bidang kesejahteraan sosial, mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun Daerah mempunyai wewenang untuk mengupayakan kesejahteraan sosial masyarakatnya, peran Pemerintah pusat tidaklah hilang begitu saja. Kementerian Sosial tetap mempunyai peran dengan memberikan acuan kebijakan dan program yang bersifat nasional. Konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mempunyai persepsi atau pandangan yang sama terhadap kebijakan dan program pemerintah pusat. Implikasi positif dari hal tersebut, adalah bahwa pemerintah pusat (Kementerian Sosial) perlu mengadakan langkah-langkah untuk menyamakan persepsi atau pandangan dimaksud<sup>7</sup>.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai salah satu sub sistem pembangunan nasional yang pada hakekatnya perwujudan taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan tugas dan fungsinya

<sup>7</sup> <http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/2005/Sutaat.htm>, Jum'at. 5 Maret 2010.

sesuai dengan bidangnya, yaitu: 1) mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberi perhatian kepada masyarakat rentan dan kurang beruntung; 2) mencegah dan mengendalikan serta mengatasi permasalahan sosial; 3) memelihara dan memperkuat stabilitas sosial dan integrasi sosial; dan 4) mengembangkan prakarsa dan peran masyarakat mampu dan dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial (Sutaat, 2005).

Mencermati misi yang diemban pembangunan kesejahteraan sosial terdapat beberapa hal yang perlu digaris-bawahi, yaitu Pertama, mewujudkan keadilan melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial. Kedua, sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah masyarakat rentan dan kurang beruntung yang biasanya disebut dengan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Ketiga, dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial melibatkan masyarakat mampu dan dunia usaha sebagai investasi modal sosial. Keempat, hasil yang hendak dicapai adalah mewujudkan atau meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat sehingga terpeliharanya stabilitas sosial dan integrasi sosial (Sutaat, 2005).

Data BPS (2009) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan pada Oktober 2009 mengalami penurunan drastis. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Tukar Nelayan yang mengalami penurunan sebesar 0,92 persen dibandingkan bulan September 2009. Hasil pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran nelayan dan pembudidaya ikan dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan keperluan untuk produksi perikanan. Tingkat kesejahteraan ini diperkirakan akan semakin menurun seiring dengan terus meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan menurunnya hasil produksi nelayan dan pembudidaya ikan<sup>8</sup>.

Sampai saat ini, belum banyak upaya dari berbagai pihak dalam memberdayakan dan mendayagunakan organisasi dan pranata-pranata sosial lokal untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.

---

<sup>8</sup> <http://kiara.or.id/content/view/full/677/71/> Jum'at, 5 Maret 2010.

Padahal, peluang organisasi dan pranata-pranata lokal untuk berperan strategis dalam rekayasa pembangunan sosial sangat terbuka luas. Peluang-peluang ini harus dimanfaatkan, sehingga upaya memperkuat kapasitas organisasi dan pranata-pranata sosial sebagai basis mengatasi berbagai masalah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial bisa dicapai secara efektif. Pandangan demikian harus didasari oleh keyakinan yang kuat bahwa pembenahan pada dimensi-dimensi sosial-budaya masyarakat dan penguatan pada sektor kehidupan ini merupakan syarat dasar bagi terbangunnya secara kokoh dimensi-dimensi kehidupan yang lain, seperti dimensi ekonomi, politik, keamanan, dan jaminan hidup untuk masa depan (Kusnadi, 2009).

Oleh sebab itu, proses penyadaran sosial secara luas tentang arti penting gerakan sosial berbasis organisasi dan pranata-pranata lokal sangat penting sumbangannya untuk mentransformasikan masyarakat nelayan kepada kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab. Dalam hal ini, dukungan media informasi dan komunikasi sangat berarti untuk menyebarkan kesadaran kolektif-transformatif, orientasi berfikir *problem solving*, dan menjadi wahana konsolidasi potensi unsur-unsur sosial, individu, kaum intelektual, organisasi, pranata-pranata lokal, dan seterusnya sebagai kekuatan progresif dalam membangun kesejahteraan masyarakat nelayan (Kusnadi, 2009).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Sutaat (2005) yang berjudul "Persepsi Legislatif Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Daerah". Penelitian dilaksanakan di tujuh propinsi, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Responden penelitian adalah anggota DPRD kota dan kabupaten periode 1999-2004, terutama anggota Komisi E. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa setelah responden diperkenalkan dengan konsep, kebijakan, dan beberapa program bidang kesejahteraan sosial, secara umum mereka setuju dengan apa yang digariskan oleh Departemen Sosial. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program, adalah kesesuaiannya dengan kondisi lokal. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, adalah belum memadainya kualitas SDM di daerah, diperlukan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas SDM secara terus menerus. Berdasarkan beberapa

temuan hasil penelitian ini, dikemukakan pula beberapa saran, antara lain perlunya sosialisasi dan dialog sesering mungkin antara Departemen Sosial dengan lembaga legislatif dan eksekutif di daerah. Upaya dimaksud akan lebih berhasil bila disertai dengan publikasi berbagai produk kebijakan, program, maupun panduan-panduan yang dapat dijadikan acuan oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayahnya.

Penelitian yang lain adalah "Pengaruh Kegiatan Perhutanan Sosial Terhadap Pelestarian Hutan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar: Studi Kasus Program Membangun Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) PT. Hutan Musi Persada Wilayah 1 Suban Jeriji di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan" oleh Yuska (2005). Studi ini bertujuan untuk mengkaji keberhasilan program MHBM dalam melestarikan hutan, yang berupa lestari fungsi produksi dan lestari fungsi ekologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut, dan upaya-upaya yang harus dilakukan guna keberlanjutan dan keefektifan program tersebut di masa yang akan datang. Metode yang digunakan pada studi ini adalah metode survei *before* dan *after*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif yang berupa pengujian statistik non parametrik (pengujian Mc Nemar dan pengujian Chi-Square) dan statistik deskriptif, yang dilengkapi dengan analisis kualitatif.

Lingkup wilayah studi meliputi wilayah Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Dangku dan wilayah Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung. Indikator yang digunakan dalam studi untuk melihat keberhasilan program MHBM dalam melestarikan hutan berupa lestari fungsi produksi adalah penambahan luas kawasan hutan produktif dan penurunan intensitas kebakaran hutan. Untuk lestari fungsi ekologi, indikator yang digunakan adalah ketersediaan sumberdaya air dan perlindungan populasi satwa. Untuk sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat digunakan indikator Kesejahteraan Keluarga BKKBN, yaitu indikator ekonomi berupa pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan,

dan papan), serta indikator non ekonomi berupa kebutuhan ibadah dan kebutuhan sosial lainnya (pendidikan dan kesehatan).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, program MHBM yang dilaksanakan di kedua wilayah studi telah berhasil mencapai sasaran pelestarian hutan berupa lestari fungsi produksi dan tidak berhasil mencapai sasaran pelestarian hutan berupa lestari fungsi ekologi. Untuk sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, program MHBM yang dilaksanakan di wilayah Desa Suban Jeriji telah berhasil mencapai sarannya, sedangkan untuk program MHBM yang dilaksanakan di wilayah Desa Tanjung Agung tidak berhasil mencapai sarannya.

Wijaya (2009) menulis tentang "Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan untuk Meningkatkan Keadaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Lekok" dengan tujuan untuk mengetahui keadaan sosial masyarakat nelayan, tingkat kesejahteraan keluarga nelayan serta mengetahui kebijakan apa saja yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data terdiri dari orang, peristiwa dan dokumen. Data orang atau informan diperoleh melalui wawancara. Informan penelitian adalah orang yang bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Desa Jatirejo, Kepala Desa Tambaklekok dan para nelayan di Kecamatan Lekok. Data peristiwa diperoleh melalui observasi tentang kejadian dan fenomena yang ada sangkut-pautnya dengan Kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian yang dipakai adalah alur kegiatan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan untuk mendapatkan kebenaran pemaparan dilakukan dengan cara perpanjangan ke ikut sertaan, ketekunan pengamatan, pemeriksaan seawat, analisis kasus negatif, kecukupan referensial dan pengecekan anggota.

Hasil penelitiannya adalah: (1) Keadaan sosial masyarakat nelayan di Kecamatan Lekok adalah tingkat pendidikan masyarakat nelayan adalah tamatan SD itu pun masih ada sebagian nelayan yang masih belum pernah mengenyam

dunia pendidikan sama sekali dan anak-anak mereka masih ada sebagian yang sekolah sampai SMP, (2) Dalam menangkap ikan ada istilah kerja sama atau gotong-royong dan dalam satu kapal jumlah pekerja yang menangkap ikan di laut berjumlah enam orang, (3) Jaring yang digunakan nelayan untuk melaut terdiri dari tiga jaring, adalah sebagai berikut: jaring lepas, jaring lingkaran dan jaring gondrong, (4) Tingkat kesejahteraan keluarga nelayan di Kecamatan Lekok, menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Kecamatan Lekok masih belum sejahtera, itu terbukti dengan nelayan yang masih terikat dengan juragan karena nelayan tersebut memiliki utang modal yang digunakan nelayan dalam melaut, (5) Penghasilan nelayan per harinya mencapai Rp 25.000 bila dihitung dalam sebulan penghasilan nelayan sebesar Rp 750.000, (6) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Lekok adalah dengan adanya koperasi LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro, Mitra, Mina) dan adanya pembinaan masyarakat pesisir<sup>9</sup>.

Lebih lanjut Akhmadi *et.all.* (2006) melalui Lembaga Penelitian SMERU (Verifikasi Ketepatan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM) dalam Penargetan Keluarga Miskin), menambahkan bahwa permasalahan penentuan target merupakan masalah yang berulang kali timbul dalam pelaksanaan suatu program kesejahteraan sosial. Lembaga Penelitian SMERU telah mengembangkan suatu sistem pendataan yang berbasis pada masyarakat setempat dan analisisnya dilakukan secara objektif dengan menggunakan metode *Principal Component Analysis* atau Analisis Komponen Dasar. Sistem pendataan ini dikenal dengan nama Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM). Sistem ini diakui memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, bahkan di Philipina sistem ini telah dijadikan sebagai kebijakan berskala nasional dalam sistem pendataan.

Di Indonesia, penggunaan sistem ini telah diuji cobakan di empat desa di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hasil dari uji coba SPKM tersebut dapat

---

<sup>9</sup> <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/1306>. Jum'at 5-3-10.

mengidentifikasi keluarga-keluarga yang ada di desa-desa uji coba berdasarkan urutan kesejahteraan keluarganya, mulai dari yang paling sejahtera hingga yang paling tidak sejahtera atau paling miskin. Untuk menguji tingkat keakuratan hasil uji coba SPKM di Indonesia ini, SMERU melakukan verifikasi dengan menggunakan metode *focused group discussion* atau diskusi kelompok terarah di dua dari empat desa uji coba SPKM tersebut.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang diperoleh dari SPKM memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi. SPKM mampu secara tepat menyusun urutan kesejahteraan keluarga antar-RW dan antardusun di masing-masing wilayah. Ketepatan hasil ini akan mempertajam penargetan wilayah dalam menjalankan suatu program. Lebih dari itu, SPKM juga mampu memprediksi urutan kesejahteraan keluarga dengan tingkat keakuratan yang cukup tinggi, yang pada akhirnya diharapkan dapat meminimalkan tingkat subjektivitas penargetan suatu program.

Baik nelayan tradisional maupun nelayan buruh merupakan kelompok sosial terbesar dalam masyarakat nelayan di Indonesia. Kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan sosial menimpa sebagian besar dari kategori nelayan tersebut. Masalah ini tidak hanya mengganggu proses pembangunan nasional di bidang perikanan dan kelautan, tetapi juga akan menimbulkan kerawanan sosial dan menghambat pengembangan sumber daya manusia berkualitas untuk menunjang keberhasilan pembangunan bangsa di masa depan<sup>10</sup>.

Studi-studi mengenai kemiskinan nelayan memberikan gambaran yang jelas mengenai kehidupan masyarakat nelayan khususnya nelayan tradisional dan nelayan buruh. Suyanto (1996) menggambarkan bahwa kehidupan nelayan tradisional dan buruh nelayan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, sedikit kegoncangan atau kebutuhan mendadak, mereka akan *collapse*. Faktor penyebabnya menurut Suyanto adalah karena akumulasi faktor yang sangat kompleks, mulai dari lingkungan alam dan irama musim yang sulit ditebak, ketinggalan teknologi, kekurangan modal, tingkat pendidikan yang rendah, penghisapan dan posisi tawar-menawar yang lemah. Suyanto menambahkan

---

<sup>10</sup> <http://psmbupn.org/article/nelayan-dalam-ketidakpastian.html>. Jum'at, 5 Maret 2010.

bahwa musim dan cuaca dapat tiba-tiba menghentikan kegiatan penangkapan ikan di laut. Terhentinya usaha penangkapan berarti terhentinya sumber penghasilan untuk para nelayan. Dalam situasi seperti itu, para nelayan terpaksa menguras kembali tabungan kalau ada, atau mengambil kredit.

Gambaran kondisi kemiskinan masyarakat nelayan, diperlihatkan oleh Wahyono dkk (2001) dalam penelitiannya pada masyarakat nelayan Cirebon dan Cilacap. Sebagaimana kutipan di bawah ini:

*"Pemukiman penduduk di desa ini tampak kurang baik, disebabkan oleh buruknya sanitasi lingkungan yang ada, antara lain karena belum adanya saluran pembuangan air kotor (limbah) rumah tangga. Sehingga air kotor limbah rumah tangga menggenang di sekitar rumah. Untuk pembuangan hajat juga masih banyak yang melakukannya di sungai."*

*"Rumah-rumah penduduk sebagian besar terbuat dari bahan bangunan yang mudah hancur, seperti dindingnya dari gedek (dinding bambu), berlantai tanah dan beratap genteng dengan atap penguat dari bambu."*

Kusnadi (2003), dalam analisisnya bahwa terdapat sebab yang kompleks, mengapa kemiskinan nelayan terus terjadi. Ia menjelaskan ada sebab internal dalam masyarakat nelayan dan ada problem eksternal. Sebab internal antara lain: keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan modal usaha, relasi pemilik – nelayan buruh, kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan dan ketergantungan yang tinggi terhadap *okupasi* melaut. Sedangkan sebab kemiskinan yang bersifat eksternal yang berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan, antara lain: kebijaksanaan pembangunan perikanan yang berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, sistem pemasaran hasil perikanan yang mengundang pedagang perantara, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan, dan kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun.

Lebih lanjut Kusnadi menambahkan bahwa permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan mulai muncul ke permukaan setelah satu dekade

dilaksanakannya kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap pada awal tahun 1970. Kebijakan ini dikenal dengan istilah revolusi biru (*blue revolution*). Proyek besar ini berimplikasi pada keserakahan sosial atas sumber daya perikanan yang mendorong setiap individu untuk berkuasa penuh terhadap sumber daya tersebut. Keserakahan ini akan berakibat pada kelangkaan sumber daya perikanan. Kompetisi yang semakin tinggi dan kesenjangan akses dan pendapatan yang berimplikasi pada timbulnya kesenjangan sosial ekonomi antar pengguna sumber daya perikanan (Kusnadi, 2003).

Kebijakan motorisasi dan modernisasi, ternyata banyak menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Beberapa penelitian memperlihatkan dampak negatif dari proyek yang dikenal dengan istilah *blue revolution* ini. Emerson (1979) menulis, pemberian bantuan teknologi motorisasi, memberikan dampak negatif bagi produktivitas nelayan; karena motorisasi, ikan-ikan yang semula biasa ditangkap nelayan tradisional akan disedot oleh nelayan yang memiliki kapal modern bermesin dengan alat yang berdaya tangkap besar (Mubyarto dkk, 1984).

Lebih lanjut Emerson (1979) menambahkan, dalam studinya di pantai utara Jawa Tengah, khususnya di Pati, Demak, Jepara dan Rembang ditemukan bahwa tidak adanya perubahan nasib kehidupan nelayan tradisional semenjak diterapkannya modernisasi penangkapan ikan di daerah-daerah tersebut. Bahkan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan di Muncar Jawa Timur pada tahun 1977, didapati program modernisasi di sektor perikanan bukan saja tidak mendatangkan perbaikan bagi kehidupan nelayan tradisional, tetapi juga menimbulkan suasana ketegangan di antara para nelayan tradisional dengan nelayan modern. Ketegangan itu akhirnya menyulut timbulnya tindakan pembakaran terhadap kapal-kapal penangkap ikan modern yang dilakukan oleh nelayan tradisional.

Dalam pada itu, studi yang dilakukan Mubyarto dkk. (1984) terhadap kehidupan nelayan tradisional di dua desa pantai Kabupaten Jepara Jawa Tengah mengungkapkan tentang adanya penurunan jumlah pendapatan nelayan tradisional di daerah itu akibat beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan modern. Hasil studi ini menunjukkan bahwa semenjak kurun waktu 1973-1977 setiap nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan sebesar 58%.

Berdasarkan teori kemiskinan dan teori pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, maka temuan empiris tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam menganalisa fenomena kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Cilincing dan Muara Gembong. Selain itu dilihat pula informasi dari hasil penelitian Maddusila, Fauzan, Mardiana dan Asni Azis, Dharmayuni, Hanum, serta penelitian Wijaya, dapat kita lihat bahwa penelitian tersebut dikhususkan pada pemberdayaan masyarakat pesisir yang notabene adalah penduduk miskin. Penelitian yang kemudian dirasa cukup dekat dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian Dharmayuni. Hal tersebut dikarenakan penelitian Dharmayuni menggunakan objek dan alat analisis yang sama yaitu masyarakat pesisir Cilincing. Oleh karenanya penelitian itu dijadikan sebagai salah satu acuan. Dan penelitian ini merupakan studi lanjutan penelitian Dharmayuni (2007) terhadap pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP).

#### **2.4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)**

Berdasarkan Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) DKP tahun 2006, bahwa Program PEMP secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui:

1. Peningkatan pendapatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM);
2. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
3. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan; dan
4. Penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan.

Secara spesifik tujuan program PEMP adalah sebagai berikut:

1. Program PEMP meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang didampingi dengan pengembangan kegiatan sosial, pelestarian lingkungan, dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong kemandirian masyarakat pesisir.

2. Program PEMP menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir yang terkait dengan sumber daya perikanan dan kelautan.
3. Masyarakat akan mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
4. Program PEMP memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan dalam mendukung pengembangan wilayahnya.
5. Program PEMP mendorong terwujudnya mekanisme manajemen pembangunan yang partisipatif dan transparan dalam kegiatan masyarakat.
6. Program PEMP dapat mengurangi beban masyarakat pesisir yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM melalui peningkatan dan penciptaan usaha produktif secara berkesinambungan.

Sasaran program PEMP adalah masyarakat pesisir skala usaha mikro yang dibagi ke dalam 2 tahapan sasaran, yaitu:

1. Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan/Koperasi lainnya (selanjutnya disebut koperasi) sebagai sasaran antara, dan
2. Sasaran akhir yaitu masyarakat pesisir dengan usaha skala mikro yang berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan serta pengelolaan wisata bahari, yang berlokasi di daerah sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil.

Program PEMP yang dilaksanakan mulai tahun 2001, pada tahun 2009 telah menjangkau 293 kabupaten/kota pesisir di seluruh Indonesia dan telah terbentuk 323 Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3)/Koperasi Perikanan dengan menyentuh sekitar 101.428 KK masyarakat pesisir. Kegiatan ini mendapat respon yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK. 07/KP3K/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PEMP, menjelaskan bahwa kegiatan pokok

program PEMP mencakup LKM, SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan)/SPBN (Stasiun Pengisian BBM untuk Nelayan) dan Kedai Pesisir.

Uraian kegiatan pokok program PEMP adalah sebagai berikut:

a. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

1) Swamitra Mina

Swamitra Mina merupakan salah satu unit usaha milik koperasi yang bergerak di bidang pelayanan permodalan bagi masyarakat pesisir, terutama untuk segmen usaha mikro. Unit usaha ini bermitra dengan Bank Bukopin dengan orientasi pelayanan permodalan berbasis sistem teknologi perbankan yang online. Dengan teknologi ini diharapkan kegiatan usaha keuangan dapat berjalan secara profesional, transparan, dapat dipantau setiap saat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

2) Unit Simpan Pinjam (USP)

USP merupakan unit usaha koperasi yang bergerak di bidang pelayanan permodalan bagi masyarakat pesisir terutama untuk segmen usaha mikro. Operasionalisasinya dikerjasamakan dengan Bank BRI, Bank Papua, dan Bank Maluku.

3) BPR Pesisir

Unit usaha ini juga menangani kegiatan keuangan pada segmen usaha mikro dan kecil. BPR Pesisir merupakan unit usaha yang berstatus Perseroan Terbatas (PT).

4) *Baitul Qiroadl*

*Baitul Qiroadl* merupakan LKM hasil kerjasama koperasi LEPP-M3/koperasi perikanan dengan Bank Syariah Mandiri yang berbasiskan syariah.

b. SPDN/SPBN

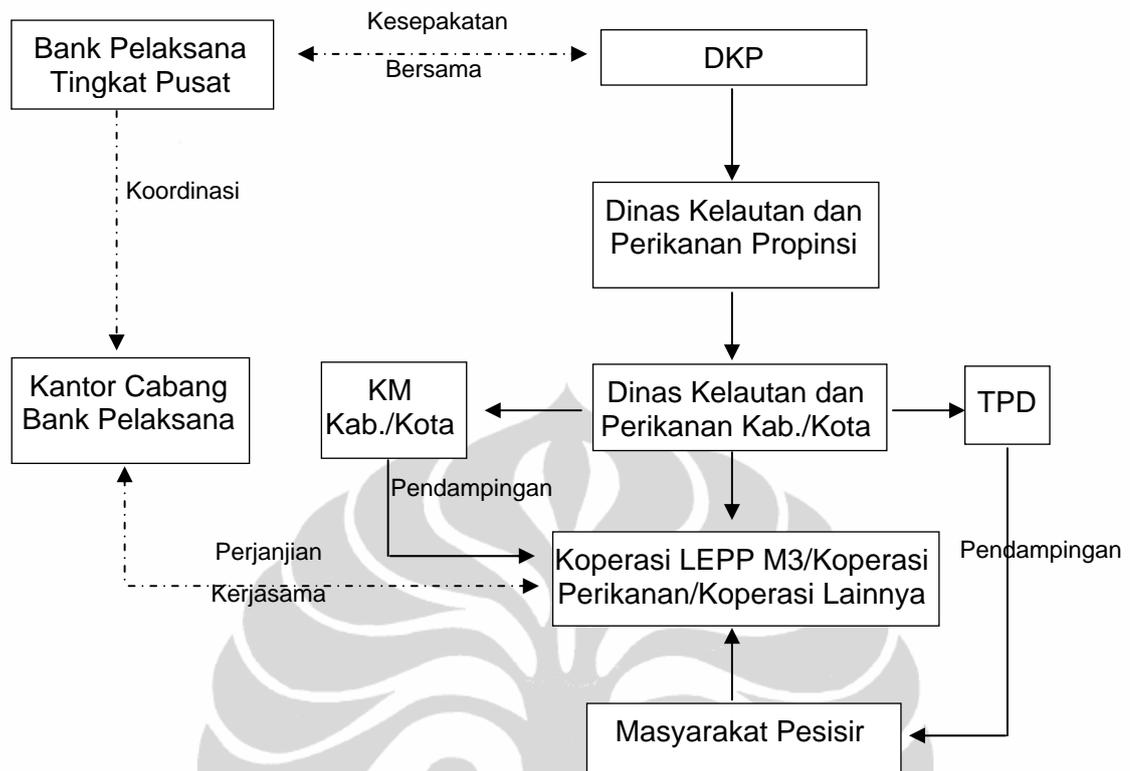
Unit usaha SPDN/SPBN melayani kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) solar/premium bagi masyarakat nelayan/pembudidaya ikan dengan harga subsidi. SPDN/SPBN khusus untuk melayani kapal perikanan yang berukuran kurang dari 30 GT atau setara di bawah 90 PK dan pembudidaya ikan skala kecil.

c. Kedai Pesisir

Kedai Pesisir merupakan unit usaha yang bertujuan untuk melayani kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan usaha bagi masyarakat pesisir dalam bentuk *outlet* dengan sistem swalayan. Kedai Pesisir juga berperan sebagai supplier bagi warung-warung sejenis di sekitarnya. Diharapkan Kedai Pesisir dapat menekan harga sampai pada tingkat sama dengan harga di ibukota kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya program PEMP dikelola oleh pemerintah pusat sebagai penanggungjawab dan pembina program di tingkat nasional, pemerintah daerah sebagai penanggungjawab operasional, Konsultan Manajemen (KM) berfungsi sebagai konsultan secara teknis dan manajemen, Tenaga Pendamping Desa (TPD) merupakan tenaga pendamping yang profesional, Koperasi berfungsi sebagai mitra usaha dan penanggungjawab operasional, dan Bank Pelaksana melakukan pendampingan teknis serta administrasi kepada koperasi dan/atau LKM/USP.

Bagan organisasi pengelola program PEMP 2006 sebagaimana gambar 2.1. berikut ini:



Gambar 2.1. Bagan Organisasi Pengelola Program PEMP 2006.

DEP yang dijadikan sebagai penjaminan tunai (*cash collateral*) dikelola dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) DEP dibukukan pada rekening giro atas nama koperasi untuk kemudian dijadikan jaminan kepada Bank Pelaksana. Bank Pelaksana memberikan kredit kepada koperasi minimal sebesar DEP yang dijamin. Diharapkan, seiring dengan meningkatnya kinerja LKM, Bank Pelaksana dapat menyalurkan kredit yang bersumber dari dana perbankan itu sendiri.
- 2) Kredit dari Bank Pelaksana dibukukan sebagai Modal Tidak Tetap (MTT) pada unit usaha simpan pinjam untuk diteruskan sebagai pinjaman kepada masyarakat pesisir anggota atau calon anggota koperasi.

Penyaluran kredit oleh Bank Pelaksana kepada koperasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

**1) Penggunaan Kredit**

Kredit yang diterima dari Bank Pelaksana kepada koperasi dibukukan sebagai MTT dan dipergunakan untuk disalurkan kepada masyarakat pesisir anggota dan calon anggota sebagai pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pemberian pinjaman di unit usaha simpan pinjam koperasi.

**2) Jangka Waktu Kredit**

- a) Jangka waktu kredit dari Bank Pelaksana kepada koperasi maksimal tiga tahun.
- b) Jangka waktu pinjaman kepada masyarakat pesisir anggota dan calon anggota koperasi disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha yang dibiayai.

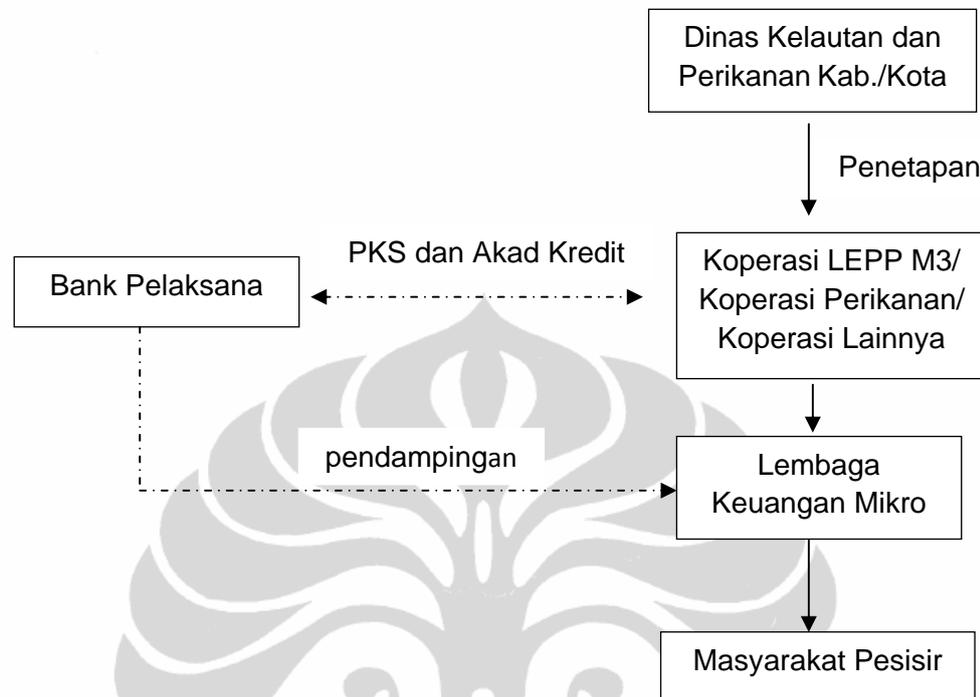
**3) Suku Bunga Kredit**

- a) Tingkat suku bunga pinjaman dari Bank Pelaksana kepada koperasi maksimum sebesar 6% efektif per tahun.
- b) Bunga dan pokok pinjaman dibayar secara rutin setiap bulan. Kewajiban bunga pinjaman selama 6 (enam) bulan pada tahun pertama dicadangkan, sedangkan pokok pinjaman mulai diangsur pada bulan ke tujuh tahun pertama.
- c) Bunga pinjaman yang dibebankan kepada anggota dan calon anggota koperasi maksimal sama dengan suku bunga yang berlaku pada BPR atau Koperasi Simpan Pinjam setempat.

**4) Tidak dikenakan biaya provisi****5) Sanksi**

- a) Apabila koperasi menunggak kewajiban pelunasan kredit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Bank Pelaksana berhak mencairkan DEP atas nama koperasi yang dijadikan sebagai jaminan untuk digunakan sebagai pelunasan kredit.
- b) Apabila koperasi telah menunggak kewajibannya dan Bank Pelaksana telah mencairkan DEP yang dijadikan sebagai jaminan, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi koperasi tersebut untuk tidak mendapatkan alokasi DEP pada Program PEMP tahun berikutnya maupun dana yang bersumber dari Bank Pelaksana atau lainnya.

Bagan mekanisme operasional kegiatan penjaminan tunai (*cash collateral*) sebagaimana gambar 2.2. berikut ini:



Gambar 2.2. Bagan Mekanisme Operasional Kegiatan Penjaminan Tunai (*cash collateral*)

Berdasarkan uraian diatas tentang program PEMP, maka penulisan tesis ini difokuskan pada evaluasi terhadap kegiatan Swamitra Mina, dengan studi kasus Swamitra Mina Pantura Jaya Jakarta Utara dan Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong Bekasi Jawa Barat.

### BAB 3

#### HASIL STUDI LAPANGAN

Berdasarkan hasil studi lapangan di Cilincing dan Muara Gembong, khususnya pada Swamitra Mina Pantura Jaya di Cilincing dan Swamitra Mina Mitra Usaha di Muara Gembong didapatkan hasil sebagai berikut:

#### 3.1. Karakteristik Masyarakat Cilincing Jakarta Utara

##### 3.1.1. Administrasi wilayah

Menurut data statistik Kecamatan Cilincing bulan Oktober 2010, Kecamatan Cilincing terletak di wilayah Kotamadya Jakarta Utara memiliki luas wilayah 4.198,56 ha. Peruntukan luas tanah tersebut terdiri dari perumahan 1.297 ha, industri 1.016 ha, kantor dan gudang 191 ha, pertanian 607 ha, dan lain-lain 1.087,56 ha. Secara administratif terdiri 7 kelurahan, 82 RW, 964 RT, jumlah penduduk 269.054 jiwa dan 71.321 KK, yang diuraikan sebagaimana Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan

No	Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	KK	RW	RT
1	Cilincing	831.50	32,882	12,115	10	133
2	Kalibaru	476.70	45,025	10,190	14	172
3	Sukapura	561.00	53,470	12,307	10	99
4	Rorotan	1,063.70	26,940	8,053	12	136
5	Marunda	791.69	20,155	5,519	9	81
6	Semper Timur	316.00	29,468	9,826	10	97
7	Semper Barat	157.97	61,114	13,311	17	246
Jumlah		4198.56	269,054	71,321	82	964

Sumber: Kecamatan Cilincing (Oktober 2010).

Kelurahan Cilincing adalah salah satu kawasan pemukiman yang padat di Jakarta Utara. Kelurahan Cilincing berbatasan dengan Laut Jawa dan Kelurahan Kalibaru di sebelah Utara, Kelurahan Semper Timur di sebelah Barat, Kali Bencong di sebelah Timur dan Kelurahan Rorotan di sebelah Selatan. Peta Lokasi Kelurahan Cilincing dapat dilihat pada Gambar berikut ini (Wikipedia, 2008).

### 3.1.2. Sejarah perkembangan

Dalam sejarah Jakarta, Cilincing memegang peranan cukup penting, karena disanalah pada tanggal 4 Agustus 1811 pasukan bala tentara Inggris, yang jumlahnya hampir 12.000 orang, mendarat tanpa mendapat perlawanan dari pihak Belanda, yang pada masa itu berada di bawah kekuasaan Perancis. Pendaratan tersebut dilakukan di Pelabuhan Cicincing, Cilincing, Pelabuhan yang sejak ditutupnya pelabuhan ikan Marunda, mulai dimanfaatkan sebagai pangkalan dan tempat berlabuh. Namun hingga saat ini para nelayan tetap menggunakan pelabuhan tersebut sebagai tempat mendaratkan ikan hasil tangkapannya. Berbagai upaya dilakukan untuk memindahkan mereka ke Muara Angke, sebagian sudah pindah dan sebagian kecil masih tetap di Cilincing, yang kegiatannya dinilai tidak sah. Mayoritas penduduk Perkampungan Nelayan Cilincing berasal dari Jawa Barat seperti Indramayu, Cirebon atau Karawang. Bahasa sehari-hari yang biasa mereka gunakan adalah bahasa kresek.

### 3.1.3. Kondisi Geografis wilayah

Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari endapan *pleistocene* yang terdapat pada  $\pm 50$  meter di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan *alluvial*, sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan *alluvium*. Di wilayah bagian utara baru terdapat pada kedalaman 10-25 meter, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal 8-15 meter. Pada bagian tertentu juga terdapat lapisan permukaan tanah yang keras dengan kedalaman 40 meter. Karena batuan hasil pengendapan maka sifat batuan tersebut tidaklah *compact* (padat), tetapi *paremable* (porous), sehingga air tanah terpengaruh oleh air laut.

Keadaan Cilincing umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar  $32,7^{\circ}\text{C}$  -  $34,^{\circ}\text{C}$  pada siang hari, dan suhu udara minimum berkisar  $23,8^{\circ}\text{C}$  -  $25,4^{\circ}\text{C}$  pada malam hari, dengan suhu rata-rata sepanjang tahun  $27^{\circ}\text{C}$  karena terletak di daerah Khatulistiwa, sehingga wilayah Cilincing dipengaruhi oleh angin Muson Timur yang terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober dan Muson Barat sekitar bulan Nopember sampai dengan April. Rata-rata

curah hujan sepanjang tahun 237,96 mm, selama periode 2002-2006 curah hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada tahun 2002 dan tertinggi sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2005, dengan tingkat kelembaban udara mencapai 73,0 - 78,0 persen dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2 m/detik - 2,5 m/detik.

Kelurahan Cilincing memiliki pantai sepanjang 5 Km. PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yaitu kawasan industri terpadu nasional yang memproduksi konveksi dengan beragam perusahaan baik nasional maupun perusahaan penanaman modal asing, menguasai 4 Km pantai tersebut, 1 km sisanya dijadikan Tempat Pelelangan Ikan oleh para nelayan tradisional, tepat di pinggir muara Cakung Drain. Daratan kelurahan ini termasuk sangat rendah, yaitu 0,25 dibawah permukaan laut (Wikipedia, 2008).

Gelombang air pasang atau rob sering melanda kawasan Cilincing, Jakarta Utara, membuat Jalan Raya Cilincing menuju Marunda tergenang. Bahkan, ketinggian air bisa mencapai 50 cm sehingga menyulitkan warga beraktivitas. "Setiap air pasang dan hujan, jalan sudah langganan tergenang. Kami berharap saluran air sepanjang itu diperlebar," kata Novi Zakaria, warga RT 09/04, Cilincing. Warga juga berharap peninggian jalan. "Genangan air juga ada di Jl Cilincing Lama 1. Tidak pernah surut mengakibatkan jalan cepat rusak. Kondisi ini makin parah karena truk dan kontainer pun melintasi jalan tersebut," jelasnya. Ketua RW 04, Giarno HP mengatakan, beberapa kali mengajukan surat pada forum musrenbang tingkat kotamadya. Tapi hingga kini belum ada tindak lanjut. Kasudin Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakut (Irvan Amtha) berjanji tahun 2011 ini akan membuat pintu air "Nantinya air akan dialihkan ke Kali Bangleo. Setiap air pasang datang, pintu air ditutup agar tidak menggenangi jalan," jelasnya.

Cilincing dengan kondisi geografis lautan yang lebih luas dari daratan memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar, yakni berupa sumber daya mineral dan hasil laut. Sumber daya mineral yang dihasilkan, tepatnya di Pulau Pabelokan, Kepulauan Seribu, berupa minyak bumi dan gas mulai dieksploitasi sejak tahun 2000 dengan rata-rata kapasitas produksi sekitar 4 juta barel per tahun. Kekayaan laut yang dapat dieksploitasi berupa ikan konsumsi dan ikan hias. Selama lima tahun terakhir, tiap tahunnya rata-rata produksi ikan konsumsi mencapai 123 ribu ton dan produksi ikan hias mencapai 59,86 juta ekor.

### 3.1.4. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Cilincing pada bulan Oktober tahun 2010 adalah sebanyak 269.054 dengan kepadatan rata-rata 64 jiwa/ha. Jumlah Penduduk Cilincing yang tersebar di 7 kelurahan dengan kepadatan yang berbeda-beda (Tabel 3.2). Penduduk di Kecamatan Cilincing adalah heterogen berasal dari etnis cina dan beberapa suku yaitu jawa, bugis, padang, batak, dan terdapat penduduk yang bersifat sementara (nomaden).

Tabel 3.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Cilincing menurut persebarannya, Oktober 2010.

No.	Kelurahan	Luas (Ha)	Penduduk (Jiwa)								Total	Kepadatan (Jiwa/Ha)
			WNI				WNA					
			Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki		Perempuan			
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Cilincing	831,50	16.600	50,48	16.281	49,51	1	0,003	-	-	32.882	39,55
2	Kalibaru	476,70	21.908	48,66	23.117	51,34	-	-	-	-	45.025	94,45
3	Sukapura	561,00	28.458	53,22	25.001	46,76	6	0,011	5	0,009	53.470	95,31
4	Rorotan	1.063,70	14.524	53,91	12.416	46,09	-	-	-	-	26.940	25,33
5	Marunda	791,69	10.667	52,92	9.488	47,08	-	-	-	-	20.155	25,46
6	Semper Timur	316,00	15.412	52,30	14.055	47,70	1	0,003	-	-	29.468	93,25
7	Semper Barat	157,97	29.518	48,30	31.594	51,70	1	0,002	1	0,002	61.114	386,87
Jumlah Total		4.198,56	137.087	50,95	131.952	49,04	9,00	0,003	6,00	0,002	269.054	64,08

Sumber : Diolah dari Data Monografi Kecamatan Cilincing, Tahun 2010.

Perbandingan laki-laki dan perempuan relatif berimbang dengan komposisi presentase jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 50,95% dan 49,04% dan terdapat WNA sebesar 0,005%. Komposisi perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan tidak dapat menunjukkan bahwa tingkat rasio kelahiran penduduk laki-laki relatif lebih tinggi dari penduduk perempuan atau rasio tingkat kematian penduduk laki-laki lebih rendah dari penduduk perempuan. Namun, faktor lain yang dapat diduga turut mempengaruhi komposisi penduduk tersebut adalah banyaknya penduduk laki-laki dari luar daerah yang datang ke Cilincing untuk mencari nafkah (nomaden). Sedangkan, kecenderungan perempuan mencari pekerjaan di luar Cilincing. Faktor dominan yang mempengaruhi penambahan jumlah penduduk adalah

turunnya angka kematian bayi disamping migrasi dalam jumlah yang cukup besar karena pengaruh daya tarik Kota Jakarta sebagai pusat administrasi pemerintahan, ekonomi, keuangan, dan bisnis.

### **3.1.5. Kondisi sarana dan prasarana**

Koperasi LEPP - M3 Pantura Jaya berada di Jl. Kalibaru Barat III No. 8 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara berdekatan dengan pool truk (Container) CV Gerak Cepat, Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Tanjung Priok. Sarana dan prasarana (jalan dan jembatan) yang ada sudah memadai dan dipergunakan secara optimal oleh masyarakat Cilincing.

Terdapat pasar ikan kering yang terletak di Kalibaru, pasar ikan basah dan pasar sayur-sayuran yaitu di Pasar Jongkok Berkah di Kelurahan Semper Timur, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kalibaru di Kelurahan Kalibaru dan Cilincing. Ikan kering yang dijual di pasar ikan kering Kalibaru berasal dari Muara Baru, Muara Angke. Demikian pula ikan basah yang dijual di pasar Jongkok Berkah berasal dari Kalibaru dan Cilincing. TPI Kalibaru saat ini sudah tidak operasional karena sebagian besar nelayan tidak melaut dan tidak mendaratkan hasil tangkapannya ke TPI tersebut. TPI Cilincing masih operasional, dan pembeli tidak hanya berasal dari Kecamatan Cilincing saja tetapi banyak pembeli dari luar Cilincing bahkan ada yang datang dari luar Jakarta.

Ada tempat pembuangan sampah yang kemudian diangkut oleh truk sampah milik pemda selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), namun para pengolah hasil perikanan tradisional yang tinggal di Kelurahan Kalibaru dan sekitarnya membuang limbahnya langsung ke laut tanpa diolah terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan pantai utara jawa (pantura) tercemar oleh limbah-limbah tersebut.

Rumah warga dengan mata pencaharian pedagang, dindingnya terbuat dari tembok dan berlantai keramik, rumah tersebut sudah dilengkapi dengan listrik dan WC. Tetapi untuk warga yang bermata pencaharian nelayan dan pengolah, rumahnya adalah rumah panggung dengan dinding dan lantai dari kayu, hanya ada kamar mandi dan WC menggunakan WC umum. Sedangkan warga yang bermata pencaharian pembudidaya rumahnya jauh dari lahan tambaknya, dindingnya terbuat dari tembok dan berlantai keramik, serta sudah dilengkapi dengan listrik

dan WC, mereka mempunyai rumah kedua ditengah-tengah tambak, untuk beristirahat dan juga dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Sebagian besar warga sudah menggunakan air bersih dari PDAM, selain itu juga terdapat sumur-sumur yang masih mengeluarkan air dan masih dimanfaatkan warga sekitar.

Puskesmas dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Cilincing untuk berobat dan memeriksakan kesehatannya. Selain ke puskesmas, untuk ibu-ibu hamil memeriksakan kandungannya ke bidan. Untuk kondisi penyakit yang cukup berat biasanya masyarakat ke Rumah Sakit Umum Koja dan Rumah Sakit BPP yang letaknya cukup jauh dari Kecamatan Cilincing.

Sekolah SD, SLTP dan SLTA tersebar di kecamatan Cilincing, bahkan terdapat sekolah STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) Jakarta dan STIP Djadayat yang terletak di Marunda. Siswa yang bersekolah di lokasi Cilincing ini untuk umum sehingga banyak siswa yang bersekolah pada sekolah-sekolah tersebut berdomisili di luar kecamatan Cilincing.

### **3.1.6. Kelembagaan**

Kelembagaan yang ada di Kecamatan Cilincing dan Lembaga-lembaga yang mendukung masyarakat Cilincing terhadap kegiatan program PEMP di Cilincing adalah sebagai berikut:

1. KKP, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat berperan dalam pelaksanaan program PEMP karena KKP merupakan pembina tingkat nasional.
2. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Suku Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan (P2K) Jakarta Utara berperan sebagai pembina teknis dan manajemen usaha terhadap pelaksanaan program PEMP yang memberikan rekomendasi penerima pinjaman sesuai dengan bidang usahanya.
3. Pemerintah Kecamatan, yaitu Kecamatan Cilincing berperan dalam pembinaan kependudukan.
4. Pemerintah Kelurahan, di Kecamatan Cilincing terdapat 7 kelurahan yang berperan dalam pembinaan kependudukan.
5. RT/RW, mempunyai peran yang sangat besar terhadap kerukunan antar warga dan tetangga di Kecamatan Cilincing.

6. Koperasi LEPP-M3, merupakan lembaga yang sudah berbadan hukum koperasi. Koperasi berfungsi sebagai mitra usaha dan penanggungjawab operasional pelaksanaan program PEMP, dalam hal ini Swamitra Mina Pantura Jaya.
7. Bank Bukopin, sebagai Bank Pelaksana berperan melakukan pendampingan teknis serta administrasi kepada koperasi dan/atau LKM/USP.
8. Puskesmas sangat berperan dalam menangani kesehatan masyarakat Cilincing.
9. Masjid/Musolah, sangat berperan sebagai tempat ibadah sebagian besar masyarakat Cilincing khususnya dan masyarakat sekitar Cilincing pada umumnya.
10. Sekolah-sekolah, baik SD, SLTP dan SLTA bahkan STIP, sangatlah berperan dalam meningkatkan pendidikan sebagian besar masyarakat Cilincing, bahkan ada siswa yang tinggalnya di luar dari kecamatan Cilincing.
11. TPI adalah tempat pelelangan ikan yang berperan sebagai tempat pemasaran hasil tangkapan ikan para nelayan dari laut.
12. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli, pasar sangat berperan dalam pemasaran ikan, baik ikan basah hasil penangkapan ikan para nelayan maupun ikan kering hasil pengolahan para pengolah hasil perikanan.
13. Rentenir/Bank keliling, hanyalah penduduk biasa yang berprofesi sebagai tempat meminjam uang bagi masyarakat Cilincing yang membutuhkannya, dengan bunga yang besar yaitu lebih dari 100%, dengan jangka waktu pengembalian selama 25 hari. Sebagai contoh jumlah pinjaman, cicilan pinjaman dan kewajiban yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

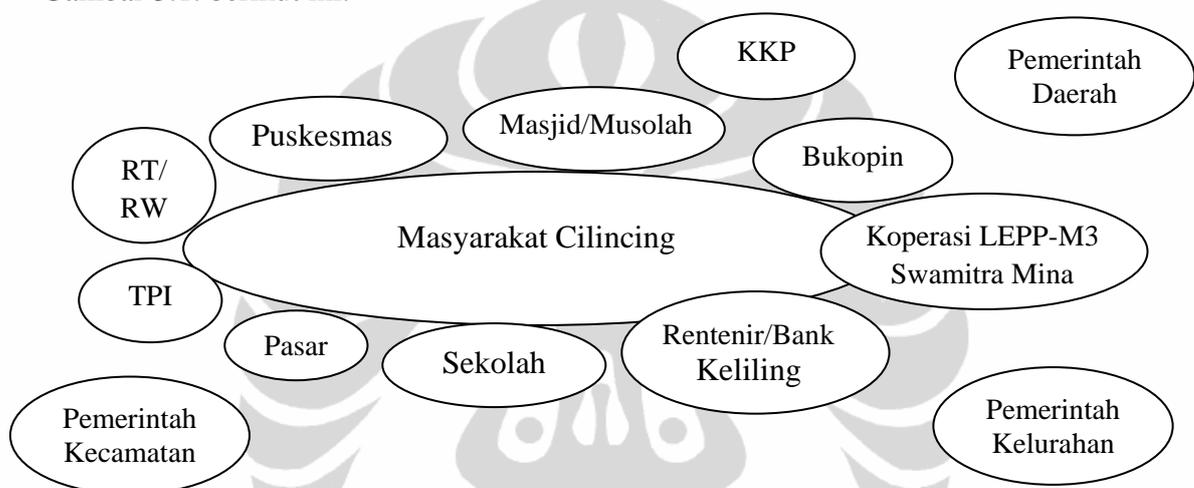
Tabel 3.3. Pinjaman kepada Rentenir.

No.	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Jumlah Cicilan perhari (Rp.)	Kewajiban yang harus dibayar (Rp.)
1.	100.000,-	10.000,-	250.000,-
2.	250.000,-	25.000,-	625.000,-
3.	500.000,-	50.000,-	1.250.000,-
4.	1.000.000,-	100.000,-	2.500.000,-

Sumber: Masyarakat Cilincing.

Bunga yang ditetapkan para rentenir maupun bank keliling sangatlah besar, lebih dari 100%, hal ini sangat memberatkan para peminjam khususnya para nelayan penangkap ikan, namun tidak dapat dipungkiri keberadaannya masih dibutuhkan masyarakat karena proses peminjamannya mudah tidak membutuhkan agunan, sehingga masih banyak masyarakat yang lebih memilih meminjam ke rentenir dan bank keliling daripada ke koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina.

Diagram venn kelembagaan masyarakat Cilincing dapat dilihat pada Gambar 3.1. berikut ini.



Gambar 3.1. Diagram Venn Kelembagaan Masyarakat Cilincing

Mayoritas masyarakat Cilincing memeluk agama Islam, masjid dan musolah menjadi bagian dalam hidupnya, seperti pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak dan ceramah di masjid. Institusi yang berperan dalam wilayah ini secara umum adalah RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Daerah, KKP, TPI, Puskesmas dan Sekolah. Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Pantura Jaya dan Bukopin yang merupakan institusi eksternal yang lama kelamaan dapat diterima keberadaan oleh masyarakat Cilincing karena sebagian besar masyarakat Cilincing sudah menyadari bahwa kegiatan swamitra mina merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan dan menanggulangi kemiskinan. Mereka mendapatkan keuntungan dan dapat memperluas usahanya sehingga meningkat pendapatannya setelah menjadi anggota koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina.

Masyarakat Cilincing hidup secara berdampingan dan saling tolong menolong. Hal ini terlihat dari kerjasama dalam melakukan kegiatan pengolahan hasil perikanan, tenaga kerja yang digunakan adalah para tetangga dekat rumah. Selain itu juga apabila ada yang sakit, maka tetangga sekitar akan membantu. Ketua RT dan RW sangat berperan dalam membina hubungan baik antar warga masyarakat pesisir. Keberadaan rentenir ataupun bank keliling merupakan ancaman perekonomian masyarakat Cilincing, namun sebagian masyarakat pesisir yang merasa terdesak sangat membutuhkan bantuan dari para rentenir dan bank keliling tersebut.

### **3.1.7. Mata Pencaharian Masyarakat**

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat Cilincing. Perikanan yang dikelola adalah perikanan tangkap dan budidaya (tambak) dengan komoditi unggulan dan umumnya ditangkap/ditanam masing-masing berupa udang windu, udang putih dan bandeng. Sedang pengolahan hasil perikanan diolah dalam bentuk ikan asin dengan berbagai jenis, misalnya ikan hiu, ikan kapas, udang yang dikeringkan, kembung dan lain sebagainya.

Penduduk di Kecamatan Cilincing secara umum tergolong masyarakat yang aktif bekerja. Hal ini terlihat dari keaktifan dalam hal mencari nafkah, tidak hanya kaum laki-laki saja, akan tetapi kaum perempuan pun ikut andil. Bahkan, para remaja juga ikut membantu para orang tua dalam mengerjakan pekerjaan mereka.

Tabel 3.4. Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kecamatan Cilincing, per Oktober 2010

No.	Kelurahan	Balita	Usia Sekolah	Usia Kerja	Manula	Jumlah
1	Cilincing	3.739	11.305	15.452	2.283	32.779
2	Kalibaru	5.087	13.594	22.070	4.274	45.025
3	Sukapura	5.134	12.407	27.608	8.321	53.470
4	Rorotan	1.594	2.548	22.469	329	26.940
5	Marunda	2.787	4.738	10.749	1.881	20.155
6	Semper Timur	1.956	5.893	16.876	4.740	29.465
7	Semper Barat	2.906	15.764	37.473	4.975	61.118
	Jumlah	23.203	66.249	152.697	26.803	268.952

Sumber : Data Olahan Kecamatan Cilincing Oktober 2010. (catatan : balita 0-5 th, Usia Sekolah 6-15 th, Usia Kerja 16-59 th, Manula 60 th keatas)

Menurut data Kecamatan Cilincing berdasarkan tabel 3.4 angka beban ketergantungan mencapai 131,34 yang berarti bahwa setiap 100 Orang usia produktif menanggung beban sebanyak 131 orang penduduk non produktif. Namun berdasarkan hasil wawancara konsultan manajemen dengan beberapa calon sasaran masyarakat pemanfaat, umumnya penduduk yang masih golongan usia sekolah sudah ikut membantu orang tuanya. Ada yang masih melanjutkan sekolah dan adapula yang putus sekolah.

Menurut data Kecamatan Cilincing per Oktober 2010, rata-rata pengeluaran rumah tangga Rp. 155.345/bulan. Angka pengeluaran rumah tangga tersebut dapat dibenarkan dengan mengasumsikan angka beban ketergantungan yang mencapai 131 orang. Sehingga diperlukan diversifikasi jenis usaha, yang bila dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan potensi sumber daya yang ada, maka jenis usaha yang selama ini diandalkan adalah di bidang pertanian dan perikanan. Berdasarkan data yang ada tercatat jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya, jenis usaha perikanan budidaya dan pertanian lebih dominan dari jenis usaha lainnya. Jumlah dan persentasi masyarakat sasaran menurut tingkat jenis usaha dapat dilihat pada tabel 3.5.

**Tabel. 3.5. Jumlah dan Persentasi Masyarakat Sasaran Menurut Tingkat Jenis Usaha per Oktober Tahun 2010**

No	Kelurahan	Petani Tambak		Karyawan Swasta/PNS/A BRI		Pedagang		Nelayan		Buruh Tani		Lain-lain	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Cilincing	-	0,00	7.175	21,82	3.230	9,82	3.194	9,71	1.356	4,12	17.926	54,52
2	Kalibaru	-	0,00	425	0,94	4.285	9,50	17.558	38,92	4.609	10,22	18.231	40,42
3	Sukapura	495	3,23	5.320	34,76	2.907	18,99	-	0,00	554	3,62	6.029	39,39
4	Rorotan	730	2,81	7.943	30,62	4.321	16,66	11	0,04	676	2,61	12.260	47,26
5	Marunda	3.499	17,36	8.758	43,45	2.354	11,68	523	2,59	660	3,27	4.361	21,64
6	Semper Timur	107	0,61	8.831	50,25	5.133	29,21	-	0,00	723	4,11	2.780	15,82
7	Semper Barat	53	0,26	3.372	16,47	10.178	49,72	5	0,02	-	0,00	6.864	33,53
	Jumlah	4.884	2,75	41.824	23,57	32.408	18,26	21.291	12,00	8.578	4,83	68.451	38,58

Sumber : Diolah dari Data Monografi Kecamatan Cilincing, per Oktober Tahun 2010

Terdapat enam jenis usaha yang menjadi andalan masyarakat Kecamatan Cilincing yaitu tani, karyawan, pedagang, nelayan tangkap (termasuk pengolahan), buruh tani dan tukang. Di Kelurahan Kalibaru jenis usaha yang paling dominan adalah nelayan tangkap sebesar 38,92%. Data monografi ini dapat dibenarkan dengan membandingkan data yang sama dari Swamitra Mina Koperasi LEPP M3 Mina Mitra Usaha. Dari 222 orang yang mendapatkan pinjaman dari Swamitra Mina 104 orang (46,85%) adalah pelaku usaha jenis usaha perikanan tambak diikuti Pedagang Hasil Perikanan yang mencapai 77 orang (34,68%) dan perikanan tangkap (nelayan) 41 orang (18,47%).

Laut menjadi rumah kedua, sekaligus sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Cilincing, sehingga laut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mereka. Manakala laut tengah mengamuk, mereka tiada daya. Perekonomian di Perkampungan Nelayan Cilincing mengandalkan hasil laut, 85 % penduduknya berprofesi nelayan, sisanya adalah pedagang, pengumpul besi bekas dan bekerja di tempat lain. Jika melihat keadaan perkampungan yang padat dan terkesan kumuh ini, orang menebak strata ekonomi mereka dari kelas bawah. Tetapi, banyak juga juragan-juragan yang tinggal di perkampungan ini. Para juragan ini

umumnya mempunyai lebih dari satu perahu dan kerjanya mengumpulkan hasil tangkapan nelayan suruhannya untuk dijual kembali ke pasar atau pelelangan ikan.

Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun 2005 dan 2008 yang akumulatifnya bisa mencapai 150% membuat nelayan Cilincing mengalami kesulitan untuk mencari nafkah ke laut. Menurut keterangan sejumlah warga, hampir 75 % nelayan di kawasan itu tidak bisa melaut akibat dari kenaikan harga BBM. Menurut berita Antara (2008), Nelayan Cilincing yang berjumlah sekitar 1.700 nelayan kini didera kekurangan solar sebanyak 49 ton per hari untuk dapat melaut, sedangkan pasokan PT. Pertamina (Persero) ke stasiun pengisian solar nelayan (SPDN) hanya mencapai 16 ton per bulan. Untuk sekali melaut, seorang nelayan membutuhkan 30 liter solar dengan harga Rp. 4.300,- per liter. Nelayan kecil seperti ini harus menyediakan uang Rp. 129.000,- ditambah uang makan dan rokok, setidaknya mereka harus mempunyai uang seratus lima puluh ribu untuk sekali melaut. Dengan modal jaring seadanya, terkadang mereka hanya membawa seember atau dua ember ikan untuk dibawa pulang. Jika sedang beruntung, ia bisa dapat seember 'blekutek', sejenis cumi kecil yang harganya lumayan. Nelayan Cilincing umumnya tidak menjual ikan di tempat pelelangan ikan yang terdapat di situ. Tetapi, langsung menjual ke pengumpul ikan atau menjualnya ke Muara Angke.

Kelangkaan BBM untuk nelayan membuat harga BBM berlipat. Hal ini membuat nelayan tak berdaya karena harga ikan hasil tangkapannya tak bisa mengimbangi harga BBM. Pendapatan nelayan Cilincing mulai menurun akibat kurangnya bahan bakar yang membuat nelayan tidak dapat lebih jauh melaut. Selain itu nelayan lebih memilih tidak membeli solar di stasiun pengisian solar untuk nelayan (SPDN) karena mereka tidak mampu membayar dimuka, mereka harus melaut dahulu baru hasilnya untuk membayar BBM. Menurut Akmad (Ketua Koperasi Nelayan Mina Perdana Samudera), ratusan nelayan sudah berpindah dari Cilincing ke daerah Jawa Barat, mulai dari Karawang, Indramayu, hingga Cirebon. Nelayan Cilincing berpindah memilih lokasi yang lebih mudah mendapatkan solar.

Nelayan Cilincing mengeluh penangkapan ikan saat ini mulai berkurang karena pantai Jakarta terus dicemari limbah yang mengakibatkan rusaknya pertumbuhan ikan. Pencemaran air laut itu bersumber dari air sungai yang mengalir ke Jakarta Utara dan pembuangan limbah rumah tangga dan limbah hasil pengolahan ikan kering ke laut Jawa. Hal itu membuat ikan terus berkurang. Dengan begitu, penghasilan tiap harinya mengalami penurunan. Untuk mengatasi hal tersebut Kasudin Perikanan, Peternakan dan Kelautan (P2K) Jakarta Utara, mengimbau kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta agar memiliki Instalasi Penampungan Air Limbah (IPAL). Karena dengan memiliki IPAL yang memenuhi persyaratan, tidak mungkin air limbah bekas produksinya dialirkan begitu saja ke sungai.

Kehidupan di Perkampungan Nelayan Cilincing tampak muram. Para nelayan duduk-duduk saja sembari ngobrol di perahu mereka. Keadaan ini sudah berlangsung beberapa bulan dan akan terus berlanjut sampai cuaca membaik. Para nelayan bergantung pada cuaca. Jika cuaca bagus mereka akan melaut. Jika buruk, terpaksa mereka tinggal di rumah dan tidak ada pemasukan. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka mengutang di warung. Perkampungan nelayan ini tergolong daerah kumuh. Selain didiami oleh nelayan, banyak juga pemulung yang tinggal disini. Beberapa warga yang bukan nelayan biasanya membuka warung di pinggir jalan. Warung-warung itulah yang menjadi andalan mengutang saat para nelayan yang tidak melaut. Tidak hanya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pedagang/bakul hasil perikanan terkena dampak dari cuaca buruk dan degradasi lingkungan, membuat usaha mereka gagal dan bangkrut, sehingga mereka tidak mempunyai penghasilan.

### **3.1.8. Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Cilincing masih tergolong rendah, 15,12% adalah tidak bersekolah dan 19,13% tidak tamat SD. Sedangkan untuk lulusan Perguruan Tinggi mencapai 6,49% dari total masyarakat yang sudah mengenyam pendidikan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap jenis pekerjaan masyarakat Cilincing, dengan tingkat pendidikan yang rendah mereka tidak punya pilihan untuk bisa bekerja selain menjadi nelayan ataupun pedagang ikan yang merupakan pekerjaan turun temurun dari orang tuanya. Lagipula untuk

menjadi nelayan atau yang lainnya tidak membutuhkan keahlian dan pendidikan yang tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa yang terjadi pada masyarakat pesisir adalah kondisi kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu (Nikijuluw, 2001). Data jumlah dan persentasi masyarakat sasaran menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Jumlah dan Persentasi Masyarakat Sasaran Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Kelurahan	Tidak Sekolah		Tidak Tamat SD		SD		SLTP		SLTA		D3/S1	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Cilincing	3.321	10,10	3.213	9,77	9.546	29,03	8.271	25,16	6.386	19,42	2.143	6,52
2	Kalibaru	7.825	19,43	13.068	32,45	12.233	30,37	375	0,93	4.859	12,06	1.917	4,76
3	Sukapura	1.194	7,73	3.038	19,67	3.645	23,60	3.086	19,98	3.177	20,57	1.302	8,43
4	Rorotan	6.865	25,51	5.251	19,51	4.790	17,80	4.477	16,63	3.136	11,65	2.395	8,90
5	Marunda	5.239	25,99	5.039	25,00	3.207	15,91	2.957	14,67	3.252	16,13	461	2,29
6	Semper Timur	3.604	12,36	7.478	25,65	4.691	16,09	5.889	20,20	5.233	17,95	2.259	7,75
7	Semper Barat	5.099	9,37	4.847	8,91	10.710	19,68	14.985	27,54	15.012	27,59	3.754	6,90
	Jumlah	33.147	15,12	41.934	19,13	48.822	22,27	40.040	18,26	41.055	18,73	14.231	6,49

Sumber : Diolah dari Data Monografi Kecamatan Cilincing, per Oktober Tahun 2010

### 3.1.9. Status Kepemilikan Tanah

Status kepemilikan tanah seluruh warga Cilincing baik untuk rumah tinggal maupun lahan untuk usaha adalah tanah garapan milik negara yang setiap saat bisa digusur oleh pemerintah setempat. Untuk lahan tambak adalah milik TNI Angkatan Laut.

### 3.1.10. Kalender Musim

Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa, sehingga wilayah Cilincing dipengaruhi oleh angin Muson Timur yang terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober dan Muson Barat sekitar bulan Nopember sampai dengan April. Perekonomian masyarakat Cilincing mengandalkan hasil laut, sebagian besar

kegiatannya seperti nelayan tangkap, pengolah hasil perikanan dan pembudidaya ikan sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca yang ada, terutama nelayan tangkap, jika cuaca bagus mereka akan melaut, dan jika cuacanya sangat buruk maka para nelayan tidak dapat melaut, mereka terpaksa tinggal dirumah dan tidak ada pemasukan. Keadaan ini sudah berlangsung beberapa bulan dan akan terus berlanjut sampai cuaca membaik. Hal ini juga mempengaruhi kegiatan pengolahan hasil perikanan karena mereka sangat tergantung dari hasil tangkapan para nelayan, apabila nelayan tidak melaut maka usaha pengolahannya tidak mendapatkan bahan baku.

Untuk kegiatan pembudidayaan adalah budidaya udang selama 3 bulan, kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh cuaca. Apabila cuaca baik sepanjang tahun, maka akan panen 3 kali dalam setahun dengan hasil yang baik, tetapi apabila terjadi cuaca yang tidak menentu seperti yang terjadi saat ini maka diperkirakan panen akan gagal, karena udang sangat sensitif terhadap penyakit dan udang-udang yang mati tidak dapat diperkirakan jumlahnya karena tidak terlihat. Sedangkan untuk kegiatan pembudidaya ikan bandeng, kegiatan pembudidayaannya dilaksanakan selama 6 bulan. Apabila cuaca buruk menyebabkan kualitas air tambak menjadi buruk dan menyebabkan gagal panen, bandeng-bandeng yang mati akan mengambang sehingga dapat diperkirakan kegagalannya.

Untuk kegiatan perdagangan tidak mengenal musim, misalnya perdagangan sembako dan sayur mayur, tetapi untuk perdagangan ikan asin akan terpengaruh karena tergantung oleh kegiatan pengolahan hasil perikanan. Pada masa-masa peceklik inilah keberadaan koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempertahankan usaha dan menyambung hidup.

### **3.1.11. Penggunaan Waktu Sehari**

Penggunaan waktu sehari masyarakat Cilincing hampir memiliki kesamaan antara satu dan lainnya, walaupun mereka terdiri dari berbagai kegiatan yaitu nelayan, pengolah hasil perikanan, pembudidaya ikan, pedagang ikan kering, pedagang ikan basah dan kegiatan lainnya. Penggunaan waktu sehari masyarakat Cilincing adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Penggunaan Waktu Sehari Masyarakat Cilincing

Pukul	Kegiatan (Bidang Usaha)			
	Nelayan	Pengolah	Pembudidaya	Pedagang
05.00-06.00	Kembali ke darat, bongkar ikan di TPI, dan sholat.	Melakukan kegiatan rumah, sholat	Melakukan kegiatan rumah, sholat	Melakukan kegiatan rumah, sholat
06.00-12.00	Istirahat di rumah (tidur)	Melakukan pengolahan hasil perikanan	Melakukan kegiatan di tambak	Berdagang di pasar
12.00-13.00	Sholat, makan siang dan istirahat (tidur)	Istirahat, sholat dan makan siang	Istirahat, sholat dan makan siang	Istirahat, sholat dan makan siang
13.00-18.00	Sholat, makan siang dan istirahat (tidur)	Melakukan pengolahan hasil perikanan	Melakukan kegiatan di tambak	Berdagang di pasar
18.00-21.00	Sholat kemudian melakukan operasi penangkapan ikan di laut	Melakukan kegiatan rumah, istirahat, sholat, nonton TV	Melakukan kegiatan rumah, istirahat, sholat, nonton TV	Melakukan kegiatan rumah, istirahat, sholat, nonton TV
21.00-05.00	Melakukan operasi penangkapan ikan di laut	Istirahat di rumah (tidur)	Istirahat di rumah (tidur)	Istirahat di rumah (tidur)

### 3.2. Karakteristik Masyarakat Muara Gembong Jawa Barat

#### 3.2.1. Administrasi wilayah

Menurut data statistik Kecamatan Muara Gembong bulan Mei 2010, Kecamatan Muara Gembong terletak di Bekasi Jawa Barat memiliki luas wilayah 15.047 ha. Peruntukan luas tanah tersebut terdiri pengelolaan lahan untuk tambak yang mencapai 9.252 Ha dan lain-lain 4.757 ha. Secara administratif terdiri 6 Desa, 39 RW, 105 RT, 18 Dusun, jumlah penduduk 36.136 jiwa dan 8.424 KK, yang diuraikan sebagaimana Tabel 3.8. berikut ini.

Tabel. 3.8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa

No	Desa	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	KK	RW	RT
1	Pantai Sederhana	1.244	3.891	921	5	10
2	Pantai Bahagia	2.513	6.902	1.219	8	24
3	Pantai Bakti	3.410	6.040	1.519	6	18
4	Pantai Mekar	1.457	6.271	1.867	7	21
5	Pantai Harapan Jaya	4.672	6.331	1.392	6	18
6	Jaya Sakti	1.751	6.701	1.506	7	14
Jumlah Total		15.047	36.136	8.424	39	105

Sumber: Kecamatan Muara Gembong, 2010.

Secara administrasi, di sebelah utara Kecamatan Muara Gembong berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur dengan Kabupaten Karawang, di sebelah selatan dengan Kecamatan Cabang Bungin, Kecamatan Tambelang dan Kecamatan Babelan, sedangkan di sebelah barat dengan Laut Jawa.

### 3.2.2. Sejarah perkembangan

Kecamatan Muara Gembong adalah salah satu kecamatan dari 23 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat yang terbentuk menjadi Kecamatan definitif sejak tahun 1982 yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Cabang Bungin. Pada saat menjadi bagian dalam kecamatan Cabang Bungin (Kemantren Muara Gembong), awalnya Kemantren Muara Gembong terdiri dari 2 desa yaitu Desa Pantai Bakti dan Desa Pantai Sederhana dan pada tahun 1982 terbentuk Kecamatan Muara Gembong dengan tambahan Desa yaitu, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Mekar, dan Desa Pantai Harapan Jaya. Pada Tahun 2002 ditambah 1 Desa yaitu Desa Jaya Sakti. Dengan jumlah penduduk 35.611 jiwa terdiri dari jumlah 105 Rukun Tetangga dan 39 Rukun Warga, 8.424 Kepala Keluarga dan 18 Dusun.

Dari Enam desa ini secara tata letak berdekatan, lima desa yakni Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Bakti, Desa Pantai Mekar dan Desa Pantai Harapan Jaya berada di sekitar pantai dan dialiri muara sungai. Wilayahnya yang berada diantara pertemuan Laut Jawa dengan sungai Citarum menjadikan wilayah ini berlumpur. Hal ini dapat di lihat dari pengelolaan lahan untuk tambak yang mencapai 9.252 Ha dari luas total 14.009 Ha. Sedangkan Desa Jaya Sakti lebih terisolasi dari garis pantai namun dialiri aliran sungai.

### **3.2.3. Kondisi Geografis wilayah**

Topografi Kecamatan ini pada umumnya adalah dataran dengan *evaluation* 0-5 derajat dengan ketinggian dari permukaan laut  $\pm 0,74$  meter. Curah hujan mencapai 1.695 mm/tahun dan suhu udara rata-rata berkisar antara 18-32<sup>0</sup>C. Wilayah Kecamatan Muara Gembong berada diantara pertemuan Laut Jawa dengan sungai Citarum sehingga menjadikan wilayah ini berlumpur.

Keadaan Muara Gembong umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar 32<sup>0</sup>C-34<sup>0</sup>C pada siang hari, dan suhu udara minimum berkisar 23<sup>0</sup>C -25<sup>0</sup>C pada malam hari, dengan suhu rata-rata sepanjang tahun 27<sup>0</sup>C karena terletak di daerah Khatulistiwa, sehingga wilayah Muara Gembong dipengaruhi oleh angin Muson Timur yang terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober dan Muson Barat sekitar bulan Nopember sampai dengan April. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 237,96 mm, selama periode 2002-2006 curah hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada tahun 2002 dan tertinggi sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2005, dengan tingkat kelembaban udara mencapai 73,0 - 78,0% dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2 m/detik - 2,5 m/detik.

Gelombang air pasang atau rob sering melanda kawasan Muara Gembong, membuat jalan menuju Muara Gembong tergenang. Bahkan, ketinggian air bisa mencapai 75 cm sehingga menyulitkan warga beraktivitas. Muara Gembong dengan kondisi geografis lautan yang lebih luas dari daratan memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar. Kekayaan laut yang dapat dieksploitasi berupa ikan konsumsi. Selama lima tahun terakhir, tiap tahunnya rata-rata produksi ikan konsumsi mencapai 135 ribu ton.

### 3.2.4. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Muara Gembong pada Mei tahun 2010 adalah sebanyak 36.138 dengan kepadatan rata-rata 3 jiwa/ha. Jumlah Penduduk Muara Gembong yang tersebar di enam Desa dengan kepadatan yang berbeda-beda (Tabel 3.9). Angka jumlah penduduk Kecamatan Muara Gembong berdasarkan data olahan Monografi Desa terdapat selisih dengan data BPS yaitu 36.109 jiwa. Selisih data ini tidak signifikan dan diduga karena keluar masuknya penduduk atau waktu pengambilan data berbeda. Selain itu, penduduk di Kecamatan Muara Gembong adalah heterogen dari berbagai etnis dan terdapat penduduk yang bersifat sementara (nomaden).

Tabel 3.9. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Muara Gembong menurut persebarannya, Tahun 2010.

No.	Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Penduduk (Jiwa)				Total	Kepadatan (Jiwa/ha)
			Laki-laki		Perempuan			
			Jumlah	%	Jumlah	%		
1.	Pantai Sederhana	1.244	2.090	53,71	1.801	46,28	3.891	3,13
2.	Pantai Bahagia	2.513	3.492	50,60	3.410	49,40	6.902	2,75
3.	Pantai Bakti	3.410	3.053	50,55	2.987	49,45	6.040	1,77
4.	Pantai Mekar	1.457	3.088	49,26	3.183	50,77	6.269	4,30
5.	Pantai Harapan Jaya	4.672	3.178	50,16	3.153	49,77	6.335	1,36
6.	Jaya Sakti	1.751	3.251	48,51	3.450	51,48	6.701	3,83
Total Rata-rata		14.009	18.152	50,22	17.986	49,77	36.138	2,58

Sumber : Diolah dari Data Monografi Kecamatan Muara Gembong, Tahun 2010.

Perbandingan laki-laki dan perempuan relatif berimbang dengan komposisi presentase jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 50,22% dan 49,77%. Komposisi perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan tidak dapat menunjukkan bahwa tingkat rasio kelahiran penduduk laki-laki relatif lebih tinggi dari penduduk perempuan atau rasio tingkat kematian penduduk laki-laki lebih rendah dari penduduk perempuan. Namun, faktor lain yang dapat diduga turut mempengaruhi komposisi penduduk tersebut adalah banyaknya penduduk laki-laki dari luar daerah yang datang ke Muara Gembong

untuk mencari nafkah (nomaden). Sedangkan, kecenderungan perempuan mencari pekerjaan di luar Muara Gembong.

### **3.2.5. Kondisi sarana dan prasarana**

Jarak tempuh dari Kecamatan Muara Gembong sampai dengan Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi mencapai 79 km sekitar 2,5 jam perjalanan dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Gelombang air pasang dan rob membuat jalan di wilayah Muara Gembong banjir dan rusak. Sarana dan prasarana (jalan dan jembatan) yang rusak tersebut masih dipergunakan oleh masyarakat Muara Gembong dan menghambat aktifitas masyarakat sekitar.

Jumlah sarana dan prasarana sosial meliputi 58 unit, yaitu fasilitas pendidikan yang terdiri 21 SD, 1 SMP, fasilitas kesehatan berupa 1 Puskesmas, 34 Masjid, dan 1 pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan luas 10.000 M<sup>2</sup>. Puskesmas dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat untuk berobat dan memeriksakan kesehatannya. Selain ke puskesmas, untuk ibu-ibu hamil memeriksakan kandungannya ke bidan.

Rumah warga dengan mata pencaharian pedagang, dindingnya terbuat dari tembok dan berlantai keramik, sudah dilengkapi dengan listrik dan WC. Tetapi untuk warga yang bermata pencaharian nelayan dan pengolah, rumahnya adalah rumah panggung dengan dinding dan lantai dari kayu, hanya ada kamar mandi dan WC menggunakan WC umum. Sedangkan warga yang bermata pencaharian pembudidaya rumahnya jauh dari lahan tambaknya, dindingnya terbuat dari tembok dan berlantai keramik, serta sudah dilengkapi dengan WC, mereka mempunyai rumah kedua ditengah-tengah tambak, untuk beristirahat dan juga dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Sebagian besar warga sudah menggunakan air bersih dari PDAM, selain itu juga terdapat sumur-sumur yang masih mengeluarkan air dan masih dimanfaatkan warga sekitar.

### **3.2.6. Kelembagaan**

Kelembagaan yang ada di Kecamatan Muara Gembong dan Lembaga-lembaga yang mendukung masyarakat Muara Gembong terhadap kegiatan program PEMP di Muara Gembong adalah sebagai berikut:

1. KKP, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat berperan dalam pelaksanaan program PEMP karena KKP merupakan pembina tingkat nasional.
2. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Suku Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bekasi berperan sebagai pembina teknis dan manajemen usaha terhadap pelaksanaan program PEMP.
3. Pemerintah Kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Gembong berperan dalam pembinaan kependudukan.
4. Pemerintah Kelurahan, di Kecamatan Muara Gembong terdiri dari 6 desa yang berperan dalam pembinaan kependudukan.
5. RT/RW, mempunyai peran yang sangat besar terhadap kerukunan antar warga dan tetangga di Kecamatan Muara Gembong.
6. Koperasi LEPP-M3, merupakan lembaga yang sudah berbadan hukum koperasi. Koperasi berfungsi sebagai mitra usaha dan penanggungjawab operasional.
7. Bukopin, sebagai Bank Pelaksana melakukan pendampingan teknis serta administrasi kepada koperasi dan/atau LKM/USP.
8. Puskesmas hanya ada 1 dan sangat berperan dalam menangani kesehatan masyarakat Muara Gembong.
9. Terdapat 34 masjid yang sangat berperan sebagai tempat ibadah sebagian besar masyarakat Muara Gembong khususnya dan masyarakat sekitar Muara Gembong pada umumnya.
10. Sekolah-sekolah, Sekolah SD terdapat 21 unit sekolah, dan SMK 1 unit, Sekolah-sekolah tersebut sangat berperan dalam meningkatkan pendidikan sebagian besar masyarakat Muara Gembong.
11. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli, pasar sangat berperan dalam pemasaran ikan, baik ikan basah hasil penangkapan ikan para nelayan maupun ikan kering hasil pengolahan para pengolah hasil perikanan.
12. Rentenir, hanyalah penduduk biasa yang berprofesi sebagai tempat meminjam uang bagi masyarakat Cilincing yang membutuhkannya, dengan bunga yang besar yaitu lebih dari 100%, dengan jangka waktu pengembalian selama 20

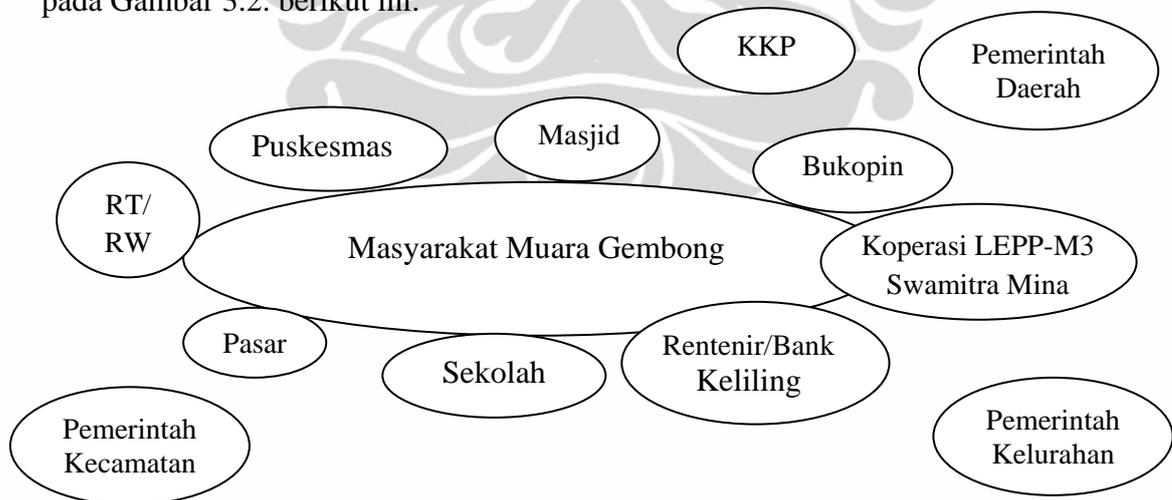
hari. Sebagai contoh jumlah pinjaman, cicilan pinjaman dan kewajiban yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10. Pinjaman kepada Rentenir.

No.	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Jumlah Cicilan perhari (Rp.)	Kewajiban yang harus dibayar (Rp.)
1.	100.000,-	20.000,-	400.000,-
2.	250.000,-	30.000,-	600.000,-
3.	500.000,-	75.000,-	1.500.000,-
4.	1.000.000,-	150.000,-	3.000.000,-

Bunga yang ditetapkan para rentenir sangatlah besar, lebih dari 100%, hal ini sangat memberatkan para peminjam khususnya para nelayan penangkap ikan, namun tidak dapat dipungkiri keberadaannya masih dibutuhkan masyarakat karena proses peminjamannya mudah tidak membutuhkan agunan, sehingga masih banyak masyarakat yang lebih memilih meminjam ke rentenir dan bank keliling daripada ke koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina.

Diagram venn kelembagaan masyarakat Muara Gembong dapat dilihat pada Gambar 3.2. berikut ini.



Gambar 3.2. Diagram Venn Kelembagaan Masyarakat Muara Gembong

Mayoritas masyarakat Muara Gembong memeluk agama Islam, dan melakukan kegiatan keagamaannya di masjid terdekat rumah. Institusi yang berperan dalam wilayah ini secara umum adalah RT, RW, Kelurahan, Kecamatan,

Pemerintah Daerah, KKP, Puskesmas dan Sekolah. Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Mitra Usaha dan Bukopin yang merupakan institusi eksternal dan dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat Muara Gembong. Karena lembaga tersebut membantu masyarakat Muara Gembong dalam hal kebutuhan keuangan.

Masyarakat Muara Gembong hidup secara berdampingan dan saling tolong menolong dalam hal melakukan kegiatan sehari-hari. Hubungan dengan Ketua RT dan RW sangat baik. Keberadaan rentenir ataupun bank keliling merupakan ancaman perekonomian masyarakat Muara Gembong, namun sebagian masyarakat pesisir yang merasa terdesak sangat membutuhkan bantuan dari para rentenir.

### **3.2.7. Mata pencaharian**

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat Muara Gembong. Perikanan yang dikelola adalah perikanan tangkap dan budidaya (tambak) dengan komoditi unggulan dan umumnya ditangkap/ditanam masing-masing berupa rajungan, kepiting, cumi, udang windu, udang putih dan bandeng. Pembesaran ikan di perairan umum meliputi ikan nila, Jambal dan Bawal. Sedang pengolahan hasil perikanan diolah dalam bentuk terasi, ikan asin, kupas kepiting, rajungan dan kerang.

Penduduk di Kecamatan Muara Gembong secara umum tergolong masyarakat yang aktif bekerja. Hal ini terlihat dari keaktifan dalam hal mencari nafkah, tidak hanya kaum laki-laki saja, akan tetapi kaum perempuan pun ikut andil. Bahkan, para remaja juga ikut membantu para orang tua dalam mengerjakan pekerjaan mereka.

Tabel 3.11. Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur BPP Kecamatan Muara Gembong 2010

No	Desa	Balita	Usia Sekolah	Usia Kerja	Manula	Jumlah
1.	Jaya Sakti	1.016	3.285	2.205	195	6.701
2.	Pantai Mekar	989	3.379	1.715	186	6.269
3.	Pantai Bakti	816	2.590	2.434	200	6.040
4.	Pantai bahagia	664	3.347	2.726	165	6.902
5.	Pantai Sederhana	696	1.303	1.689	203	3.891
6.	P. Harapan Jaya	659	3.482	2.046	148	6.335
	Jumlah	4.837	17.386	12.815	1.097	36.135

Sumber : Data Olahan BPP Muaragembong 2010. (catatan : balita 0-5 th, Usia Sekolah 6-15 th, Usia Kerja 15-59 th, Manula 60 th keatas)

Menurut BPP Muara Gembong berdasarkan tabel 3.11 angka beban ketergantungan mencapai 54,95 yang berarti bahwa setiap 100 Orang usia produktif menanggung beban sebanyak 55 orang penduduk non produktif. Namun berdasarkan hasil wawancara konsultan manajemen dengan beberapa calon sasaran masyarakat pemanfaat, umumnya penduduk yang masih golongan usia sekolah sudah ikut membantu orang tuanya. Ada yang masih melanjutkan sekolah dan adapula yang putus sekolah.

Menurut data kecamatan Muara Gembong tahun 2010, rata-rata pengeluaran rumah tangga Rp. 155.345/bulan. Angka pengeluaran rumah tangga tersebut dapat dibenarkan dengan mengasumsikan angka beban ketergantungan yang mencapai 55 orang. Sehingga diperlukan diversifikasi jenis usaha, yang bila dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan potensi sumber daya yang ada, maka jenis usaha yang selama ini diandalkan adalah di bidang pertanian dan perikanan. Berdasarkan data yang ada tercatat jumlah penduduk berdasarkan matapencahariannya, jenis usaha perikanan budidaya dan pertanian lebih dominan dari jenis usaha lainnya. Jumlah dan persentasi masyarakat sasaran menurut tingkat jenis usaha dapat dilihat pada tabel 3.12.

**Tabel. 3.12. Jumlah dan Persentasi Masyarakat Sasaran Menurut Tingkat Jenis Usaha Tahun 2010**

No	Desa/Kelurahan	Penangkapan		Budidaya		Perdagangan		Pertanian	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Pantai Sederhana	50	4,64	580	53,80	400	37,10	48	4,45
2	Pantai Bahagia	1.230	31,23	2.370	60,18	327	8,30	11	0,27
3	Pantai Bakti	300	10,41	743	25,79	500	17,36	100	3,47
4	Pantai Mekar	100	5,57	1.546	86,13	123	6,85	26	1,45
5	Pantai Harapan Jaya	350	11,25	760	24,42	152	4,88	1.850	59,45
6	Jaya Sakti	69	1,67	163	3,96	250	6,07	3.637	88,26
Jumlah		2.099	12,40	5.402	31,92	1.752	10,35	5.672	33,51

*Sumber : Diolah dari Data Monografi Kecamatan Muara Gembong, Tahun 2010*

Terdapat empat jenis usaha yang menjadi andalan masyarakat Kecamatan Muara Gembong yaitu nelayan tangkap (termasuk pengolahan), petambak, pedagang dan pertanian. Di Desa Pantai Mekar, Pantai Bahagia, Pantai Sederhana dan Pantai Bakti jenis usaha yang paling dominan adalah petambak dan nelayan tangkap. Di Desa Pantai Harapan Jaya jenis usaha yang menonjol adalah pertanian, perikanan tangkap dan budidaya. Desa Jaya Sakti berbeda dengan dua desa sebelumnya, jenis usaha yang dominan adalah pertanian dan perdagangan. Data monografi ini dapat dibenarkan dengan membandingkan data yang sama dari Swamitra Mina Koperasi LEPP M3 Mina Mitra Usaha. Dari 320 orang yang mendapatkan pinjaman dari Swamitra Mina 104 orang (32,40%) adalah pelaku usaha jenis usaha perikanan tambak diikuti Pedagang Hasil Perikanan yang mencapai 77 orang (23,99%) dan perikanan tangkap (nelayan) 54 orang (16,82%).

Kegiatan perdagangan hasil tangkapan dan tambak umumnya di kelola oleh pelele (pengumpul) yang sifatnya mengikat. Bentuk ikatan yang dikembangkan adalah pemberian pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada para petambak dan nelayan tangkap. Pengembalian pinjaman dilakukan sewaktu akan berpindah ke pelele lainnya. Jumlah pinjaman berkisar antara Rp.1.000.000 - Rp.25.000.000. Setiap peminjam berkewajiban menjual setiap hasil tangkapan dan panen baik di laut maupun di tambak kepada peledenya. Para pelele ini akan

menjual kembali hasil pembelian mereka kepada pelele besar di Cilincing, Jakarta.

Unit usaha pengolahan yang dikembangkan adalah pembuatan terasi, ikan asin dan kupas rajungan. Tidak semua desa yang mengelola terasi dan kupas rajungan, pengembangannya lebih banyak Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Sederhana. Berdasarkan kualitasnya, terasi terdiri dari tiga jenis dengan bahan dasarnya dari ikan dan udang. Cara pengolahannya masih bersifat tradisional. Jenis yang kualitas rendah terbuat dari ikan dan dijual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jenis yang berkualitas baik terbuat dari udang dan dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Pemasaran terasi didasarkan pada permintaan konsumen yang kebanyakan berasal dari Jawa dan Cirebon. Para pembeli langsung datang ke lokasi yang membeli terasi 7 ton/minggu. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya pemasaran yang berdampak pada harga jual yang rendah. Keinginan dari para pengolah terasi adalah memiliki kemasan tersendiri. Kupas rajungan yang dikembangkan oleh para pengusaha di lokasi PEMP 2007 menjadi sektor andalan. Harga yang cukup menjanjikan berkisar antara Rp. 50.000, - Rp. 100.000 perkilo. Variasi harga ini berdasarkan variasi dagingnya. Harga beli rajungan mentah berkisar antara Rp. 10.000-13.000 perkilo.

Terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat Muara Gembong dengan potensi sumber daya yang ada, adalah dengan tingkat pendidikan semakin tinggi maka masyarakat dapat memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya yang ada dan tidak melakukan kegiatan yang akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Dengan demikian para nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya lingkungan dan selanjutnya dapat membuka peluang usaha kepada masyarakat dengan jenis usaha yang bermacam-macam. Sehingga diversifikasi jenis usaha ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir Muara Gembong ini. Aktifitas perikanan secara umum dengan keterlibatan Rumah Tangga Perikanan (RTP), Rumah Tangga Buruh Perikanan (RTBP) dapat dilihat pada Table 3.13 berikut.

Tabel 3.13. Jumlah Keterlibatan Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan Rumah Tangga Buruh Perikanan (RTBP) dalam Kegiatan Perikanan Kecamatan Muara Gembong Tahun 2010

No.	Jenis Kegiatan	RTP	RTBP
1.	Perairan Umum - Perahu tanpa motor - Tanpa perahu	12 38	26 -
2.	Kolam air tenang - Pembesaran ikan nila, Jambal dan Bawal	177	177
3.	Keramba kepiting bakau (510 unit)	203	268
4.	Penangkapan di laut - Tanpa motor - Perahu tanpa motor - Motor Tempel	104 111 605	1212
5.	Budidaya Tambak (9.252 Ha)	1.104	1.691
6.	Pengolahan hasil perikanan	48	205
7.	Penangkapan bagan kali/sungai	8	17
8.	Penangkapan sero laut	498	1.205

Sumber : Data Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Tahun 2010.

Melihat begitu besar potensi dan aktifitas perikanan pada Tabel 3.13, bahwa keterlibatan Rumah Tangga Perikanan (RTP), Rumah Tangga Buruh Perikanan (RTBP) sangatlah besar dalam memanfaatkan sumber daya perikanan, sangat disayangkan apabila aktifitas perikanan ini terhenti karena kurangnya dukungan dari pemerintah, oleh karenanya bimbingan dan pembinaan dari pemerintah baik pusat maupun daerah harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

### 3.2.8. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Muara Gembong masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan terendah didominasi oleh lulusan SD. Sedangkan untuk lulusan Perguruan Tinggi mencapai 0,12% dari total masyarakat yang sudah mengenyam pendidikan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap jenis pekerjaan masyarakat Muara Gembong, dengan tingkat pendidikan yang rendah mereka tidak punya pilihan untuk bisa bekerja selain menjadi nelayan/pembudidaya/pengolah ikan ataupun pedagang ikan yang merupakan pekerjaan turun temurun dari orang tuanya. Lagipula untuk menjadi nelayan atau

yang lainnya tidak membutuhkan keahlian dan pendidikan yang tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa yang terjadi pada masyarakat pesisir adalah kondisi kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu (Nikijuluw, 2001). Data jumlah dan persentasi masyarakat sasaran menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Jumlah dan Persentasi Masyarakat Sasaran Menurut Tingkat Pendidikan

No	Desa/Kelurahan	SD		SLTP		SLTA		D3-S3	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Pantai Sederhana	1.383	82,57	175	10,45	105	6,27	12	0,72
2.	Pantai Bahagia	1.650	79,06	256	12,27	170	8,15	11	0,53
3.	Pantai Bakti	2.745	79,42	425	12,29	263	7,61	23	0,67
4.	Pantai Mekar	1.476	56,81	871	33,53	201	7,74	50	1,93
5.	Pantai Harapan Jaya	324	86,40	25	6,67	20	5,33	6	0,16
6.	Jaya Sakti	450	58,44	220	28,57	70	0,91	30	0,39
	Jumlah	8.028	73,25	1.971	17,98	829	7,56	132	0,12

Sumber : Diolah dari Data Monografi Desa Sasaran, Tahun 2010.

### 3.2.9. Status Kepemilikan Tanah

Status kepemilikan tanah seluruh warga Muara Gembong baik untuk rumah tinggal maupun lahan tambak untuk usaha budidaya adalah tanah garapan milik negara yang setiap saat bisa digusur oleh pemerintah setempat.

### 3.2.10. Kalender Musim

Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa, sehingga wilayah Muara Gembong dipengaruhi oleh angin Muson Timur yang terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober dan Muson Barat sekitar bulan Nopember sampai dengan April. Perekonomian masyarakat Muara Gembong mengandalkan hasil laut,

sebagian besar kegiatannya seperti nelayan tangkap, pengolah hasil perikanan dan pembudidaya ikan sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca yang ada, terutama nelayan tangkap, jika cuaca bagus mereka akan melaut, dan jika cuacanya sangat buruk maka para nelayan tidak dapat melaut, mereka terpaksa tinggal dirumah dan tidak ada pemasukan. Keadaan ini sudah berlangsung beberapa bulan dan akan terus berlanjut sampai cuaca membaik. Hal ini juga mempengaruhi kegiatan pengolahan hasil perikanan yaitu pengolah terasi, ikan asin, kupas kepiting, rajungan, dan kerang, karena mereka sangat tergantung dari hasil tangkapan para nelayan, apabila nelayan tidak melaut maka usaha pengolahannya tidak mendapatkan bahan baku. Demikian pula kegiatan penangkapan menggunakan keramba sejumlah 510 unit untuk menangkap kepiting bakau, sangat dipengaruhi oleh cuaca.

Untuk kegiatan pembudidayaan adalah budidaya udang selama 3 bulan, kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh cuaca. Apabila cuaca baik sepanjang tahun, maka akan panen 3 kali dalam setahun dengan hasil yang baik, tetapi apabila terjadi cuaca yang tidak menentu seperti yang terjadi saat ini maka diperkirakan panen akan gagal, karena udang sangat sensitif terhadap penyakit dan udang-udang yang mati tidak dapat diperkirakan jumlahnya karena tidak terlihat. Sedangkan untuk kegiatan pembudidaya ikan bandeng, kegiatan pembudidayaannya dilaksanakan selama 6 bulan. Apabila cuaca buruk akan menyebabkan kualitas air tambak menjadi buruk dan menyebabkan gagal panen, bandeng-bandeng yang mati akan mengambang sehingga dapat diperkirakan kegagalannya. Sementara kegiatan pembesaran ikan di perairan umum meliputi ikan nila, jambal dan bawal sudah dapat dipanen dengan jangka waktu 3 bulan apabila cuaca baik. Pada masa-masa peceklik inilah keberadaan koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Mitra Usaha sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempertahankan usaha dan menyambung hidupnya.

### **3.2.11. Penggunaan Waktu Sehari**

Penggunaan waktu sehari masyarakat Muara Gembong hampir sama dengan masyarakat Cilincing, karena mereka mempunyai kegiatan usaha yang sama yaitu nelayan, pengolah hasil perikanan, pembudidaya ikan, pedagang ikan

kering, pedagang ikan basah dan kegiatan lainnya. Penggunaan waktu sehari masyarakat Muara Gembong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15. Penggunaan Waktu Sehari Masyarakat Muara Gembong

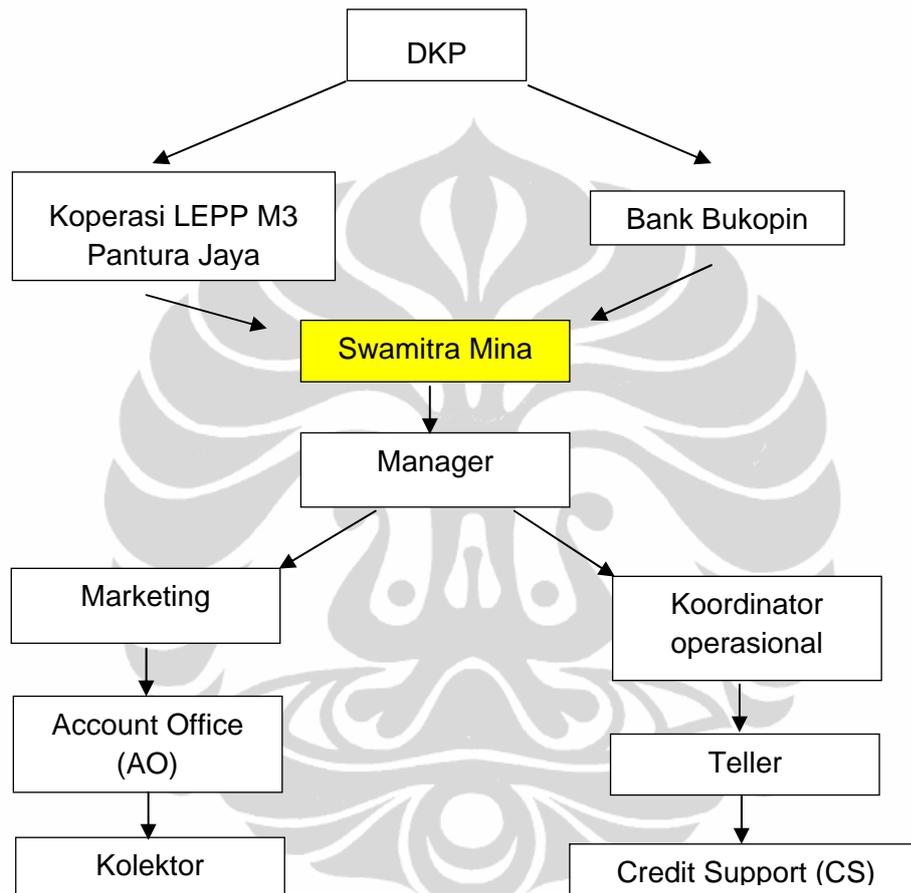
Pukul	Kegiatan (Bidang Usaha)			
	Nelayan	Pengolah Hasil Perikanan	Pembudidaya Udang dan bandeng	Perdagangan
05.00-06.00	Kembali ke darat, bongkar ikan di TPI, dan sholat.	Melakukan kegiatan rumah, sholat	Melakukan kegiatan rumah, sholat	Melakukan kegiatan rumah, sholat
06.00-12.00	Istirahat di rumah (tidur)	Melakukan pengolahan hasil perikanan	Melakukan kegiatan di tambak	Berdagang di pasar
12.00-13.00	Sholat, makan siang dan istirahat (tidur)	Istirahat, sholat dan makan siang	Istirahat, sholat dan makan siang	Istirahat, sholat dan makan siang
13.00-18.00	Sholat, makan siang dan istirahat (tidur)	Melakukan pengolahan hasil perikanan	Melakukan kegiatan di tambak	Berdagang di pasar
18.00-21.00	Sholat kemudian melakukan operasi penangkapan ikan di laut	Melakukan kegiatan rumah, istirahat, sholat, nonton TV	Melakukan kegiatan rumah, istirahat, sholat, nonton TV	Melakukan kegiatan rumah, istirahat, sholat, nonton TV
21.00-05.00	Melakukan operasi penangkapan ikan di laut	Istirahat di rumah (tidur)	Istirahat di rumah (tidur)	Istirahat di rumah (tidur)

### 3.3. Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing Jakarta Utara

Evaluasi program PEMP dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, kendala dan rencana tindak lanjut. Evaluasi program PEMP terhadap kegiatan Swamitra Mina dilaksanakan pada tahap persiapan (input), tahap pelaksanaan (proses), dan tahap perkembangan (output), serta dampak (impact) terhadap kesejahteraan masyarakat penerima pinjaman, hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil evaluasi program PEMP pada tahap persiapan (input), adalah sebagai berikut:

1. Swamitra Mina adalah salah satu kegiatan koperasi LEPP-M3 yang bekerjasama dengan Bank Bukopin, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 3.3. Struktur Organisasi Koperasi LEPP M3 Swamitra Mina Pantura Jaya

2. Konsultan Manajemen (KM) dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang merupakan tenaga pendamping teknis dan manajemen usaha tidak ada di dalam Swamitra Mina Pantura Jaya. Pada Swamitra Mina Pantura Jaya tugas pendampingan teknis dan manajemen usaha dilaksanakan oleh petugas koordinator operasional di lapangan.
3. Legalitas Koperasi LEPP-M3 adalah sebagai berikut:  
Legalitas Koperasi LEPP-M3 Pantura Jaya adalah SK DKP (PEMP) No. 15.1/2004 tanggal 20 Agustus 2004, dengan SK Badan Hukum No. 0172/BH/-

1.82/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004, dan SK Penetapan sebagai pengelola DEP No. SK.22/KP3K/82005 tanggal 18 Agustus 2005. Swamitra Mina Pantura Jaya terletak di Jl. Kalibaru Barat III No. 8 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

4. Petunjuk pelaksanaan (Pedum program PEMP) yang dibuat oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pada Tahun 2003, kemudian disempurnakan di Tahun 2006 dengan keputusan Dirjen KP3K No. SK.07/KP3K/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
5. Dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah sangat kurang, pembinaan dilakukan hanya setahun sekali, biasanya pada awal tahun.
6. Sosialisasi program PEMP ke masyarakat luas cukup berhasil, karena program tersebut sudah diketahui oleh banyak orang di wilayah Cilincing ini, hal ini terbukti oleh penyebaran nasabahnya sudah ke seluruh pelosok kecamatan Cilincing.
7. Pencairan dana ekonomi produktif (DEP) ke rekening koperasi LEPP-M3 sudah sesuai (tepat waktu) yaitu pada tahun 2004 sebesar Rp. 500.000.000,- dan tahun 2005 sebesar Rp. 361.920.000,-. Namun pada pelaksanaannya terjadi permasalahan yaitu pengembalian pinjaman mengalami kredit macet.

Berdasarkan hasil evaluasi program PEMP pada tahap pelaksanaan (proses), adalah sebagai berikut:

1. Konsultan Manajemen (KM) dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang merupakan pendamping teknis dan manajemen usaha tidak ada di Swamitra Mina Pantura Jaya, sehingga kinerja KM dan TPD tidak bisa dievaluasi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab tidak menunjuk KM dan TPD untuk melakukan pendampingan teknis dan manajemen usaha.
2. Kinerja Bank Pelaksana yaitu Bank Bukopin terlihat bahwa Bank Bukopin telah melaksanakan pelatihan kepada calon petugas LKM pada tahun 2004, untuk bertugas di koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Pantura Jaya. Terdapat 14 orang petugas koperasi LEPP-M3 tersebut dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.16. Kualifikasi Pendidikan pengurus Koperasi LEPP M3  
Pantura Jaya (2005-2009)

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S 1	5
2.	D 3	1
3.	SLTA	8

3. Kinerja Swamitra Mina yaitu dengan melihat pengelolaan DEP dan kegiatan simpan pinjam selama 6 tahun (2004-2009), sampai dengan saat ini swamitra mina masih tetap eksis menghadapi krisis ekonomi, walaupun banyak mengalami kendala yaitu kredit macet dan usaha nasabah yang gagal.
4. Selain simpan pinjam, juga mempunyai usaha jasa tambahan yang lainnya yaitu *payment point*, dengan melayani jasa pengguna listrik, telkom, ratelindo, dan pelayanan unit usaha.
5. Walaupun pada Swamitra Mina Pantura Jaya tidak ada petugas KM dan TPD. Tetapi pendampingan terus dilaksanakan oleh petugas koordinator operasional dengan cara mendatangi nasabah setiap hari untuk melihat perkembangan usahanya dan menagih cicilan harian untuk meringankan jumlah cicilan yang harus disetorkan diakhir bulan.
6. Evaluasi pengelolaan DEP dilaksanakan dengan memeriksa pencatatan dan pembukuan koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Pantura Jaya, yaitu terhadap proses simpan pinjam. Koperasi LEPP-M3 tersebut sudah melakukan pencatatan dan pembukuan, kemudian melaporkan kepada Bank Bukopin setiap bulannya.
7. Jenis usaha Nasabah Swamitra Mina Pantura Jaya

Nasabah Swamitra Mina Pantura Jaya berdasarkan jenis usahanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17. Nasabah Swamitra Mina Pantura Jaya Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah Nasabah (orang)					
		Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	Nelayan Tangkap	-	26	26	26	26	26
2.	Pembudidaya	2	46	46	46	46	46
3.	Pengolahan	-	30	30	30	30	30
4.	Bakul/ Pedagang	-	133	153	133	133	49
5.	Jasa / Wisata	-	3	5	3	3	-
6.	Lainnya	-	74	97	74	74	35
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>312</b>	<b>357</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>186</b>

Sumber: Swamitra Mina Pantura Jaya, 2010.

Pinjaman tidak hanya diberikan kepada masyarakat pesisir, tetapi ada juga masyarakat umum yaitu masyarakat yang mata pencahariannya tidak berhubungan dengan kegiatan kelautan dan perikanan, karena mereka sangat membutuhkan bantuan dan dapat dipastikan kondisi usahanya dapat berjalan. Nasabah tersebut antara lain pedagang sayuran dan pedagang ayam di Pasar Jongkok Berkah di Kelurahan Semper Timur, warung makan, dan warung nasi padang. Hal ini dilakukan karena untuk mempertahankan dan menyelamatkan LKM supaya dapat terus berjalan.

8. Pembuatan target pinjaman dan pengembalian adalah minimal sebesar Rp. 100 juta dan maksimal Rp. 200 juta di Koperasi LEPP-M3 tersebut, apabila terdapat kelebihan pada kas koperasi maka harus disetorkan ke Bank Bukopin.

Berdasarkan hasil evaluasi program PEMP pada tahap perkembangan (output), adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan modal koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Pantura Jaya dari tahun 2004-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18. Sumber Modal Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Pantura Jaya

Tahun	Simpanan Nasabah (Rp.)	Bantuan Pemerintah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
2004	-	500.000.000,-(*)	500.000.000,-
2005	-	361.920.000,-(*)	861.920.000,-
2006	-	2.000.000.000,-(**)	2. 861.920.000,-
2007	153.420.000,-	-	3.015.340.000,-
2008	190.860.000,-	-	3.206.200.000,-
2009	224.340.000,-	-	3.430.540.000,-

(\*) melalui program PEMP.

(\*\*) melalui Bank Bukopin.

Sumber modal dari program PEMP DKP pada tahun 2004 sebesar Rp. 500.000.000,- dan tahun 2005 sebesar Rp. 361.920.000,-; sementara pada tahun 2006 modal dari Bank Bukopin sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Simpanan Pokok anggota koperasi LEPP M3 adalah sebesar Rp. 100.000,- dan simpanan wajib yaitu Rp. 10.000,-/bulan. Usaha jasa tambahan yang lainnya adalah *Payment Point* dengan melayani jasa pengguna Listrik, Telkom, Ratelindo. Modal LKM bertambah (penambahan modal bersumber dari pengembalian pinjaman, mobilisasi dana masyarakat dan akses modal dari bank).

## 2. Jumlah Nasabah bertambah setiap tahunnya.

Jumlah nasabah setiap tahunnya bervariasi, berkembang menurut permintaan disesuaikan dengan jumlah dana yang ada di koperasi, untuk tahun 2007 dan 2009 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 45 orang di tahun 2007 dan 126 orang di tahun 2009. Hal ini disebabkan kondisi keuangan koperasi yang minim dan masih banyak uang yang masih beredar di nasabah. Koperasi sudah meminta bantuan kepada pemda untuk memberikan dana pemberdayaan masyarakat pesisir, namun sampai dengan saat ini belum juga terealisasi.

3. Manfaat dana pinjaman bagi para nasabah koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Pantura Jaya adalah:
- Dalam meningkatkan produksi, dana pinjaman sangat meningkatkan produksi para nasabah, misalnya petambak udang dapat membeli pakan buatan sehingga produksi udangnya dapat meningkat, dan pedagang ikan asin dapat memperbesar usahanya.
  - Untuk memperluas jenis usahanya para nasabah sangat terbantu oleh pinjaman dari koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina, contohnya, pedagang sayur dapat meningkatkan keuntungan setelah mendapat pinjaman sehingga dia dapat melakukan usaha sampingan yaitu membuka warung kelontong (sembako) di rumahnya, pengolah hasil perikanan melakukan usaha sampingan menjual bensin eceran untuk nelayan, oleh karenanya penghasilannya dapat bertambah. Para pembudidaya ikan dapat membuka warung sembako di rumahnya.
  - Pinjaman dari koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina dapat meningkatkan pendapatan nasabah, berdasarkan bidang usahanya rata-rata pendapatan nasabah perhari setelah mendapatkan pinjaman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19. Pendapatan Nasabah Berdasarkan Bidang Usaha

No.	Bidang Usaha	Pendapatan/hari sebelum mendapatkan pinjaman (Rp,-)	Pendapatan/hari setelah mendapatkan pinjaman (Rp,-)
1.	Pedagang ikan asin	1.000.000,-	2.000.000,-
2.	Pengolah ikan	1.000.000,-	2.700.000,-
3.	Pedagang ikan basah	300.000,-	800.000,-
4.	Tambak udang	50.000,-	50.000,-
5.	Nelayan	50.000,-	50.000,-
6.	Warung makan	300.000,-	800.000,-
7.	Penjual bensin eceran	40.000,-	45.000,-
8.	Pedagang ayam	50.000,-	50.000,-
9.	Pedagang sayuran	100.000,-	200.000,-

Berdasarkan uraian diatas bahwa dampak (impact) program PEMP terhadap kesejahteraan masyarakat Cilincing adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan masyarakat Cilincing khususnya nasabah Swamitra Mina Pantura Jaya sudah lebih dari Rp. 10.000,-/hari, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Cilincing pendapatan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Pendidikan mayoritas masyarakat Cilincing adalah SD bahkan ada yang tidak tamat SD, namun mereka berusaha menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, bahkan ada yang sudah bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi.
3. Perumahan masyarakat Cilincing terutama untuk yang usahanya adalah pedagang, petambak, dan warung makan kondisi rumahnya sudah bagus, dinding tembok dan berlantai keramik, namun untuk nelayan dan pengolah hasil perikanannya rumahnya terbuat dari kayu dan letaknya di pinggir laut, mereka tidak mempunyai WC sehingga menggunakan WC umum. Seluruh tanah di Cilincing adalah tanah garapan, sehingga sewaktu-waktu mereka dapat diusir dari Cilincing.
4. Pekerjaan masyarakat pesisir Cilincing yang sebagian besar adalah berhubungan dengan kelautan dan perikanan, dengan adanya pinjaman dari Swamitra Mina maka mereka dapat memperluas bidang usahanya, contohnya petambak udang dapat membuka usaha sampingan yaitu membuka warung sembako dirumahnya, dan pengolah hasil perikanan membuka usaha sampingan menjual bensin eceran untuk nelayan.
5. Untuk memeriksakan kesehatan dan berobat, masyarakat Cilincing sebagian besar pergi ke puskesmas, sedangkan mereka yang sakit parah biasanya berobat ke RSUD Koja ataupun ke RS. BPP yang letaknya cukup jauh dari Kecamatan Cilincing.
6. Untuk kebutuhan pangan, sebagian besar masyarakat Cilincing bisa makan sehari 3 kali, ada pula sebagian dari mereka yang mempunyai kebiasaan makan sekali sehari atau dua kali sehari, namun ada juga sebagian dari mereka yang lain hidup kekurangan sehingga harus makan seadanya, bahkan

ada juga dari mereka yang mengutang di warung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan uraian diatas maka diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala dalam operasional pelaksanaan program PEMP khususnya kegiatan Swamitra Mina adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan program PEMP adalah:
  - a. Kondisi geografis wilayah yang sangat menguntungkan, yaitu seluruh dataran terdiri dari endapan *pleistocene* yang terdapat pada  $\pm 50$  meter di bawah permukaan tanah.
  - b. Luas wilayah Cilincing adalah 3.970 ha, dengan peruntukannya sebagai perumahan, industri, kantor dan gudang, pertanian, dan pertambakan.
  - c. Masyarakat yang heterogen berasal dari etnis cina dan beberapa suku yaitu jawa, bugis, padang, batak, sumatera dan terdapat penduduk yang bersifat sementara (nomaden).
  - d. Penduduk kecamatan Cilincing berjumlah 269.054 jiwa.
  - e. Lokasinya yang strategis, dekat dengan pelabuhan tanjung priok.
  - f. Keberadaan Koperasi LEPP-M3 yang merupakan lembaga yang sudah berbadan hukum koperasi dan sudah diterima masyarakat.
  - g. Program PEMP merupakan kebijakan pemerintah yaitu program penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan sebagai prioritas pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - h. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibutuhkan masyarakat pesisir dalam pemberian bantuan kredit usaha.
  - i. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
  
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program PEMP, yang menyebabkan program tersebut tidak berjalan adalah sebagai berikut:
  - a. Iklim (cuaca yang buruk/musim yang tidak menentu) membuat nelayan tidak bisa melaut dan usaha di bidang perikanan lainnya mengalami kegagalan.

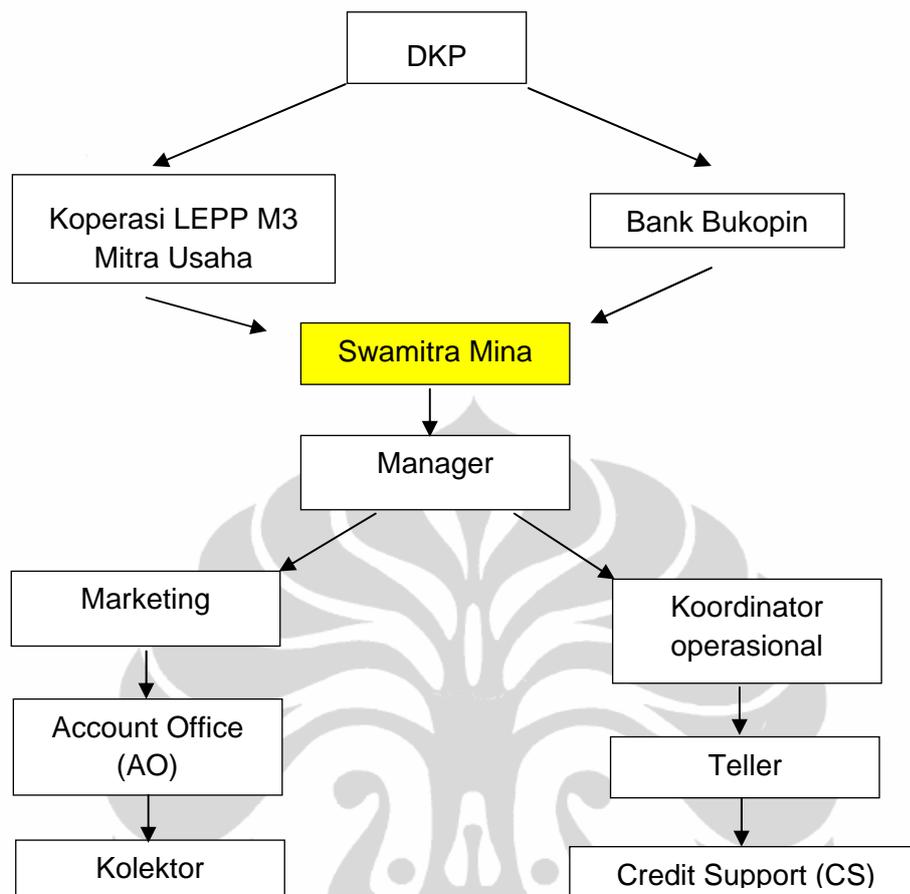
- b. Sumber daya perikanan di Laut Jawa sudah mengalami *overfishing* (tangkap berlebih) menyebabkan nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan, sehingga berpengaruh pula terhadap pengolah hasil perikanan dan pedagang/bakul ikan tidak dapat melakukan usahanya.
- c. Degradasi sumber daya lingkungan menyebabkan pembudidaya ikan gagal panen.
- d. Kredit macet disebabkan oleh para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan pedagang/bakul ikan yang gagal usahanya sehingga mereka tidak bisa membayar cicilan pinjamannya.
- e. Keberadaan rentenir, dibutuhkan masyarakat pesisir karena pemberian pinjamannya bisa kapan saja, dan tidak membutuhkan persyaratan (agunan) yang rumit, walaupun dengan bunga yang tinggi.
- f. Kurangnya pembinaan dari pemerintah dalam pelaksanaan program PEMP yaitu tidak adanya pendampingan teknis dan manajemen usaha dari KM dan TPD.

#### **3.4. Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong Bekasi**

Evaluasi program PEMP dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, kendala dan rencana tindak lanjut. Evaluasi program PEMP terhadap kegiatan Swamitra Mina Mitra Usaha dilaksanakan pada tahap persiapan (input), tahap pelaksanaan (proses), dan tahap perkembangan (output), serta dampak (impact) terhadap kesejahteraan masyarakat penerima pinjaman, hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil evaluasi program PEMP pada tahap persiapan (input), adalah sebagai berikut:

1. Swamitra Mina adalah salah satu kegiatan koperasi LEPP-M3 yang bekerjasama dengan Bank Bukopin, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 3.4. Struktur Organisasi Koperasi LEPP M3 Swamitra Mina Mitra Usaha

2. Konsultan Manajemen (KM) dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang merupakan tenaga pendamping teknis dan manajemen usaha tidak ada di dalam Swamitra Mina Mitra Usaha. Pada Swamitra Mina Mitra Usaha tugas pendampingan teknis dan manajemen usaha dilaksanakan oleh petugas koordinator operasional di lapangan.
3. Legalitas Koperasi LEPP-M3 adalah sebagai berikut:  
Legalitas Koperasi LEPP-M3 Mitra Usaha adalah SK DKP (PEMP) No. 24/PEMP/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004, dan SK Badan Hukum No. 19/BH/PERINDAGKOP&PMD.518/VII/2004. Swamitra Mina Pantura Jaya terletak di Jl. Raya Muara Gembong No. 16 Desa Pantai Mekar Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
4. Petunjuk pelaksanaan (Pedum program PEMP) yang dibuat oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pada Tahun 2003, kemudian disempurnakan di

Tahun 2006 dengan keputusan Dirjen KP3K No. SK.07/KP3K/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

5. Dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah sangat kurang, pembinaan dari pemda dilakukan hanya setahun sekali, biasanya pada awal tahun.
6. Berbagai upaya yang dilakukan oleh swamitra mina untuk mempertahankan keberadaannya dengan metode pendekatan langsung ke masyarakat pesisir. Sosialisasi dilakukan dari kampung ke kampung, kelompok masyarakat, aparat desa dan kecamatan, tokoh masyarakat untuk mendapat kepercayaan dari mereka. Bahkan swamitra mina bersama Koperasi LEPP-M3 mengadakan even pesta pesisir yang berlangsung tujuh hari dari tanggal 17-24 Agustus 2005 yang melibatkan sponsor dari Djarum Coklat, DKP, PEMDA Bekasi, Dinas Peternakan Perikanan Kelautan, dan Bank Bukopin. Dana yang dihabiskan untuk kegiatan ini mencapai Rp. 65 juta. Dalam even ini swamitra memberikan penghargaan kepada debitur dan nasabah terbaik. Kegiatan ini berdampak besar, Swamitra Mina perlahan-lahan diterima dan mendapat sambutan yang baik di hati masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah simpanan masyarakat yang meningkat mencapai Rp. 127,6 Juta.
7. Pencairan dana ekonomi produktif (DEP) ke rekening koperasi LEPP-M3 sudah sesuai (tepat waktu) yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp. 436.000.000,- dan tahun 2006 sebesar Rp. 1.493.198.000,-. Namun pada pelaksanaannya terjadi permasalahan yaitu pengembalian pinjaman mengalami kredit macet.

Berdasarkan hasil evaluasi program PEMP pada tahap pelaksanaan (proses), adalah sebagai berikut:

1. Konsultan Manajemen (KM) dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang merupakan pendamping teknis dan manajemen usaha tidak ada di Swamitra Mina Mitra Usaha, sehingga kinerja KM dan TPD tidak bisa dievaluasi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab tidak menunjuk KM dan TPD untuk melakukan pendampingan teknis dan manajemen usaha.
2. Kinerja Bank Pelaksana yaitu Bank Bukopin terlihat bahwa Bank Bukopin telah melaksanakan pelatihan kepada calon petugas LKM pada tahun 2004,

untuk bertugas di koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Mitra Usaha. Terdapat 7 orang petugas koperasi LEPP-M3 tersebut dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.20. Kualifikasi Pendidikan pengurus Koperasi LEPP M3 Mitra Usaha (2005-2009)

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S 1	1
2.	D 3	1
3.	SLTA	5

3. Kinerja Swamitra Mina yaitu dengan melihat pengelolaan DEP dan kegiatan simpan pinjam selama 5 tahun (2005-2009), sampai dengan saat ini Swamitra Mina Mitra Usaha mengalami kesulitan untuk mengelola kegiatan simpan pinjam karena kendala kredit macet dan sebagian besar usaha nasabahnya mengalami kegagalan.
4. Evaluasi pengelolaan DEP dilaksanakan dengan memeriksa pencatatan dan pembukuan koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Mitra Usaha, yaitu terhadap proses simpan pinjam. Koperasi LEPP-M3 tersebut sudah melakukan pencatatan dan pembukuan, kemudian melaporkan kepada Bank Bukopin setiap bulannya.
5. Jenis usaha Nasabah Swamitra Mina Mitra Usaha

Nasabah Swamitra Mina Mitra Usaha berdasarkan jenis usahanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21. Nasabah Swamitra Mina Mitra Usaha Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah Nasabah (orang)				
		Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	Nelayan Tangkap	32	52	52	75	126
2.	Pembudidaya	96	102	102	147	146
3.	Pengolahan	1	1	1	1	30
4.	Bakul/ Pedagang	54	68	128	132	81
5.	Jasa / Wisata	15	19	21	10	-
6.	Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	198	242	304	365	383

Sesuai dengan tujuannya, Swamitra Mina Mitra Usaha hanya memberikan pinjaman kepada masyarakat pesisir, yaitu masyarakat yang mata pencahariannya berhubungan dengan kegiatan kelautan dan perikanan, seperti nelayan tangkap, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, bakul/pedagang, dan jasa/wisata bidang kelautan dan perikanan. Sampai dengan tahun 2009 nasabahnya sebanyak 383 orang dan sedang mengalami kredit macet, karena sebagian besar nasabahnya mengalami kegagalan dalam mengelola usahanya.

Perikanan yang dikelola adalah perikanan tangkap dan budidaya (tambak) dengan komoditi unggulan dan umumnya ditangkap/ditanam masing-masing berupa rajungan, kepiting, cumi, udang windu, udang putih dan bandeng. Pembesaran ikan di perairan umum meliputi ikan nila, jambal dan bawal. Sedang pengolahan hasil perikanan diolah dalam bentuk terasi, ikan asin, kupas kepiting, rajungan dan kerang.

6. Pembuatan target pinjaman dan pengembalian adalah minimal sebesar Rp. 100 juta dan maksimal Rp. 200 juta di Koperasi LEPP-M3 tersebut, apabila terdapat kelebihan pada kas koperasi maka harus disetorkan ke Bank Bukopin.

Berdasarkan hasil evaluasi program PEMP pada tahap perkembangan (output), adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan modal koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Mitra Usaha dari tahun 2004-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22. Sumber Modal Koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina Mitra Usaha

Tahun	Simpanan Nasabah (Rp.)	Bantuan Pemerintah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
2005	1.060.000,-	436.000.000,-(*)	437.060.000,-
2006	127.600.000,-	1.493.198.000,-(*)	2.057.858.000,-
2007	196.853.775,-	-	2.254.711.775,-
2008	235.457.478,-	-	2.490.169.253,-
2009	217.669.591,-	-	2.707.838.844,-

(\*) melalui program PEMP

Sumber modal dari program PEMP DKP pada tahun 2005 sebesar Rp. 436.000.000,- dan tahun 2006 sebesar Rp. 1.493.198.000,-. Simpanan Pokok anggota koperasi LEPP M3 adalah sebesar Rp. 100.000,- dan simpanan wajib yaitu Rp. 10.000,-/bulan. Usaha jasa tambahan yang lainnya adalah *Payment Point* dengan melayani jasa pengguna Listrik, Telkom, Ratelindo. Modal LKM bertambah (penambahan modal bersumber dari pengembalian pinjaman, mobilisasi dana masyarakat dan akses modal dari bank).

2. Jumlah Nasabah bertambah setiap tahunnya.

Jumlah nasabah setiap tahunnya bervariasi mengalami penambahan, berkembang menurut permintaan disesuaikan dengan jumlah dana yang ada di koperasi. Namun sebagian besar nasabahnya tidak dapat mengembalikan pinjaman dan mengalami kredit macet karena rata-rata usaha para nasabah adalah nelayan tangkap dan pembudidaya yang usahanya sangat terpengaruh oleh cuaca. Dengan kondisi cuaca yang buruk sejak setahun terakhir ini membuat para nelayan tidak dapat melaut untuk melakukan penangkapan ikan, dan pembudidaya ikan juga mengalami gagal panen, hal ini menyebabkan kredit macet dan pengelolaan dana DEP mengalami kendala yang sangat sulit.

3. Dana pinjaman yang bertujuan untuk meningkatkan produksi para nasabah ternyata pada kenyataannya tidak bisa, karena sebagian besar nasabahnya mengalami gagal panen dan nelayan tidak melaut.
4. Para nasabah Swamitra Mina Mitra Usaha khususnya, mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendapatan, sehingga mereka makan seadanya.
5. Untuk memperluas jenis usaha, mereka mengalami kesulitan karena tidak adanya pembinaan dan pendampingan dari KM dan TPD yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Muara Gembong.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dampak (impact) program PEMP terhadap kesejahteraan masyarakat Muara Gembong adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan masyarakat Muara Gembong khususnya nasabah Swamitra Mina Mitra Usaha kurang dari Rp. 10.000,-/hari, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Muara Gembong pendapatan sudah dibawah garis kemiskinan.

2. Pendidikan mayoritas masyarakat Muara Gembong adalah lulusan SD, namun mereka berusaha menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.
3. Perumahan masyarakat Muara Gembong terutama untuk yang usahanya adalah pedagang, petambak, dan warung makan kondisi rumahnya sudah bagus, dinding tembok dan berlantai keramik, namun untuk nelayan dan pengolah hasil perikanannya rumahnya terbuat dari kayu dan letaknya di pinggir laut, mereka tidak mempunyai WC sehingga menggunakan WC umum. Seluruh tanah di Muara Gembong adalah tanah garapan, sehingga sewaktu-waktu mereka dapat diusir dari Muara Gembong.
4. Pekerjaan masyarakat pesisir Muara Gembong yang sebagian besar adalah berhubungan dengan kelautan dan perikanan, dengan adanya pinjaman dari Swamita Mina maka mereka sangat terbantu, namun pada kenyataannya mereka masih tetap hidup dengan serba kekurangan.
5. Untuk memeriksakan kesehatan dan berobat, masyarakat Muara Gembong sebagian besar pergi ke puskesmas, sedangkan mereka yang sakit parah biasanya berobat ke RS.
6. Untuk kebutuhan pangan, sebagian besar masyarakat Muara Gembong bisa makan sehari 3 kali, namun ada juga sebagian dari mereka yang lain hidup kekurangan sehingga harus makan seadanya, bahkan ada juga dari mereka yang mengutang di warung.

Berdasarkan uraian diatas maka diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala dalam operasional pelaksanaan program PEMP khususnya kegiatan Swamitra Mina adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan program PEMP adalah:
  - a. Kondisi geografis wilayah yang sangat menguntungkan, yaitu pada umumnya adalah dataran dengan *evaluation* 0-5 derajat dengan ketinggian dari permukaan laut  $\pm 0,74$  meter. Curah hujan mencapai 1.695 mm/tahun dan suhu udara rata-rata berkisar antara 18-32<sup>0</sup>C. Wilayah Kecamatan Muara Gembong berada diantara pertemuan Laut Jawa dengan sungai Citarum sehingga menjadikan wilayah ini berlumpur.

- b. Luas wilayah Muara Gembong adalah 14.009 ha, dengan peruntukannya sebagai pengelolaan lahan untuk tambak mencapai 9.252 ha, dan lahan untuk perumahan, pertanian, dan pertambakan. seluas 4.757 ha.
  - c. Masyarakat yang heterogen berasal dari etnis dan terdapat penduduk yang bersifat sementara (nomaden).
  - d. Penduduk kecamatan Muara Gembong berjumlah 36.138 jiwa.
  - e. Keberadaan Koperasi LEPP-M3 yang merupakan lembaga yang sudah berbadan hukum koperasi dan sudah diterima masyarakat.
  - f. Program PEMP merupakan kebijakan pemerintah yaitu program penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan sebagai prioritas pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - g. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibutuhkan masyarakat pesisir dalam pemberian bantuan kredit usaha.
  - h. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
  - i. Kondisi pangsa pasar untuk usaha kredit mikro dan jasa-jasa lain di wilayah Kecamatan Muara Gembong cukup menjanjikan. Wilayah dengan sumber daya alam dan daya dukung lingkungannya, sangat potensial untuk dikembangkan. Hanya usaha di bidang aquabisnis menjadi lahan utama usaha masyarakat pesisir berupa budidaya tambak, penangkapan dan jasa perdagangan lainnya membutuhkan sentuhan penguatan modal dan tenaga kerja yang professional. Awalnya swamitra mengalami kesulitan akibat dari ketidaksiapan masyarakat dalam mengikuti aturan swamitra mina terutama dalam kelengkapan administrasi pinjaman. Pada bulan pertama hingga bulan ketiga, swamitra langsung membantu masyarakat terutama dalam mengurus KTP dan Kartu Keluarga, serta kelengkapan syarat pinjaman. Hal ini dilakukan akibat keluhan calon debitur-nasabah terhadap birokrasi dan biaya-biaya (balas jasa) yang kehendaki oleh aparat desa.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program PEMP, yang menyebabkan program tersebut tidak berjalan adalah sebagai berikut:

- a. Iklim (cuaca yang buruk/musim yang tidak menentu) membuat nelayan tidak bisa melaut dan usaha di bidang perikanan lainnya mengalami kegagalan.
- b. Sumber daya perikanan di Laut Jawa sudah mengalami *overfishing* (tangkap berlebih) menyebabkan nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan, sehingga berpengaruh pula terhadap pengolah hasil perikanan dan pedagang/bakul ikan tidak dapat melakukan usahanya.
- c. Degradasi sumber daya lingkungan menyebabkan pembudidaya ikan gagal panen.
- d. Kredit macet disebabkan oleh para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan pedagang/bakul ikan yang gagal usahanya sehingga mereka tidak bisa membayar cicilan pinjamannya.
- g. Keberadaan rentenir, dibutuhkan masyarakat pesisir karena pemberian pinjamannya bisa kapan saja, dan tidak membutuhkan persyaratan (agunan) yang rumit, walaupun dengan bunga yang tinggi.
- h. Kurangnya pembinaan dari pemerintah dalam pelaksanaan program PEMP yaitu tidak adanya pendampingan teknis dan manajemen usaha dari KM dan TPD.
- i. Kendala yang dihadapi adalah kredit macet dan *landing* pinjaman yang kecil dari target akibat dari kewenangan dan kebijakan A/O supervise Bukopin Cabang Karawang. Kebijakan ini didasarkan pada tolok ukur agunan/jaminan debitur yang tidak memenuhi bank konvensional *bankable*. Karena umumnya jaminan yang diajukan di swamitra mina berupa tanah garapan dan bangunan rumah tanpa IMB, pas kecil perahu. Selain itu, keterlambatan pemberian kewenangan *committee* di swamitra untuk memutuskan plafond pinjaman Rp. 2 juta yang baru diberikan pada Bulan September 2005.
- j. Kondisi eksternal, kendala yang dihadapi adalah banjir dan belum ada pemusatan suplayer serta distribusi hasil tangkapan dan panen di satu tempat di wilayah Kecamatan Muara Gembong seperti TPI yang diharapkan dapat membantu *collector*. Selama ini, *collector* mengambil angsuran dari rumah ke rumah yang posisinya saling berjauhan. Pemukiman di wilayah ini

memanjang menyusuri alir sungai dan garis pantai dengan tekstur berupa tanah liat. Pada saat musim hujan, swamitra mendapat hambatan untuk pengambilan angsuran pinjaman atau simpanan masyarakat. Hal ini disebabkan fasilitas jalan yang kurang memadai (tanah berlumpur-liat/daerah pertambakan).

### 3.5. Perbandingan Pelaksanaan Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha

Berikut ini akan ditampilkan perbandingan pelaksanaan Swamitra Mina sebagai bagian dari program PEMP pada 2 Swamitra Mina yaitu Swamitra Mina Pantura Jaya di Cilincing dan Swamitra Mina Mitra Usaha di Muara Gembong seperti yang terlihat pada Tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.23. Perbandingan Pelaksanaan Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha

No.	Uraian	Swamitra Mina Pantura Jaya Di Cilincing	Swamitra Mina Mitra Usaha Di Muara Gembong	Komparasi Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha
4.	Lokasi	Kalibaru	M. Gembong	
5.	Waktu pelaksanaan evaluasi program	2009	2009	
6.	Data tertanggal	Maret 2010	Mei 2010	
7.	Rata-rata besar pinjaman (Rp.)	13.049.865	10.932.580	1,19 kali
8.	Jumlah total yang dipinjamkan (Rp.)	2.897.070.000	3.093.920.000	0,94 kali
9.	Rata-rata waktu peminjaman (bln)	15	11	1,36 kali
10.	Besar bunga perbulan	2 % <i>Flat rate</i>	2,5 %	
11.	Jumlah peminjam (orang)	186	283	0,49 kali
12.	Peminjam dengan jenis usaha yang berhubungan dengan hasil laut (orang)	151	283	0,39 kali
13.	Peminjam dengan jenis usaha yang berhubungan dengan hasil laut	81%	100%	
14.	Kurang lancar (telah jatuh tempo 1-3 bln) (Rp.)	298.689.321	452.529.623	0,66 kali

(Sambungan Tabel 3.23)

No.	Uraian	Swamitra Mina Pantura Jaya Di Cilincing	Swamitra Mina Mitra Usaha Di Muara Gembong	Komparasi Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha
15.	Diragukan (telah jatuh tempo 4-6 bln) (Rp.)	234.077.158	322.120.210	0,73 kali
16.	Macet (telah jatuh tempo > 6 bln) (Rp.)	246.750.971	1.314.101.442	0,19 kali
17.	Total NPL (Rp.)	779.517.450	2.088.751.275	0,37 kali

Berdasarkan hasil perbandingan pada Tabel 3.23. dapat kita lihat bahwa jumlah penerima pinjaman di daerah Cilincing besarnya 0,49 kali dari jumlah peminjam yang diobservasi di daerah Muara Gembong. Dari data tersebut terlihat juga bahwa rata-rata nominal pinjaman, untuk peminjam di daerah Cilincing 1,19 kali lebih besar dari rata-rata nominal pinjaman untuk daerah Muara Gembong. Dari perbandingan tersebut terlihat pula rata-rata lamanya peminjaman untuk daerah Cilincing yang berkisar 15 bulan lebih kecil dari rata-rata lamanya peminjaman untuk daerah Muara Gembong yaitu 11 bulan, semakin lama waktu peminjaman akan meningkatkan resiko pengembalian, sehingga kemungkinan pinjaman yang kembali juga akan semakin rendah. Terlihat pula bahwa untuk daerah Cilincing 81% peminjamnya memiliki jenis usaha atau profesi yang berhubungan dengan hasil laut, sedangkan untuk daerah Muara Gembong semua peminjam (100%) memiliki profesi atau jenis usaha yang berhubungan dengan hasil laut.

Dari hasil perbandingan pada Tabel 3.23. dan uraian pada point-point diatas, didapatkan hasil bahwa ternyata pelaksanaan program PEMP untuk daerah yang sama yaitu wilayah pantura (Pantai Utara Jawa) bisa sangat berbeda aplikasinya di lapangan, penerapan program tersebut membuat hasil yang sangat berbeda. Operasional pelaksanaan kegiatan Swamitra Mina Pantura Jaya di Cilincing lebih bagus daripada pelaksanaan Swamitra Mina Mitra Usaha di Muara Gembong, hal ini terlihat pada perbandingan-perbandingan sebagai berikut:

1. Jumlah *outstanding* di Swamitra Mina Pantura Jaya kurang dari jumlah *outstanding* di Swamitra Mina Mitra Usaha.

2. Profesi peminjam yang berhubungan dengan hasil laut di Swamitra Mina Pantura Jaya jumlahnya lebih daripada peminjam di Swamitra Mina Mitra Usaha.
3. Jumlah rentenir di Cilincing 7 orang sedangkan di Muara Gembong ada 15 orang dengan bunga bisa mencapai lebih dari 100%.
4. Bunga pinjaman di Swamitra Mina Pantura Jaya lebih kecil daripada di Swamitra Mina Mitra Usaha (2% per bulan di Swamitra Mina Pantura Jaya, dan 2,5% per bulan di Swamitra Mina Mitra Usaha).

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan stake holder terkait di daerah Cilincing dan Muara Gembong didapatkan informasi bahwa pada ke dua daerah tersebut telah tercipta akses permodalan dan alternatif pinjaman bagi masyarakat pesisir daerah tersebut yang memiliki kesulitan keuangan, namun terbukti bahwa program yang dimaksudkan untuk dapat berjalan secara terus menerus dalam jangka panjang, belum dapat sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena tinggi jumlah *outstanding* dan rendahnya tingkat pengembalian perbulan. Hal tersebut tentu saja akan sangat mengganggu kelangsungan program di masa yang akan datang karena dana yang dipinjam akan berhenti pada putaran pertama saja. Masyarakat pesisir yang tidak bisa berkesempatan meminjam pada putaran pertama tidak bisa memiliki kesempatan meminjam pada putaran selanjutnya karena sampai batas waktu pengembalian masih banyak dana pinjaman yang belum kembali, sehingga terciptanya akses permodalan dan alternatif pinjaman hanya terjadi pada masyarakat yang meminjam pada putara pertama saja.

Disisi lain, masih banyaknya para rentenir di daerah tersebut yang berusaha menjadi pahlawan pada saat para nelayan membutuhkan modal untuk pergi ke laut. Koperasi sampai saat ini masih membutuhkan modal dari pemerintah, selain berusaha menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir, juga bertujuan untuk memberantas para rentenir, sehingga nelayan hanya meminjam modal usaha kepada koperasi. Namun pada kenyataanya bahwa program PEMP tersebut belum bisa mengatasi kemiskinan dan memberantas rentenir yang ada di daerah Cilincing dan Muara Gembong. Rata-rata pinjaman yang belum dikembalikan (*outstanding*) oleh nasabah merupakan nominal yang cukup tinggi

yaitu dengan nilai nominal antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 68.000.000,-.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola kegiatan LKM pada Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Usaha, bahwa terjadinya *outstanding* adalah karena keadaan musim, angin barat yang kencang membuat masyarakat pesisir yang menggantungkan penghasilannya dari hasil laut dalam beberapa bulan setiap tahunnya tidak dapat turun ke laut dan menangkap ikan, keadaan ini membuat mereka hanya menggantungkan hidup dari pendapatan seadanya. Menurutny ketidakpastian pendapatan masyarakat tersebut merupakan salah satu faktor penentu tingginya *outstanding* pinjaman. Penjelasan diatas menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki jenis usaha yang berhubungan dengan hasil laut cenderung kesulitan untuk mengembalikan pinjaman dan membuat *outstanding* cenderung besar karena penghasilannya tidak menentu.

Nelayan merupakan kunci alur perolehan hasil laut oleh masyarakat pesisir, jika nelayan tidak dapat menangkap ikan, jenis usaha atau profesi lain yang berhubungan dengan hasil laut juga tidak dapat berjalan, karena sangat tergantung dengan faktor cuaca maka nelayan memiliki resiko yang sangat besar untuk tidak dapat mengembalikan pinjaman pada saat cuaca buruk. Walaupun tidak terlalu bergantung dengan faktor cuaca, masyarakat pesisir yang memiliki jenis usaha atau profesi sebagai pembudidaya ikan memiliki beban biaya yang lebih tinggi karena mereka harus membeli bibit dan dibebani biaya pakan ikan budidaya setiap harinya, sehingga rata-rata biaya yang harus dikeluarkan oleh pembudidaya ikan perharinya akan lebih besar dari masyarakat pesisir yang memiliki jenis usaha atau profesi lainnya.

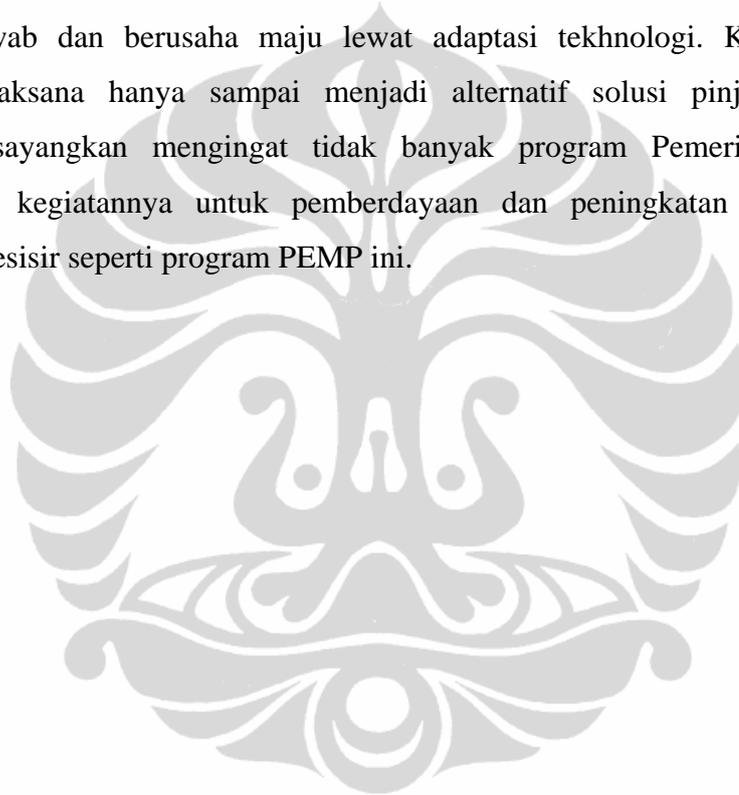
Tingginya *outstanding* serta beragamnya tingkat pengembalian tersebut berdasarkan hasil penelitian ini lebih banyak disebabkan oleh kurangnya rasa tanggung jawab dikarenakan pengajuan pinjaman yang tidak disertai persyaratan agunan, maka masyarakat peminjam tidak memiliki keinginan yang kuat dan merasa berkewajiban untuk dapat melunasi pinjaman. Cara lain yang dilakukan oleh Swamitra Mina adalah dengan mengerahkan *debt collector* setiap harinya untuk menagih, dengan mencicil setiap harinya dengan besaran sesuai kemampuan nasabah sehingga diakhir bulan pada saat nasabah itu harus

membayar mereka dapat mencicil tagihan bulannya. Selain karena faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, keadaan tersebut tidak terlepas dari masalah kemiskinan yang menimpa masyarakat pesisir itu sendiri. Kemiskinan yang menimpa pada masyarakat pesisir dipicu oleh kemiskinan struktural, kemiskinan super struktural dan kemiskinan kultural, dan lebih parahnya lagi kemiskinan tersebut terwujud tidak hanya dalam bentuk kemiskinan secara ekonomi saja, tetapi diperparah lagi dengan kemiskinan sosial, kemiskinan budaya dan kemiskinan politik.

Disamping rendahnya rasa tanggung jawab dan keinginan untuk membayar serta lingkungan sosial yang miskin, peminjam juga dibebani dengan tingginya bunga pinjaman, untuk Swamitra Mina Pantura Jaya masyarakat dikenakan bunga pinjaman sebesar 2% perbulan atau 24% pertahun, sementara pada Swamitra Mina Mitra Usaha bunga pinjamannya adalah 2,5% perbulan atau 28% pertahun. Angka tersebut tentu saja cukup besar bagi masyarakat yang tergolong miskin, dengan bunga pinjaman sebesar itu beban biaya yang harus ditanggung setiap bulannya juga akan semakin membengkak. Pelaksanaan program ini juga masih dirasakan kurang bermanfaat secara maksimal karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai penanggung jawab kegiatan secara Nasional hanya memandangi pelaksanaannya hanya dari *supply side* saja, karena beranggapan jika LKM dapat menyerap DEP dengan maksimal, maka program dianggap telah berjalan dengan baik, padahal hal tersebut tidak benar, kelanjutan program dimasa yang akan datang seharusnya menjadi fokus perhatian utama karena program hanya berlangsung hingga tahun 2009, oleh karenanya harapan utama program adalah kesinambungan program dimana kegiatan LKM masih dapat terus berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir setelah DEP tidak lagi dikucurkan.

Dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa program hanya berjalan pada putaran pertama saja dan sifatnya *sustainability* tidak tercapai seharusnya KKP sebagai penanggung jawab program untuk tingkat Nasional dapat secepatnya memikirkan alternatif solusi terbaik agar program dapat berjalan maksimal, terlebih lagi sejak program bisa dipantau secara *on-line* seharusnya KKP dapat menilai kinerja masing-masing kegiatan LKM untuk semua daerah

yang dipantau setiap bulannya. Perbaikan pelaksanaan program secara sungguh-sungguh tentulah sangat diharapkan mengingat luasnya jangkauan masyarakat sasaran yang sebesar 16,42 juta jiwa. Peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir sangat diperlukan mengingat Negara kita terkenal dengan luasnya wilayah lautan, tetapi jangan melupakan sifat dari pemberdayaan itu sendiri yaitu *helping the poor to help themselves*, masyarakat pesisir sebagai masyarakat sasaran program juga harus dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui program dengan meningkatkan tingkat pendidikan, memperbaiki pola berfikir, meningkatkan rasa tanggung jawab dan berusaha maju lewat adaptasi teknologi. Karena jika program terlaksana hanya sampai menjadi alternatif solusi pinjaman saja sangatlah disayangkan mengingat tidak banyak program Pemerintah yang menfokuskan kegiatannya untuk pemberdayaan dan peningkatan kehidupan masyarakat pesisir seperti program PEMP ini.



## BAB 4

### IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ANALISA SWOT

Identifikasi permasalahan dan analisa SWOT pada Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha adalah sebagai berikut:

#### 4.1 Identifikasi Permasalahan

Dari uraian yang disampaikan dalam Bab III dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dari hasil penelitian, permasalahan-permasalahan tersebut sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1. Identifikasi Permasalahan Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha

No.	Masalah	
	Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing	Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong
1.	Kualitas SDM yang rendah	Kualitas SDM yang rendah
2.	Rendahnya tingkat pendapatan	Rendahnya tingkat pendapatan
3.	Tidak mempunyai agunan yang bisa dijaminkan ke bank	Tidak mempunyai agunan yang bisa dijaminkan ke bank
4.	Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar	Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar
5.	Cuaca buruk	Cuaca buruk
6.	Paceklik/gagal panen	Paceklik/gagal panen
7.	Kredit macet	Kredit macet
8.	Keberadaan rentenir	Keberadaan rentenir
9.	-	Kurangnya sarana air bersih
10.	-	Terbatasnya transportasi

Dari 8 permasalahan pada masyarakat Cilincing dan 10 permasalahan di masyarakat Muara Gembong seperti tersebut diatas, dapat dikelompokkan menjadi 2 permasalahan utama, yaitu:

1. Permasalahan karena faktor sumber daya manusia, antara lain masalah:
  - a. Kualitas SDM yang rendah.
  - b. Rendahnya tingkat pendapatan.
  - c. Tidak mempunyai agunan yang bisa dijaminkan ke bank.
  - d. Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar.
  - e. Keberadaan rentenir.
2. Permasalahan karena faktor sumber daya alam, antara lain masalah:
  - a. Cuaca buruk.
  - b. Paceklik/gagal panen.
  - c. Kredit macet.
  - d. Kurangnya sarana air bersih.
  - e. Terbatasnya transportasi.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, perlu ditentukan akar permasalahan utama dari kedua permasalahan utama yang ada. Menentukan akar permasalahan dapat dilakukan dengan membuat suatu pohon masalah sampai dengan minimal 5 turunan. Untuk menentukan akar permasalahan dalam mengevaluasi program PEMP di Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing dan Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong, maka dibuat pohon masalah sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 4.

Dari hasil pemilihan akar permasalahan dengan menggunakan pohon masalah pada Lampiran 4, dapat dihasilkan beberapa akar permasalahan, yaitu:

Tabel 4.2. Identifikasi Akar Permasalahan pada Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha

No.	Akar Masalah	
	Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing	Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong
1.	Rendahnya ketrampilan dan pengetahuan dalam bidang perikanan	Rendahnya ketrampilan dan pengetahuan dalam bidang perikanan serta sulitnya lapangan pekerjaan
2.	Tidak mempunyai penghasilan karena nelayan tidak dapat melaut, pembudidaya ikan gagal panen, pedagang/pengolah bangkrut	Tidak mempunyai penghasilan karena nelayan tidak dapat melaut, pembudidaya ikan gagal panen, pedagang/pengolah bangkrut
3.	Rendahnya kepemilikan lahan	Rendahnya kepemilikan lahan
4.	DEP koperasi LEPP-M3 tidak bergulir	DEP koperasi LEPP-M3 tidak bergulir
5.	Nasabah tidak bisa membayar karena usahanya gagal (kredit macet terhadap 50 nasabah)	Nasabah tidak bisa membayar karena usahanya gagal (kredit macet terhadap 100 nasabah)
6.	Terbatasnya sumber keuangan	Terbatasnya sumber keuangan
7.	Musim yang tidak menentu	Musim yang tidak menentu
8.	Degradasi sumber daya lingkungan	Degradasi sumber daya lingkungan
9.	Kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah	Kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah
10.	Konsultan Manajemen (KM) Dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) sebagai pendamping teknis dan manajemen usaha tidak ada	Konsultan Manajemen (KM) Dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) sebagai pendamping teknis dan manajemen usaha tidak ada
11.	Tingginya ketergantungan terhadap rentenir	Tingginya ketergantungan terhadap rentenir
12.	Sumber daya perikanan di Laut Jawa sudah mengalami over fishing	Sumber daya perikanan di Laut Jawa sudah mengalami over fishing
13.	-	Akses sumber air bersih yang sulit
14.	-	Prasarana jalan yang buruk, banjir, rob dan berlumpur
15.	-	Transportasi yang sulit
16.	-	Terbatasnya pemasaran terasi dan keinginan memiliki kemasan tersendiri

Dari akar permasalahan yang ada, dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar akar permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu:

1. Tingginya ketergantungan terhadap rentenir.
2. Kelembagaan Koperasi LEPP-M3 belum berperan optimal dalam menangani kredit macet.
3. KM, TPD dan pemda tidak melakukan pembinaan yang intensif terhadap pelaksanaan program PEMP.
4. Peningkatan kualitas SDM di bidang perikanan dan pemasaran hasil perikanan.
5. Meminimalisir dampak dari degradasi sumber daya lingkungan.

Dari ke 5 akar permasalahan besar seperti tersebut diatas, maka ditentukan skala prioritas permasalahan.

#### **4.2 Skala Prioritas Permasalahan**

Berdasarkan akar permasalahan yang diuraikan diatas dan hasil dari Focus Group Discussion (FGD), maka dilakukan identifikasi penentuan prioritas permasalahan pada Swamitra Mina Pantura Jaya yaitu sebagaimana Tabel 4.3. berikut ini:

Tabel 4.3. Identifikasi penentuan prioritas permasalahan pada Swamitra Mina Pantura Jaya

Masalah	Ada Potensi menjadi lebih besar	Kebutuhan mendesak	Frekuensi	Dirasakan banyak orang	Score
Degradasi kualitas lingkungan	Degradasi kualitas lingkungan berpotensi menjadi lebih besar	Kebutuhan yang tidak mendesak	Sepanjang tahun	Dirasakan oleh semua orang	15
Kurangnya pembinaan	Tidak berpotensi menjadi lebih besar	Kebutuhan mendesak	Sepanjang pelaksanaan program	Dirasakan oleh semua anggota Swamitra Mina	20
Kualitas SDM yang rendah	Berpotensi menjadi lebih besar	Kebutuhan mendesak	Sepanjang tahun	Sebagian besar masyarakat pesisir berpendidikan SD	10
Kredit macet	Berpotensi menjadi lebih besar, apabila tidak ditangani	Kebutuhan yang sangat mendesak	Lebih dari 1 bulan, 3-6 bulan, dan lebih dari 6 bulan.	Dirasakan oleh 50 nasabah swamitra mina	30
Rentener	Berpotensi menjadi lebih besar, apabila tidak diberantas	Kebutuhan yang sangat mendesak	Sepanjang tahun	Dirasakan oleh semua anggota Swamitra Mina	25
Jumlah Score					100

Berdasarkan Tabel 4.13. terlihat bahwa sesuai dengan scorenya maka skala prioritas penyelesaian permasalahan pada Swamitra Mina Pantura Jaya adalah sebagai berikut:

1. Kredit macet.
2. Rentener.
3. Kurangnya pembinaan,
4. Degradasi kualitas lingkungan.
5. Kualitas SDM yang rendah.

Sedangkan identifikasi penentuan prioritas permasalahan pada Swamitra Mina Mitra Usaha adalah sebagaimana Tabel 4.4. berikut ini:

Tabel 4.4. Identifikasi penentuan prioritas permasalahan pada Swamitra Mina Mitra Usaha

Masalah	Ada Potensi menjadi lebih besar	Kebutuhan mendesak	Frekuensi	Dirasakan banyak orang	Score
Degradasi kualitas lingkungan	Degradasi kualitas lingkungan berpotensi menjadi lebih besar	Kebutuhan yang tidak mendesak	Sepanjang tahun	Dirasakan oleh semua orang	14
Kurangnya pembinaan	Tidak berpotensi menjadi lebih besar	Kebutuhan mendesak	Sepanjang pelaksanaan program	Dirasakan oleh semua anggota Swamitra Mina	16
Kualitas SDM yang rendah	Berpotensi menjadi lebih besar	Kebutuhan mendesak	Sepanjang tahun	Sebagian besar masyarakat pesisir berpendidikan SD	6
Kredit macet	Berpotensi menjadi lebih besar, apabila tidak ditangani	Kebutuhan yang sangat mendesak	Lebih dari 1 bulan, 3-6 bulan, dan lebih dari 6 bulan.	Dirasakan oleh 100 nasabah swamitra mina	27
Rentenir	Berpotensi menjadi lebih besar, apabila tidak diberantas	Kebutuhan yang sangat mendesak	Sepanjang tahun	Dirasakan oleh semua anggota Swamitra Mina	20
Prasarana jalan rusak dan berlumpur	Berpotensi menjadi lebih besar, apabila tidak diperbaiki	Kebutuhan yang mendesak	Sepanjang tahun	Dirasakan oleh semua masyarakat muara gembong	17
Jumlah Score					100

Berdasarkan Tabel 4.4. terlihat bahwa sesuai dengan scorenya maka skala prioritas penyelesaian permasalahan pada Swamitra Mina Mitra Usaha adalah sebagai berikut:

1. Kredit macet.
2. Rentenir.
3. Prasarana jalan rusak dan berlumpur.
4. Kurangnya pembinaan.
5. Degradasi kualitas lingkungan.
6. Kualitas SDM yang rendah.

### 4.3 Alternatif Solusi

Alternatif solusi dari prioritas permasalahan yang sudah dirumuskan untuk Swamitra Mina Pantura Jaya adalah sebagaimana Tabel 4.15. berikut ini:

Tabel 4.5. Alternatif Solusi dari Prioritas Permasalahan Swamitra Mina Pantura Jaya

No	Masalah	Alternatif Solusi
1.	Kredit macet	Menggunakan fasilitas penyelesaian kredit bermasalah sesuai prosedur kelembagaan yaitu: penagihan intensif oleh LKM dan <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> dan <i>restrukturizing</i> .
2.	Rentenir	a. Meningkatkan akses permodalan kepada masyarakat. b. Menciptakan LKM yang mampu memberi kemudahan akses perkreditan untuk memberantas rentenir. c. Pemberian kredit dengan bunga yang rendah
3.	Kurangnya pembinaan	a. Meningkatkan pembinaan secara intensif dari KKP, Pemda dan instansi terkait lainnya. b. Penempatan KM dan TPD.
4.	Kualitas SDM yang rendah	Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pelatihan, penyuluhan dan pendidikan.
5.	Degradasi kualitas lingkungan	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dengan kaidah kelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan pembinaan.

Berdasarkan Tabel 4.5. maka alternatif solusi penyelesaian masalah pada Swamitra Mina Pantura Jaya adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah kredit macet melalui penagihan intensif oleh LKM dan *rescheduling*.
2. Penyelesaian masalah rentenir melalui peningkatkan akses permodalan kepada masyarakat dengan menciptakan LKM yang mampu memberi kemudahan akses perkreditan dan bunga yang rendah.
3. Pembinaan dilaksanakan secara intensif dari KKP, Pemda dan instansi terkait lainnya, serta penempatan KM dan TPD.
4. Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pelatihan, penyuluhan dan pendidikan.

5. Meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dengan kaidah kelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan pembinaan.

Sementara alternatif solusi dari prioritas permasalahan yang sudah dirumuskan untuk Swamitra Mina Mitra Usaha adalah sebagaimana Tabel 4.16. berikut ini:

Tabel 4.6. Alternatif Solusi dari Prioritas Permasalahan Swamitra Mina Mitra Usaha

No	Masalah	Alternatif Solusi
1.	Kredit macet	Menggunakan fasilitas penyelesaian kredit bermasalah sesuai prosedur kelembagaan yaitu: penagihan intensif oleh LKM dan <i>rescheduling</i> .
2.	Rentenir	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan akses permodalan kepada masyarakat.</li> <li>b. Menciptakan LKM yang mampu memberi kemudahan akses perkreditan untuk memberantas rentenir.</li> <li>c. Pemberian kredit dengan bunga yang rendah.</li> </ol>
3.	Prasarana jalan rusak dan berlumpur	Perbaiki akses jalan yang rusak karena banjir dan ROB.
4.	Kurangnya pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pembinaan secara intensif dari KKP, Pemda dan instansi terkait lainnya.</li> <li>b. Penempatan KM dan TPD.</li> </ol>
5.	Kualitas SDM yang rendah	Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pelatihan, penyuluhan dan pendidikan.
6.	Degradasi kualitas lingkungan	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dengan kaidah kelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan pembinaan.

Berdasarkan Tabel 4.6. maka alternatif solusi penyelesaian masalah pada Swamitra Mina Mitra Usaha adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah kredit macet melalui penagihan intensif oleh LKM dan *rescheduling*.
2. Penyelesaian masalah rentenir melalui peningkatkan akses permodalan kepada masyarakat dengan menciptakan LKM yang mampu memberi kemudahan akses perkreditan dan bunga yang rendah.

3. Perbaiki akses jalan yang rusak karena banjir dan ROB.
4. Pembinaan dilaksanakan secara intensif dari KKP, Pemda dan instansi terkait lainnya, serta penempatan KM dan TPD.
5. Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pelatihan, penyuluhan dan pendidikan.
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dengan kaidah kelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan pembinaan.

Berdasarkan skala prioritas permasalahan dan alternatif solusi, maka perlu dirumuskan strategi yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan tersebut. Dalam rangka menentukan strategi untuk menyelesaikan akar permasalahan, maka diperlukan analisis SWOT, sehingga diharapkan dengan menemukan kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman akan dapat menyelesaikan akar permasalahan secara optimal.

#### **4.4 Analisa SWOT**

Untuk memperoleh gambaran kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta strategi untuk penyelesaian akar permasalahan pada program PEMP dan pengembangan sektor perikanan, maka perlu dilakukan analisa SWOT (*Strength, Weakness, opportunity, Threath*) dengan terlebih dahulu menyusun matriks identifikasi SWOT berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Kategori dalam matriks identifikasi dibagi menurut potensi yang ada di Kecamatan Cilincing yaitu potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada, potensi kelembagaan dan sosial budaya masyarakat cilincing.

##### **4.4.1. Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing**

###### **4.4.1.1. Identifikasi SWOT**

Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada operasional kegiatan Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Matrik Identifikasi SWOT pada Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing

No.	Aspek yang diteliti	Faktor Internal		Faktor Eksternal	
		Kekuatan ( <i>Strength</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	Peluang ( <i>opportunity</i> )	Ancaman ( <i>Threath</i> )
1.	SDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geologis</li> <li>2. Luas daerah</li> </ol>	-	Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iklim (cuaca yang buruk)</li> <li>2. SDP di L. Jawa sudah overfishing</li> <li>3. Degradasi sumber daya lingkungan</li> </ol>
2.	SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat yang heterogen</li> <li>2. Populasi masyarakat pesisir yang besar</li> <li>3. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan relatif berimbang (50,95% dan 49,04%)</li> <li>4. Kepadatan penduduk rata-rata 64 jiwa/ha.</li> <li>5. Mata pencahariannya nalayan, pembudidaya, pengolahan, pedagang ikan</li> <li>6. Usaha sampingan yaitu warung sembako</li> </ol>	Tingkat pendidikan rendah (15,12% adalah tidak bersekolah dan 19,13% tidak tamat SD)	-	Penduduk yang bersifat sementara (nomaden).
3.	Sarpras	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasinya strategis, dekat pelabuhan Tg. Priok</li> <li>2. Prasarana jalan dan jembatan sudah memadai sehingga mempermudah akses</li> <li>3. Sarana pendidikan sudah cukup layak</li> <li>4. Sarana kesehatan sudah cukup memadai</li> <li>5. TPI masih operasional</li> <li>6. Banyak pasar yaitu Pasar ikan asin, pasar jongkok berkah, dan pasar ikan basah</li> </ol>	Jalan sering banjir	-	-

(Sambungan Tabel 4.7)

No.	Aspek yang diteliti	Faktor Internal		Faktor Eksternal	
		Kekuatan ( <i>Strength</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	Peluang ( <i>opportunity</i> )	Ancaman ( <i>Threath</i> )
4.	Sumber daya kelembagaan	Koperasi LEPP-M3	1. Kurangnya pembinaan dan bimbingan dari Pemda dan KKP 2. KM dan TPD tidak ada	1. LKM 2. Dukungan anggaran dari pemerintah	1. Kredit macet 2. Rentenir
5.	Sosial budaya	Berasal dari suku yang berbeda	Perilaku/gaya hidup yang konsumtif	-	-

Berdasarkan matrik identifikasi SWOT pada Tabel 4.7. didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Faktor internal dari segi kekuatan/*strength* adalah:
  - a. Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari endapan *pleistocene* yang terdapat pada  $\pm 50$  meter di bawah permukaan tanah.
  - b. Luas wilayah cilincing adalah 3.970 ha, dengan peruntukannya sebagai perumahan, industri, kantor dan gudang, pertanian, dan pertambakan.
  - c. Masyarakat yang heterogen berasal dari suku yang berbeda yaitu Indramayu, Kerawang dan Cirebon.
  - d. Populasi masyarakat pesisir yang besar, jumlahnya sekitar 1.700 orang.
  - e. Lokasinya yang strategis, dekat dengan pelabuhan tanjung priok.
  - f. Keberadaan Koperasi LEPP-M3 yang merupakan lembaga yang sudah berbadan hukum koperasi.
2. Faktor internal dari segi kelemahan/*weakness* adalah:
  - a. Tingkat pendidikan masyarakat cilincing relatif rendah, rata-rata hanya lulusan sekolah dasar.
  - b. Jalan sering banjir karena cuaca yang buruk dan degradasi kualitas tanah.
  - c. Kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah dalam pelaksanaan program PEMP.
  - d. Perilaku/gaya hidup masyarakat pesisir yang konsumtif.

3. Faktor eksternal dari segi peluang/*opportunity* adalah:
  - a. Kebijakan pemerintah yaitu program penanggulangan/pengentasan kemiskinan yang merupakan prioritas pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - b. Kegiatan pelatihan dan bimbingan dalam rangka peningkatan ketrampilan dan pengetahuan di bidang kelautan dan perikanan.
  - c. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibutuhkan masyarakat pesisir dalam pemberian bantuan kredit usaha.
  - d. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
4. Faktor eksternal dari segi ancaman/*threat* adalah:
  - k. Iklim (cuaca yang buruk/musim yang tidak menentu) membuat nelayan tidak bisa melaut dan usaha di bidang perikanan lainnya mengalami kegagalan.
  - l. Sumber daya perikanan di Laut Jawa sudah mengalami *overfishing* (tangkap berlebih) menyebabkan nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan, sehingga berpengaruh pula terhadap pengolah hasil perikanan dan pedagang/bakul ikan tidak dapat melakukan usahanya.
  - m. Degradasi sumber daya lingkungan menyebabkan pembudidaya ikan gagal panen.
  - n. Kredit macet disebabkan oleh para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan pedagang/bakul ikan yang gagal usahanya sehingga mereka tidak bisa membayar cicilan pinjamannya.
  - o. Keberadaan rentenir, dibutuhkan masyarakat pesisir karena pemberian pinjamannya bisa kapan saja, dan tidak membutuhkan persyaratan (agunan) yang rumit, walaupun dengan bunga yang tinggi.

#### 4.4.1.2. Matrik IFAS dan EFAS

*Internal Strategic Factors Analysis Summary* (IFAS) atau Sistem Analisis Faktor Strategi Internal pada Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing adalah seperti terlihat pada Tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8. Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)/(Sistem Analisis Faktor Strategi Internal) Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing

<b>Faktor-faktor Strategi Internal</b>	<b>Bobot</b>	<b>Urgensi</b>	<b>Bobot Urgensi (2x3)</b>	<b>Ket.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Strength/Kekuatan (S)</b>				
1.Geologis wilayah cilincing.	12	4	0.48	
2.Luas wilayah cilincing.	10	3	0.3	
3.Masyarakat yang heterogen berasal dari berbagai suku.	9	3	0.27	
4.Populasi masyarakat pesisir yang besar.	8	4	0.32	
5.Lokasi yang strategis.	14	4	0.56	
6.Keberadaan Koperasi LEPP-M3.	13	4	0.52	
<b>Sub Jumlah (1)</b>	<b>66</b>		<b>2.45</b>	
<b>Weakness/Kelemahan (W)</b>				
1.Tingkat pendidikan rendah.	9	3	0.27	
2.Jalan sering banjir.	12	4	0.48	
3.Kurangnya pembinaan dan bimbingan.	7	3	0.21	
4.Perilaku/gaya hidup yang konsumtif.	6	2	0.12	
<b>Sub Jumlah (2)</b>	<b>34</b>		<b>1.08</b>	
<b>Total (1+2)</b>	<b>100</b>		<b>3.53</b>	

Sumber: Hasil rata-rata pendapat responden.

**Catatan:**

Makin besar bobot makin gawat permasalahan, makin besar urgensi makin segera harus dilaksanakan (menyangkut soal waktu).

Sedangkan *External Strategic Factors Analysis Summary* (EFAS) atau Sistem Analisis Faktor Strategi Eksternal pada Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9 External Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)/(Sistem Analisis Faktor Strategi Eksternal) Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Urgensi	Bobot Urgensi (2x3)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Opportunity/Peluang (O)</b>				
1. Kebijakan pemerintah.	11	3	0.33	
2. Pelatihan dan bimbingan.	12	3	0.36	
3. Keberadaan LKM.	14	4	0.56	
4. Dukungan anggaran dari pemerintah	14	4	0.56	
<b>Sub Jumlah (1)</b>	<b>51</b>		<b>1.81</b>	
<b>Threat/Ancaman (T)</b>				
1. Iklim.	12	2	0.24	
2. SDP di L. Jawa sudah <i>overfishing</i> .	10	3	0.3	
3. Degradasi SD Lingkungan.	8	3	0.24	
4. Kredit macet.	10	4	0.4	
5. Keberadaan Rentenir.	9	4	0.36	
<b>Sub Jumlah (2)</b>	<b>49</b>		<b>1.54</b>	
<b>Total (1+2)</b>	<b>100</b>		<b>3.35</b>	

Sumber: Hasil rata-rata pendapat responden.

**Catatan:**

Makin besar bobot makin gawat permasalahan, makin besar urgensi makin segera harus dilaksanakan (menyangkut soal waktu).

#### 4.4.1.3. Alternatif Strategi Jangka Pendek

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kekuatan dan kelemahan internal dari program PEMP dapat disesuaikan dengan peluang dan ancaman eksternal (IFAS dan EFAS), dan bagaimana di dalam memilih strategi yang akan diambil maka disusun matrik SWOT yang dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10 Matrik SWOT Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing untuk Jangka Pendek

IFAS EFAS	Kekuatan (S): 1. Geologis wilayah cilincing. 2. Luas wilayah cilincing. 3. Masyarakat yang heterogen berasal dari berbagai suku. 4. Populasi masyarakat pesisir yang besar. 5. Lokasi yang strategis. 6. Keberadaan Koperasi LEPP-M3.	Kelemahan (W): 1. Tingkat pendidikan rendah. 2. Jalan sering banjir. 3. Kurangnya pembinaan dan bimbingan. 4. Perilaku/gaya hidup yang konsumtif.
Peluang (O): 1. Kebijakan pemerintah. 2. Pelatihan dan bimbingan. 3. Keberadaan LKM. 4. Dukungan anggaran dari pemerintah	SO (4,26)	WO (2,89)
Ancaman (T): 1. Iklim. 2. SDP di L. Jawa sudah <i>overfishing</i> . 3. Degradasi SD Lingkungan. 4. Kredit macet. 5. Keberadaan Rentenir.	ST (3,99)	WT (2,62)

Sumber: Hasil Pendapat Responden.

Dari hasil penyusunan matrik SWOT pada Tabel 4.10. tersebut yang berdasarkan nilai pembobotan dari *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *External Factor Analysis Summary* (EFAS), diketahui bahwa strategi yang mempunyai nilai paling besar untuk jangka pendek adalah strategi *strength opportunity* (SO) sebesar 4,26 ini berarti strategi yang sebaiknya diambil oleh pemerintah dalam jangka pendek yaitu strategi yang menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunity*).

Interaksi SWOT untuk memilih strategi SO dengan bobot 4,26 sebagai strategi terpilih karena bobotnya terbesar. Strategi ini menjadi strategi jangka pendek, kemudian strategi ST dengan bobot 3,99 sebagai strategi pendek menengah, strategi WO dengan bobot 2,89 sebagai strategi menengah panjang dan strategi WT dengan bobot 2,62 sebagai strategi jangka panjang.

#### 4.4.1.4. Analisis SWOT

Berdasarkan identifikasi SWOT sebagaimana diuraikan diatas, maka dilakukan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 4.11. Hasil Analisis SWOT Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing

IFAS	<b>Kekuatan (S):</b> 1. Geologis wilayah cilincing. 2. Luas wilayah cilincing. 3. Masyarakat yang heterogen berasal dari berbagai suku. 4. Populasi masyarakat pesisir yang besar. 5. Lokasi yang strategis. 6. Keberadaan Koperasi LEPP-M3.	<b>Kelemahan (W):</b> 1. Tingkat pendidikan rendah. 2. Jalan sering banjir. 3. Kurangnya pembinaan dan bimbingan. 4. Perilaku/gaya hidup yang konsumtif.
EFAS	<b>Strategi SO:</b> a. Pengembangan program PEMP. b. Menciptakan LKM yang mampu memberi kemudahan akses perkreditan. c. Meningkatkan akses permodalan kepada masyarakat pesisir.	<b>Strategi WO:</b> a. Meningkatkan pembinaan secara intensif dari KKP dan instansi terkait lainnya. b. Dukungan Pemda. c. Penempatan KM dan TPD. d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, penyuluhan dan pendidikan di bidang perikanan.
<b>Peluang (O):</b> 1. Kebijakan pemerintah. 2. Pelatihan dan bimbingan. 3. Keberadaan LKM. 4. Dukungan anggaran dari pemerintah	<b>Ancaman (T):</b> 1. Iklim. 2. SDP di L. Jawa sudah <i>overfishing</i> . 3. Degradasi SD Lingkungan. 4. Kredit macet. 5. Keberadaan Rentenir.	<b>Strategi ST:</b> a. Menggunakan fasilitas penyelesaian kredit bermasalah sesuai prosedur kelembagaan yaitu: rescheduling, reconditioning dan restrukturisasi. b. Pemberian kredit dari Bank dengan bunga yang rendah.
	<b>Strategi WT:</b> Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dengan kaidah kelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan pembinaan.	

Sumber: Hasil Analisis.

Dari hasil analisis menggunakan matrik SWOT terhadap identifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta lingkungan eksternal yang meliputi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka diketahui bahwa strategi yang dipilih untuk jangka pendek adalah strategi SO yaitu strategi yang menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunity*). Selanjutnya strategi ST sebagai strategi pendek menengah, strategi WO sebagai strategi menengah panjang dan strategi WT sebagai strategi jangka panjang. Namun strategi SO tersebut (begitu juga dengan Strategi S-T, W-O, dan W-T) masih merupakan strategi yang bersifat umum/general dan harus dijabarkan lagi ke dalam langkah-langkah atau strategi kecil yang akan diimplementasikan lebih lanjut dalam bentuk rencana tindakan (*action plan*).

#### 4.4.2. Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong

##### 4.4.2.1. Identifikasi SWOT

Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada operasional kegiatan Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12. Matrik Identifikasi SWOT pada Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong

No.	Aspek yang diteliti	Faktor Internal		Faktor Eksternal	
		Kekuatan ( <i>Strength</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	Peluang ( <i>opportunity</i> )	Ancaman ( <i>Threath</i> )
1.	SDA	1. Topografi 2. Luas daerah	-	Kebijakan pemerintah	1. Iklim (cuaca yang buruk) 2. SDP di L. Jawa sudah overfishing 3. Degradasi sumber daya lingkungan
2.	SDM	1. Masyarakat pesisir yang heterogen 2. Populasi masyarakat pesisir yang besar	Tingkat pendidikan rendah	-	-
3.	SD sarpras	-	1. Lokasinya jauh 2. Jalan rusak (transportasi sulit) 3. Sumber air bersih yang sulit 4. Banjir 5. Rob 6. Berlumpur	-	-
4.	Sumber daya kelembagaan	Koperasi LEPP-M3	Kurangnya pembinaan dan bimbingan	1. LKM 2. Dukungan anggaran dari pemerintah	1. Kredit macet 2. Rentenir
5.	Sosial budaya	Berasal dari suku yang berbeda	Perilaku/gaya hidup yang konsumtif	-	-

Berdasarkan matrik identifikasi SWOT pada Tabel 4.9. didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Faktor internal dari segi kekuatan/*strength* adalah:
  - a. Topografi Kecamatan Muara Gembong pada umumnya adalah dataran dengan *evaluation* 0-5<sup>o</sup> dengan ketinggian dari permukaan laut  $\pm$  0,74 meter.
  - b. Luas wilayah Muara Gembong adalah 14.009 ha, dengan peruntukannya sebagai perumahan, pertanian, dan pertambakan.
  - c. Masyarakat yang heterogen dari berbagai etnis dan terdapat penduduk yang bersifat sementara (nomaden).
  - d. Populasi masyarakat pesisir yang besar, jumlahnya sekitar 36.138 jiwa.
  - e. Keberadaan Koperasi LEPP-M3 yang merupakan lembaga yang sudah berbadan hukum koperasi.
2. Faktor internal dari segi kelemahan/*weakness* adalah:
  - a. Tingkat pendidikan masyarakat muara gembong relatif rendah, didominasi oleh lulusan sekolah dasar mencapai 73,25%.
  - b. Jarak tempuh dari Kecamatan Muara Gembong sampai dengan Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi mencapai 79 km sekitar 2,5 jam perjalanan dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.
  - c. Jalan rusak karena sering banjir/rob, cuaca yang buruk, degradasi kualitas tanah, dan jalan yang berlumpur yang menyebabkan transportasi menjadi sulit.
  - d. Sumber air bersih yang sulit didapat oleh masyarakat muara gembong.
  - e. Kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah dalam pelaksanaan program PEMP.
  - f. Perilaku/gaya hidup masyarakat pesisir yang konsumtif.
3. Faktor eksternal dari segi peluang/*opportunity* adalah:
  - a. Kebijakan pemerintah yaitu program penanggulangan/pengentasan kemiskinan yang merupakan prioritas pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- b. Kegiatan pelatihan dan bimbingan dalam rangka peningkatan ketrampilan dan pengetahuan di bidang kelautan dan perikanan.
  - c. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibutuhkan masyarakat pesisir dalam pemberian bantuan kredit usaha.
  - d. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
4. Faktor eksternal dari segi ancaman/*threat* adalah:
- a. Iklim (cuaca yang buruk/musim yang tidak menentu) membuat nelayan tidak bisa melaut dan usaha di bidang perikanan lainnya mengalami kegagalan.
  - b. Sumber daya perikanan di Laut Jawa sudah mengalami *overfishing* (tangkap berlebih) menyebabkan nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan, sehingga berpengaruh pula terhadap pengolah hasil perikanan dan pedagang/bakul ikan tidak dapat melakukan usahanya.
  - c. Degradasi sumber daya lingkungan menyebabkan pembudidaya ikan gagal panen.
  - d. Kredit macet disebabkan oleh para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan pedagang/bakul ikan yang gagal usahanya sehingga mereka tidak bisa membayar cicilan pinjamannya.
  - e. Keberadaan rentenir, dibutuhkan masyarakat pesisir karena pemberian pinjamannya bisa kapan saja, dan tidak membutuhkan persyaratan (agunan) yang rumit, walaupun dengan bunga yang tinggi.

#### 4.4.2.2. Matrik IFAS dan EFAS

*Internal Strategic Factors Analysis Summary* (IFAS) atau Sistem Analisis Faktor Strategi Internal pada Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong adalah seperti terlihat pada Tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13. Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)/(Sistem Analisis Faktor Strategi Internal) Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong

<b>Faktor-faktor Strategi Internal</b>	<b>Bobot</b>	<b>Urgensi</b>	<b>Bobot Urgensi (2x3)</b>	<b>Ket.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Strength/Kekuatan (S)</b>				
1. Topologi wilayah muara gembong.	10	4	0.4	
2. Luas wilayah muara gembong.	11	3	0.33	
3. Masyarakat yang heterogen berasal dari berbagai etnis dan nomaden.	9	3	0.27	
4. Populasi masyarakat pesisir yang besar.	8	4	0.32	
5. Keberadaan Koperasi LEPP-M3.	14	4	0.56	
<b>Sub Jumlah (1)</b>	<b>52</b>		<b>1.88</b>	
<b>Weakness/Kelemahan (W)</b>				
1. Tingkat pendidikan rendah.	9	3	0.27	
2. Lokasi yang jauh dari pusat kota.	12	4	0.48	
3. Jalan sering banjir, rusak dan berlumpur	10	3	0.3	
4. Sumber air bersih sulit.	6	2	0.12	
5. Kurangnya pembinaan dan bimbingan.	6	2	0.12	
6. Perilaku/gaya hidup yang konsumtif.	5	2	0.1	
<b>Sub Jumlah (2)</b>	<b>48</b>		<b>1.39</b>	
<b>Total (1+2)</b>	<b>100</b>		<b>3.27</b>	

Sumber: Hasil rata-rata pendapat responden.

**Catatan:**

Makin besar bobot makin gawat permasalahan, makin besar urgensi makin segera harus dilaksanakan (menyangkut soal waktu).

Sedangkan *External Strategic Factors Analysis Summary* (EFAS) atau Sistem Analisis Faktor Strategi Eksternal pada Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong dapat dilihat pada Tabel 4.14. berikut ini:

Tabel 4.14. External Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)/(Sistem Analisis Faktor Strategi Eksternal) Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong

Faktor-faktor Strategi Eksternal	Bobot	Urgensi	Bobot Urgensi (2x3)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Opportunity/Peluang (O)</b>				
1. Kebijakan pemerintah.	11	3	0.33	
2. Pelatihan dan bimbingan.	10	3	0.3	
3. Keberadaan LKM.	15	4	0.6	
4. Dukungan anggaran dari pemerintah	13	4	0.52	
<b>Sub Jumlah (1)</b>	<b>49</b>		<b>1.75</b>	
<b>Threat/Ancaman (T)</b>				
1. Iklim.	9	2	0.18	
2. SDP di L. Jawa sudah <i>overfishing</i> .	9	3	0.27	
3. Degradasi SD Lingkungan.	8	3	0.24	
4. Kredit macet.	13	4	0.52	
5. Keberadaan Rentenir.	12	4	0.48	
<b>Sub Jumlah (2)</b>	<b>51</b>		<b>1.69</b>	
<b>Total (1+2)</b>	<b>100</b>		<b>3.44</b>	

Sumber: Hasil rata-rata pendapat responden.

**Catatan:**

Makin besar bobot makin gawat permasalahan, makin besar urgensi makin segera harus dilaksanakan (menyangkut soal waktu).

4.4.2.3. Alternatif Strategi Jangka Pendek

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kekuatan dan kelemahan internal dari program PEMP dapat disesuaikan dengan peluang dan ancaman eksternal (IFAS dan EFAS), dan bagaimana di dalam memilih strategi yang akan diambil maka disusun matrik SWOT yang dapat dilihat pada Tabel 4.15. berikut ini:

Tabel 4.15. Matrik SWOT Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing untuk Jangka Pendek

IFAS           EFAS	<b>Kekuatan (S):</b> 1. Topologi wilayah muara gembong. 2. Luas wilayah muara gembong.  3. Masyarakat yang heterogen berasal dari berbagai etnis dan nomaden. 4. Populasi masyarakat pesisir yang besar. 5. Keberadaan Koperasi LEPP-M3.	<b>Kelemahan (W):</b> 1. Tingkat pendidikan rendah. 2. Lokasi yang jauh dari pusat kota. 3. Jalan sering banjir, rusak dan berlumpur 4. Sumber air bersih sulit. 5. Kurangnya pembinaan dan bimbingan. 6. Perilaku/gaya hidup yang konsumtif.
<b>Peluang (O):</b> 1. Kebijakan pemerintah. 2. Pelatihan dan bimbingan. 3. Keberadaan LKM. 4. Dukungan anggaran dari pemerintah	<b>SO</b> (3,63)	<b>WO</b> (3,14)
<b>Ancaman (T):</b> 1. Iklim. 2. SDP di L. Jawa sudah <i>overfishing</i> . 3. Degradasi SD Lingkungan. 4. Kredit macet. 5. Keberadaan Rentenir.	<b>ST</b> (3,57)	<b>WT</b> (3,08)

Sumber: Hasil Pendapat Responden.

Dari hasil penyusunan matrik SWOT pada Tabel 4.15. tersebut yang berdasarkan nilai pembobotan dari *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *External Factor Analysis Summary* (EFAS), diketahui bahwa strategi yang mempunyai nilai paling besar untuk jangka pendek adalah strategi *strength opportunity* (SO) sebesar 3,63 ini berarti strategi yang sebaiknya diambil oleh pemerintah dalam jangka pendek yaitu strategi yang menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunity*).

Interaksi SWOT untuk memilih strategi SO dengan bobot 3,63 sebagai strategi terpilih karena bobotnya terbesar. Strategi ini menjadi strategi jangka pendek, kemudian strategi ST dengan bobot 3,57 sebagai strategi pendek

menengah, strategi WO dengan bobot 3,14 sebagai strategi menengah panjang dan strategi WT dengan bobot 3,08 sebagai strategi jangka panjang.

#### 4.4.2.4. Analisis SWOT

Berdasarkan identifikasi SWOT sebagaimana diuraikan diatas, maka dilakukan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 4.16. Hasil Analisis SWOT Swamitra Mina Mitra Usaha

<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p><b>Kekuatan (S):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topologi wilayah muara gembong.</li> <li>2. Luas wilayah muara gembong.</li> <li>3. Masyarakat yang heterogen berasal dari berbagai etnis dan nomaden.</li> <li>4. Populasi masyarakat pesisir yang besar.</li> <li>5. Keberadaan Koperasi LEPP-M3.</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (W):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pendidikan rendah.</li> <li>2. Lokasi yang jauh dari pusat kota.</li> <li>3. Jalan sering banjir, rusak dan berlumpur</li> <li>4. Sumber air bersih sulit.</li> <li>5. Kurangnya pembinaan dan bimbingan.</li> <li>6. Perilaku/gaya hidup yang konsumtif.</li> </ol>
<p><b>Peluang (O):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pemerintah.</li> <li>2. Pelatihan dan bimbingan.</li> <li>3. Keberadaan LKM.</li> <li>4. Dukungan anggaran dari pemerintah</li> </ol>	<p><b>Strategi SO:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan program PEMP.</li> <li>b. Meningkatkan akses permodalan kepada masyarakat pesisir.</li> <li>c. Menciptakan LKM yang mampu memberi kemudahan akses perkreditan.</li> </ol>	<p><b>Strategi WO:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pembinaan secara intensif dari KKP dan instansi terkait lainnya.</li> <li>b. Dukungan pemerintah daerah melalui penempatan KM dan TPD.</li> <li>c. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, penyuluhan dan pendidikan di bidang perikanan.</li> <li>d. Perbaiki akses jalan yang rusak karena banjir dan ROB.</li> </ol>
<p><b>Ancaman (T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iklim.</li> <li>2. SDP di L. Jawa sudah <i>overfishing</i>.</li> <li>3. Degradasi SD Lingkungan.</li> <li>4. Kredit macet.</li> <li>5. Keberadaan Rentenir.</li> </ol>	<p><b>Strategi ST:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan fasilitas penyelesaian kredit bermasalah sesuai prosedur kelembagaan yaitu: penagihan intensif oleh LKM dan rescheduling, reconditioning dan restrukturisasi.</li> <li>b. Pemberian kredit dari Bank dengan bunga yang rendah.</li> </ol>	<p><b>Strategi WT:</b></p> <p>Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dengan kaidah kelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan pembinaan.</p>

Sumber: Hasil Analisis.

Dari hasil analisis menggunakan matrik SWOT terhadap identifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta lingkungan eksternal yang meliputi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threath*) sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka strategi yang dipilih untuk jangka pendek adalah strategi SO yaitu strategi yang menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunity*). Selanjutnya menggunakan strategi ST sebagai strategi jangka pendek menengah, strategi WO sebagai strategi jangka menengah panjang dan strategi WT sebagai strategi jangka panjang. Namun strategi SO tersebut (begitu juga dengan Strategi S-T, W-O, dan W-T) masih merupakan strategi yang bersifat umum/general dan harus dijabarkan lagi ke dalam langkah-langkah atau strategi kecil yang akan diimplementasikan lebih lanjut dalam bentuk rencana tindakan (*action plan*).

#### **4.5 Analisa Kualitatif**

Berdasarkan uraian diatas tentang identifikasi permasalahan pada masyarakat Cilincing dan Muara Gembong yang dianalisis dengan analisis SWOT dan sesuai dengan teori-teori yang diuraikan pada Bab II, maka didapatkan hasil analisa bahwa kemiskinan yang melanda masyarakat pesisir Cilincing dan Muara Gembong merupakan kemiskinan struktural. Menurut Nikijuluw (2001) kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Kemiskinan tersebut melanda sebagian dari mereka yang mempunyai mata pencaharian nelayan, pengolah ikan, pedagang ikan dan pembudidaya ikan. Hal ini karena mata pencaharian mereka tergantung dari alam/laut, yang diperparah dengan kondisi cuaca saat ini yang buruk dengan musim yang tidak menentu membuat nelayan sulit untuk melaut, sehingga pendapatannya tidak memadai untuk kebutuhan sehari-hari.

Dan berdasarkan kajian Smith (1979) tentang pembangunan perikanan di berbagai negara Asia serta Anderson (1979) yang menyimpulkan bahwa kekakuan aset perikanan (*fixity and rigidity of fishing assets*) adalah alasan utama kenapa

nelayan tetap tinggal atau bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset tersebut adalah karena sifat aset perikanan yang begitu rupa sehingga sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain. Akibatnya pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nelayan tidak mampu untuk mengalih fungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Karena itu, meskipun rendah produktivitasnya, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis. Dari masa ke masa, pergulatan masyarakat nelayan melawan ketidakpastian kehidupan, khususnya bagi mereka yang melakukan penangkapan di wilayah perairan yang sudah dalam keadaan lebih tangkap (*overfishing*). Penantian panjang untuk menuai kesejahteraan hidup yang lebih baik setelah kebijakan modernisasi perikanan diberlakukan juga tidak kunjung tiba. Lebih dari itu, kemiskinan di kampung nelayan menjadi fenomena umum yang banyak terjadi. Berbagai studi menunjukkan fenomena kemiskinan di desa-desa pesisir pantai.

Kondisi kemiskinan inilah yang ingin ditumpas KKP melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Dengan visinya adalah: "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan". Peran KKP tersebut seiring dengan peran Kementerian Sosial yang mempunyai tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Namun pada kenyataannya bahwa, berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan kegiatan Swamitra Mina terhadap pengelolaan program dan penanganan kredit bermasalah, yaitu pada Swamitra Mina Pantura Jaya di Cilincing lebih berhasil daripada Swamitra Mina Mitra Usaha di Muara Gembong. Hal ini ditunjukkan bahwa program PEMP di cilincing memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dan mereka mempunyai kesadaran untuk bertanggung jawab mengembalikan pinjaman serta

pembinaan yang baik dari pengurus swamitra mina, walaupun terdapat permasalahan yaitu ada beberapa nasabah yang mengalami kredit bermasalah khususnya nasabah yang bermata pencaharian nelayan dan pengolah hasil perikanan. Penanganan masalah melalui penagihan secara intensif setiap hari oleh petugas swamitra mina yang datang ke rumah-rumah nasabah yang mengalami kredit bermasalah. Sementara program PEMP di muara gembong belum optimal meningkatkan pendapatan masyarakat dan belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Kredit bermasalah yang terjadi belum dapat diselesaikan oleh Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong, sebagian besar nasabahnya tidak bisa membayar cicilan pinjamannya karena mereka mengalami kegagalan dalam usahanya, dan dengan kondisi prasarana jalan yang rusak menyulitkan pengurus untuk melakukan penagihan dan pembinaan, hal ini terjadi sejak awal tahun 2010, sehingga harus mendapatkan perhatian yang lebih dari KKP agar dapat melanjutkan program PEMP tersebut dan Swamitra Mina Mitra Usaha dapat terus melakukan kegiatannya.

#### **4.6 Solusi Terbaik**

Berdasarkan analisis SWOT terhadap alternatif solusi untuk menentukan solusi terbaik dari prioritas penyelesaian permasalahan untuk jangka pendek adalah menggunakan strategi SO yaitu strategi yang menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunity*), strategi ini merupakan solusi terbaik yang diambil dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Cilincing dan Muara Gembong, agar pelaksanaan Swamitra Mina Pantura Jaya Cilincing menjadi lebih bagus dan Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong dapat berjalan lebih baik, yaitu:

1. Pengembangan program PEMP.
2. Meningkatkan akses permodalan kepada masyarakat pesisir, khususnya pada Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong harus mendapatkan perhatian yang lebih dari KKP.
3. Menciptakan LKM yang mampu memberi kemudahan akses perkreditan dan pemberian kredit dari Bank dengan bunga yang rendah untuk memberantas rentenir.

4. Menggunakan fasilitas penyelesaian kredit bermasalah sesuai prosedur kelembagaan yaitu: *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restrukturing*.

Berdasarkan uraian diatas diperlukan rekomendasi yang akan diimplementasikan lebih lanjut dalam bentuk rencana tindakan (*action plan*).



## BAB 5

### REKOMENDASI SKENARIO *ACTION PLAN*

#### 5.1. Kesimpulan

Program PEMP yang diberikan KKP kepada masyarakat cilincing pada tahun 2004 dan 2005 berjalan optimal dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sementara untuk masyarakat muara gembong, program diberikan pada tahun 2005 dan 2006, tidak berjalan optimal dan saat ini mengalami kegagalan serta tidak mempunyai dampak terhadap peningkatan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Cuaca yang buruk merupakan penyebab dari kegagalan tersebut, nelayan di cilincing dan muara gembong tidak bisa melaut sehingga mereka tidak mempunyai penghasilan dan tidak bisa membayar cicilan pinjamannya, permasalahan yang timbul adalah kredit macet, disisi lain masyarakat masih tergantung dengan rentenir.

Dan berdasarkan tujuan penelitian dengan mengidentifikasi permasalahan yang diselesaikan dengan analisa SWOT sebagaimana diuraikan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan program PEMP pada kegiatan Swamitra Mina Pantura Jaya dan Mitra Usaha adalah:
  - a. Program PEMP merupakan kebijakan pemerintah yaitu program penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan sebagai prioritas pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - b. Keberadaan Koperasi LEPP-M3 yang merupakan lembaga yang sudah berbadan hukum koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), merupakan lembaga-lembaga yang sangat dibutuhkan masyarakat pesisir dalam pemberian bantuan kredit usaha.
  - c. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program PEMP, yang menyebabkan program tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuan program adalah sebagai berikut:
  - a. Iklim (cuaca yang buruk/musim yang tidak menentu) membuat nelayan tidak bisa melaut dan usaha di bidang perikanan lainnya mengalami kegagalan, sehingga membuat mereka tidak bisa membayar cicilan pinjamannya.
  - b. Sumber daya perikanan di Laut Jawa sudah mengalami *overfishing* (tangkap berlebih) menyebabkan nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan, sehingga berpengaruh pula terhadap pengolah hasil perikanan dan pedagang/bakul ikan tidak dapat melakukan usahanya.
  - c. Degradasi sumber daya lingkungan menyebabkan pembudidaya ikan gagal panen.
  - d. Kredit bermasalah/macet disebabkan oleh para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan pedagang/bakul ikan yang gagal usahanya sehingga mereka tidak bisa membayar cicilan pinjamannya.
  - e. Keberadaan rentenir, dibutuhkan masyarakat pesisir karena pemberian pinjamannya bisa kapan saja, dan tidak membutuhkan persyaratan (agunan) yang rumit, walaupun dengan bunga yang tinggi.
  - f. Kurangnya pembinaan dari pemerintah dalam pelaksanaan program PEMP yaitu tidak adanya pendampingan teknis dan manajemen usaha dari KM dan TPD.
  - g. Di Muara Gembong tidak ada TPI yang berfungsi sebagai pusat suplayer dan distribusi hasil tangkapan sehingga *collector* mengambil angsuran dari rumah ke rumah yang posisinya saling berjauhan.
  - h. Pada saat musim hujan, swamitra mitra usaha mendapat hambatan untuk pengambilan angsuran pinjaman atau simpanan masyarakat karena fasilitas jalan yang kurang memadai (tanah berlumpur-liat/daerah pertambakan).

3. Dampak program PEMP terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Cilincing dan Muara Gembong adalah sebagai berikut:
  - a. Program PEMP di cilincing sudah berjalan optimal dan memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, hal ini ditunjukkan oleh pendapatan para nasabahnya yang meningkat dan mereka mempunyai kesadaran bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman, mereka dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, kondisi rumahnya sudah bagus sebagian besar sudah ber dinding tembok dan berlantai keramik, kesehatan dan kebutuhan pangan sudah cukup, walaupun masih terdapat permasalahan yaitu ada beberapa nasabah yang mengalami kredit bermasalah khususnya nasabah yang bermata pencaharian nelayan dan pengolah hasil perikanan.
  - b. Sementara program PEMP di muara gembong mengalami kegagalan, dan belum berjalan optimal. Kegiatan tersebut belum berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kredit bermasalah yang terjadi belum dapat diselesaikan oleh Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong, sebagian besar nasabahnya tidak bisa membayar cicilan pinjamannya karena mereka mengalami kegagalan dalam usahanya, dan dengan kondisi prasarana jalan yang rusak menyulitkan pengurus untuk melakukan penagihan dan pembinaan, hal ini terjadi sejak awal tahun 2010, sehingga harus mendapatkan perhatian yang lebih dari KKP agar dapat melanjutkan program PEMP tersebut dan Swamitra Mina Mitra Usaha dapat terus melakukan kegiatannya.
4. Selanjutnya akan dilakukan penyusunan suatu skenario *action plan* untuk memberikan masukan/rekomendasi sebagai perbaikan program di 2 swamitra mina tersebut.

## 5.2. Rekomendasi

Berdasarkan penetapan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi Swamitra Mina Pantura Jaya dan Mitra Usaha, maka rekomendasi untuk jangka pendek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP).
2. Meningkatkan akses permodalan kepada masyarakat pesisir, khususnya pada Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong harus mendapatkan perhatian yang lebih dari KKP.
3. Menciptakan LKM yang mampu memberi kemudahan akses perkreditan dan pemberian kredit dari Bank dengan bunga yang rendah untuk memberantas rentenir.
4. Menggunakan fasilitas penyelesaian kredit bermasalah sesuai prosedur kelembagaan yaitu: *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restrukturing*.

Selanjutnya skenario *action plan* yang direkomendasikan pada penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu implementasi rencana kerja jangka pendek (menggunakan strategi SO), jangka menengah (menggunakan strategi ST dan WO), dan jangka panjang (menggunakan strategi WT) yang diuraikan sebagai berikut:

### 5.2.1. Implementasi Rencana Kerja Jangka Pendek

Implementasi rencana kerja jangka pendek dilaksanakan dengan waktu kurang dari 6 bulan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana Tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1. Implementasi Rencana Kerja Jangka Pendek Pada Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha

Solusi Terbaik	Kegiatan	Stake holders yang terlibat
1. Pengembangan program	Pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	- KKP - Pemda
3. Keberadaan LKM	1. Meningkatkan akses permodalan kepada masyarakat pesisir.	- KKP - Pemda
	2. Menciptakan LKM yang mampu memberikan kemudahan-kemudahan akses perkreditan pada usaha berskala mikro kecil.	- KKP - Pemda

Implementasi rencana kerja jangka pendek tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan program PEMP.

Pengembangan program PEMP diarahkan kepada kegiatan sebagai berikut:

- a. Memperbesar skala usaha kegiatan masyarakat pesisir.
- b. Memperluas jaringan masyarakat pesisir untuk dapat mengakses permodalan pada unit usaha keuangan koperasi.
- c. Memperkuat lembaga yang sudah ada, sehingga dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mandiri. Perkembangan lembaga ekonomi tersebut adalah dengan menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan, baik konvensional maupun syariah yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan modal masyarakat pesisir.
- d. Mengembangkan kegiatan sosial pada masyarakat pesisir.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam mengembangkan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha, seperti pembangunan TPI, jalan, sekolah dan lain sebagainya.

- f. Memperbaiki lingkungan, baik lingkungan permukiman (kebersihan dan keindahan) maupun ekosistem yang ada di pesisir (penanaman hutan bakau, pembentukan *fish sanctuary*, dan *restocking*).

## 2. Keberadaan LKM

- a. Meningkatkan akses permodalan kepada masyarakat pesisir.

KKP dan Pemda sangat berperan dalam meningkatkan permodalan koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina khususnya Swamitra Mina Pantura Jaya dan Mitra Usaha yang saat ini sedang membutuhkan modal tambahan. Dengan modal yang memadai sehingga Swamitra Mina dapat memberikan pinjaman, khususnya kepada seluruh nasabah yang membutuhkannya dan kepada seluruh masyarakat pesisir pada umumnya. Oleh karena itu masyarakat hanya mengajukan pinjaman kepada koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina, dan tidak lagi meminjam kepada rentenir ataupun bank keliling.

- b. Menciptakan LKM yang mampu memberikan kemudahan-kemudahan akses perkreditan pada usaha berskala mikro kecil.

Peran KKP dan Pemda dalam menciptakan LKM adalah KKP dan Pemda diharapkan mempunyai program pemberian kredit kepada masyarakat pesisir yang mempunyai sifat kekeluargaan dan mampu memberikan kemudahan-kemudahan akses perkreditan pada usaha berskala mikro kecil. Persyaratan kredit yang mudah, tanpa jaminan dan pada saat dibutuhkan dapat segera dicairkan. Prosedur pengembaliannya dilakukan dengan mencicil harian sehingga tidak memberatkan nasabah. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memilih meminjam ke koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina daripada meminjam ke rentenir.

### 5.2.2. Implementasi Rencana Kerja Jangka Menengah

Implementasi rencana kerja jangka menengah dilaksanakan dengan waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.2. Implementasi Rencana Kerja Jangka Menengah

Solusi Terbaik	Kegiatan	Stake holders yang terlibat
1. Penyelesaian masalah kredit macet	3. Rescheduling, yaitu kegiatan penjadwalan kembali.	- Swamitra Mina - Bank Bukopin
	2. Reconditioning, yaitu kegiatan persyaratan kembali.	- Swamitra Mina - Bank Bukopin
	3. Restrukturing, yaitu kegiatan penataan kembali.	- Swamitra Mina - Bank Bukopin
2. Penyelesaian masalah rentenir	Pemberian kredit dengan bunga yang rendah.	- Bank Bukopin
3. Dukungan Pemda.	1. Pembinaan dan pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil, sistem usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan hasil perikanan.	- KKP - Pemda - Instansi terkait
	2. Penempatan Konsultan Manajemen (KM) dan Tenaga Pendamping Desa (TPD).	- Pemda
4. Pengembangan SDM kelautan dan perikanan	1. Pelatihan kelautan dan perikanan.	- KKP - Pemda
	2. Penyuluhan kelautan dan perikanan.	- KKP - Pemda
	3. Pendidikan kelautan dan perikanan.	- KKP - Pemda
5. Prasarana jalan rusak	Pembangunan infrastruktur	- Pemda - Instansi terkait

#### 1. Penyelesaian masalah kredit macet

Pada prakteknya, penyelesaian kredit bermasalah (kredit macet) atau *non-performing loan* (NPL) diawali dengan upaya-upaya dari Bank Bukopin dalam hal ini Swamitra Mina sebagai pihak kreditur dengan cara melakukan penagihan langsung kepada debitur yang bersangkutan secara intensif atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan

kepercayaannya. Selain itu ditempuh dengan cara atau strategi penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.

Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, yaitu melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

- a. Melalui ***rescheduling*** (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. Melalui ***reconditioning*** (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
- c. Melalui ***restructuring*** (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. penambahan fasilitas kredit; dan atau
- f. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Penanganan kredit bermasalah dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Fasilitas penanganan ini diberlakukan bagi debitur bermasalah yang disebabkan oleh kendala usaha namun memiliki itikad baik melunasi kewajibannya. Namun apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum, dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.

## 2. Penyelesaian masalah rentenir

Penyelesaian masalah rentenir dilaksanakan melalui kegiatan pemberian kredit dengan bunga yang rendah.

Bunga kredit yang diberikan Swamitra Mina selama ini adalah sebesar 2-2,5% perbulan atau 24-30% pertahun, kondisi ini sangat memberatkan para nasabah, terutama para nelayan yang tidak mempunyai alternatif pekerjaan pada saat cuaca buruk, mereka tidak mendapatkan penghasilan sehingga tidak bisa membayar cicilannya, yang mereka lakukan hanya tinggal dirumah atau duduk-duduk di warung yang kemudian berhutang di warung. Berdasarkan kondisi tersebut, LKM yang diharapkan masyarakat pesisir adalah LKM yang bermitra dengan Bank yang memberikan bunga yang rendah. Dengan pemberian bunga yang rendah tersebut diharapkan masyarakat lebih memilih

meminjam ke koperasi LEPP-M3 Swamitra Mina daripada meminjam ke rentenir.

### 3. Dukungan Pemda

Keberhasilan program PEMP di daerah sangat tergantung dari dukungan dan kontribusi pemerintah, baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Dukungan tersebut dapat berupa kebijakan, peraturan, dan perencanaan pembangunan yang sejalan dengan Program PEMP. Di samping itu diperlukan pula dana pembinaan dan pendampingan, baik untuk memperkuat Program PEMP pada tahun berjalan maupun sebagai tindak lanjut pengembangan Program PEMP pasca tahun anggaran berjalan yang dapat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana pembinaan dan pendampingan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap program ini.

Pembinaan yang merupakan tanggung jawab KKP dan Pemda diimplementasikan untuk jangka menengah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengembangan usaha penangkapan ikan serta pemberdayaan nelayan skala kecil.

Pembinaan teknis usaha penangkapan ikan dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Tangkap, KKP dan Subdin Perikanan, Peternakan dan Kelautan (P2K) Jakarta Utara ataupun Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan Kabupaten Bekasi. Pembinaan teknis yang dilakukan adalah pendampingan kepada para nelayan kecil agar dapat melakukan usaha penangkapannya sesuai dengan ketentuan, menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak merusak sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan tetap menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Pengembangan usaha penangkapan ikan yang dilaksanakan oleh KKP adalah melakukan pembangunan sarana dan prasarana perikanan yaitu pengembangan tempat pemasaran hasil perikanan seperti TPI, pasar ikan kering dan pasar ikan basah; serta pengembangan kapal dan alat tangkap ikan. Untuk kegiatan pemberdayaan nelayan kecil yang

merupakan program KKP adalah dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan terhadap usaha perikanan tangkap mencakup 2.000 Kelompok Usaha Bersama.

b. Pembinaan dan pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan.

Pembinaan teknis usaha pembudidayaan ikan dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budidaya, KKP dan Subdin Perikanan, Peternakan dan Kelautan (P2K) Jakarta Utara ataupun Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan Kabupaten Bekasi. Pembinaan teknis yang dilakukan adalah pendampingan kepada para pembudidaya ikan agar dapat melakukan usaha budidayanya sesuai dengan ketentuan, pemilihan kawasan budidaya sesuai dengan tataruangnya, pemilihan benih dan benur yang baik sehingga mengurangi kegagalan panen, penanganan hama dan penyakit ikan serta pemilihan sarana produksi ikan yang baik. Pengembangan usaha pembudidayaan ikan yang dilaksanakan oleh KKP adalah melakukan pembangunan sarana dan prasarana perikanan yaitu pengembangan kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan budidaya perikanan payau, kawasan budidaya perikanan tawar dan kawasan budidaya perikanan laut; serta memenuhi seluruh kebutuhan benih ikan yang mencapai sekitar 69,7 miliar ekor benih.

c. Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan.

Pembinaan teknis usaha pengolahan hasil perikanan dilaksanakan oleh Ditjen P2HP, KKP dan Subdin Perikanan, Peternakan dan Kelautan (P2K) Jakarta Utara ataupun Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan Kabupaten Bekasi. Pembinaan teknis yang dilakukan adalah pendampingan kepada para pengolah hasil perikanan agar dapat melakukan usahanya sesuai dengan ketentuan, pemilihan bahan baku ikan yang tidak mengandung formalin atau bahan berbahaya lainnya, teknis pengolahannya tidak menggunakan bahan tambahan terlarang yang dapat membahayakan kesehatan manusia, seperti formalin, boraks, dan lain sebagainya. Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan yang dilaksanakan oleh KKP adalah melakukan pembangunan sarana dan

prasarana perikanan yaitu pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan seperti pengembangan sistem rantai dingin (*cold chain system*), sentra pengolahan, klaster/minapolitan industri kecil hasil perikanan dan pasar ikan di 33 provinsi.

- d. Penempatan Konsultan Manajemen (KM) dan Tenaga Pendamping Desa (TPD).  
Penempatan Konsultan Manajemen (KM) dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Umum Pelaksanaan PEMP akan meningkatkan operasional pelaksanaan program PEMP di cilincing dan muara gembong. Konsultan Manajemen (KM) yang berfungsi sebagai konsultan secara teknis dan manajemen, sedangkan Tenaga Pendamping Desa (TPD) merupakan tenaga pendamping yang profesional di bidang kelautan dan perikanan. Dengan adanya KM dan TPD maka sosialisasi program, monitoring dan kontrol pelaksanaan program akan dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat peminjam menyadari dengan tertibnya mereka mengembalikan pinjaman maka mereka kelak akan membantu masyarakat lain yang ingin meminjam dana selanjutnya. Disisi lain KM dan TPD dapat membantu masyarakat memecahkan persoalan dalam menghadapi permasalahan usahanya.

#### 4. Pengembangan SDM kelautan dan perikanan

Pengembangan SDM di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dan dilaksanakan melalui pelatihan, penyuluhan dan pendidikan. Kegiatan ini merupakan tanggung jawab Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Subdin Kelautan dan Perikanan Jakarta Utara (Pemda). Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KKP, melalui pelatihan, penyuluhan dan pendidikan diharapkan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan dapat ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan produksinya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya, serta mendukung program PEMP.

Implementasi kegiatan pelatihan, penyuluhan dan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan bagi masyarakat ditujukan untuk nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, pedagang ikan dan masyarakat perikanan yang meliputi

teknik penangkapan ikan dan permesinan perikanan, pelatihan pengolahan dan mutu, serta pemasaran dan manajemen usaha. Misalnya pelatihan perawatan dan pengoperasian mesin pesawat bantu perikanan dan pelatihan perawatan dan pengoperasian alat bantu penangkapan ikan di BPPP Tegal.

- b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pelatihan baik teknis maupun manajerial memegang peranan penting terutama dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Kelautan Perikanan 2010-2014 yakni “Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015” serta Misi “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.
- c. Kegiatan penyuluhan diarahkan kepada pengembangan keahlian dan keberpihakan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan, serta meningkatkan citra penyuluh.
- d. Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan program KKP. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan. Kegiatan penyuluhan merupakan tanggung jawab KKP dan Subdin Kelautan dan Perikanan Jakarta Utara dan Subdin Kelautan dan Perikanan Bekasi.
- e. Penyuluh di bidang perikanan harus memiliki kemampuan, sebagai berikut:
  - 1) Mengelola kegiatan penyuluhan perikanan secara efektif dengan berbasis pada teknologi komunikasi.
  - 2) Menerapkan teknologi perikanan dalam bidang produksi dan pasca panen, sehingga mampu mengefisiensikan usaha perikanan.
  - 3) Menyusun dan melaksanakan program pengembangan usaha perikanan di suatu wilayah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- f. Satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di Jakarta, Akademi Perikanan Sidoarjo,

Akademi Perikanan Bitung, Akademi Perikanan Sorong dan 8 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) yang tersebar di wilayah nusantara. Lembaga pendidikan tersebut merupakan lembaga pendidikan kedinasan yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bertekad menjadi lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia. Pendidikan ditujukan kepada seluruh masyarakat pesisir yang masih dalam usia sekolah di seluruh Indonesia. Spesialisasi pendidikan adalah Jurusan Penangkapan Ikan, Mesin Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan, Teknik Aquakultur dan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Pendidikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat pesisir khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

#### 5. Prasarana jalan rusak

Prasarana jalan yang rusak disebabkan karena banjir dan ROB mengakibatkan kegiatan perekonomian masyarakat muara gembong terhambat. Diharapkan Pemda khususnya Subdin Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya dapat melakukan perbaikan infrastruktur tersebut. Infrastruktur yang baik akan memperlancar kegiatan usaha masyarakat pesisir muara gembong.

### 5.2.3. Implementasi Rencana Kerja Jangka Panjang

Implementasi rencana kerja jangka panjang dilaksanakan dengan waktu lebih dari 1 tahun melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.3. Implementasi Rencana Kerja Jangka Menengah

Solusi Terbaik	Kegiatan	Stake holders yang terlibat
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	1. Sosialisasi tentang pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya.	- KKP - Pemda
	2. Pembinaan tentang pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya.	- KKP - Pemda

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab KKP, Pemda dan instansi terkait lainnya yang diimplementasikan untuk jangka menengah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya.

Sosialisasi tentang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dengan kaidah kelestarian lingkungan. Sosialisasi ditujukan kepada seluruh masyarakat pesisir khususnya yang mempunyai mata pencaharian nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan pedagang ikan. Materi sosialisasi adalah:

- a. Pengelolaan sumber daya ikan (SDI) dan lingkungan hidup.
- b. Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis.
- c. Peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut.
- d. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

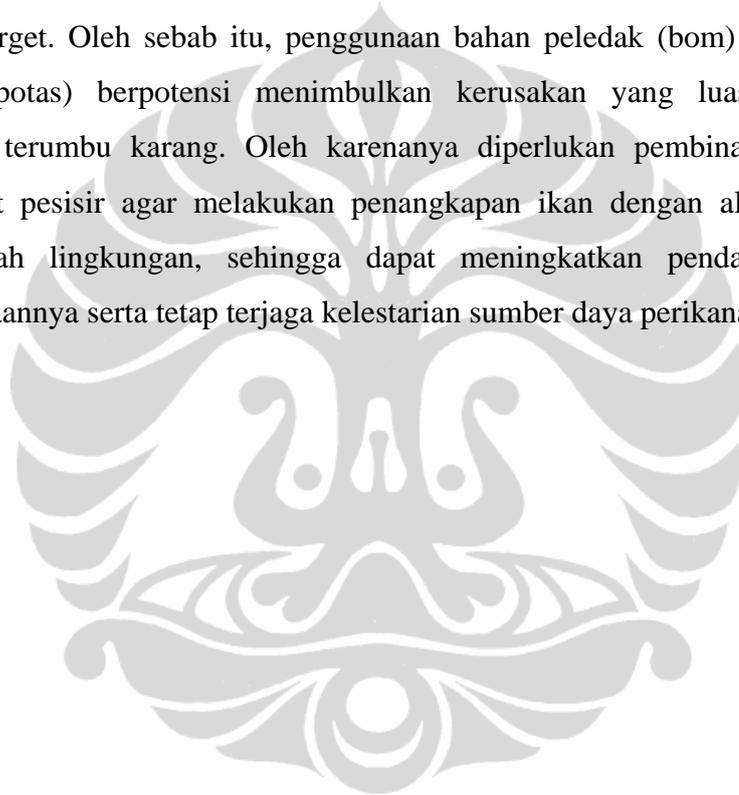
Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan. Faktor yang menyebabkan pola pengelolaan wilayah pesisir dan laut tidak berkelanjutan dan terpadu, di antaranya adalah masyarakat pesisir tidak terlibat secara aktif. Akibatnya, terjadi degradasi fisik dan pengurangan habitat serta keanekaragaman hayati pantai dan laut. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan program PEMP berjalan sesuai dengan tujuan.

2. Pembinaan tentang pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya.

Pembinaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dengan kaidah kelestarian lingkungan. Pembinaan ditujukan kepada seluruh masyarakat pesisir khususnya yang mempunyai mata pencaharian nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan pedagang ikan. Pembinaan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang

merusak lingkungan seperti penggunaan bahan peledak/bom, bahan beracun/potasium, alat tangkap trawl dan sebagainya.

Penggunaan bahan peledak dan racun dalam penangkapan ikan karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian organisme lain yang bukan merupakan target. Sementara praktek pembiusan dapat mematikan zooxanthella hewan penyusun karang sehingga karang menjadi berubah warna yang akhirnya mati serta ikan-ikan lainnya ikut mati yang tidak menjadi target. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak (bom) dan bahan beracun (potas) berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Oleh karenanya diperlukan pembinaan kepada masyarakat pesisir agar melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta tetap terjaga kelestarian sumber daya perikananannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Akhmadi *et. All.* (2006) *Verifikasi Ketepatan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM) dalam Penargetan Keluarga Miskin*. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.
- Balai Besar Riset Sosial ekonomi Kelautan dan Perikanan. (2005) *Indikator Kinerja Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan: Executive Summary*. BBRSEKP. Jakarta.
- Dahuri. (2001) *"Pemberdayaan Masyarakat Nelayan"*. Yogyakarta: Media Pressindo
- (2006) *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Dharmayuni. (2007) *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Outstanding Pinjaman pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Studi Kasus Swamitra Mina Pantura Jaya, Cilincing Jakarta Utara"*.
- Emerson. (1979) *Bagaimana Menaikkan Taraf Hidup Lapisan Masyarakat Termiskin di Desa Pantai?*, PPWP, Semarang.
- Fauzan. (2004) *"Keberadaan LKM Swamitra Mina di Kabupaten Lombok Timur"*. <http://www.slideshare.net/guns12380/laporan-hasil-penelitian-swamitra-mina-dan-nelayan> Kamis, 25 Maret 2010.
- Hanum. (2009) *"Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan, Studi Kasus Masyarakat Pesisir di Tanjung Gundap, Kecamatan Sagulung, Kota Batam"*.
- Hartono. (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*. Gramedia. Jakarta.
- Istianan, Hikmah dan Mursidin. (2008) *Optimalisasi Peran Gender dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan*. BRKP. DKP. Jakarta.
- Kusnadi. (2003) *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LkiS.
- \_\_\_\_\_. (2006) *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung. Humaniora.
- \_\_\_\_\_. (2009) *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta.

- Mubyarto, Loekman Sutrisno, Michael Dove. (1984) *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Panta*. Rajawali. Jakarta.
- Mursidi, Hikmah dan Zahri Nasution. (2008) *Pengelolaan Rumah Tangga Nelayan Ditinjau dari Persepsi Jender* (Studi Kasus di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang). J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vo.3 No.2, 2008. Jakarta.
- Nasution, Z. Sastrawidjaja, Hartono, T., Mursidin, Priyatna, F.N., Pranadji, T., Bayu Aji, G., Koeshendrajana, S., dan Suherman, M., (2004) *Kondisi Sosio Antropologi Masyarakat Nelayan*. Laporan Teknis Kegiatan Riset Tahun 2004. PRPPSEKP. BRKP. Jakarta. (Unpublished).
- Rangkuti. (2006) *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sajogyo. (1970) *Pemberdayaan Nelayan Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Di Kalangan Nelayan Indonesia*.
- Satria. (2008) *Negeri Bahari yang melupakan Nelayan*. Koran Kompas terbit senin 09/06/2008.
- Sutaat. (2005) *Persepsi Legislatif Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Daerah*. Penelitian dilaksanakan di tujuh propinsi, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.
- Suyanto. (1996) *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Syarief. (2009) *Pembangunan Kelautan Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. IPB.
- Todaro and Smitt. (2006) *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Erlangga. Jakarta.
- Tuhuteru. (2006) *LKM Swamitra Mina Ngurangi Kemiskinan*. Jawa Barat.
- Wahyono, dkk. (2001) *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Media Presindo, Yogyakarta.
- Wijaya. (2009) *Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan untuk Meningkatkan Keadaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Lekok*.

Yuska. (2005) *Pengaruh Kegiatan Perhutanan Sosial Terhadap Pelestarian Hutan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar: Studi Kasus Program Membangun Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) PT. Hutan Musi Persada Wilayah 1 Suban Jeriji di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.*

#### **Laporan/Majalah:**

Bappenas. (2003) *Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah.* Laporan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Jakarta.

DKP. (2006) *Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2005-2009.* Jakarta. Departemen Kelautan dan Perikanan.

----- (2007) *Majalah Demersal Kelautan dan Perikanan*, Edisi Juni 2007. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

#### **Webside:**

Maddusila. (2009) “*Analisis Kelembagaan Ekonomi yang Dibutuhkan Masyarakat Nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan*”. [http://www.kmbsulsel.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=135:balitbangda&catid=34:articles-category&Itemid=124](http://www.kmbsulsel.net/index.php?option=com_content&view=article&id=135:balitbangda&catid=34:articles-category&Itemid=124). Kamis, 25 Maret 2010.

Mardiana E.Fachry. dan Asni Azis. (2006) “*Analisis Penguatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Desa Tamalate dan Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan*”. <http://www.unhas.ac.id/lemlit/researches/view/265.html>. Kamis, 25 Maret 2010.

Nikijuluw, Victor P.H. (2001) *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Secara Terpadu.* Proyek pesisisir, Pusat Kajian

Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor (IPB). Hotel Permata, Bogor 29 Oktober 2001. 30 April 2009 10:37. [http://resources.unpad.ac.id/unpadcontent/uploads/publikasi\\_dosen/1B%20populasi%20masyarakat%20pesisir.pdf](http://resources.unpad.ac.id/unpadcontent/uploads/publikasi_dosen/1B%20populasi%20masyarakat%20pesisir.pdf).

<http://id.news.yahoo.com/antr/20100816/tbs-presiden-jumlah-penduduk-indonesia-2-251e945.html>. 16 Agustus 2010.

<http://kiara.or.id/content/view/677/71/> Jum'at, 5 Maret 2010.

<http://www.penalarn-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html> (1 Desember 2009)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>. Senin, 1 Maret 2010.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan_sosial). Senin 1 Maret 2010.

<http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/2005/Sutaat.htm>. Jum'at. 5 Maret 2010.

<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/1306>. Jum'at 5-3-10..  
**Wijaya. 2009.** Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan untuk Meningkatkan Keadaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Lekok.

<http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=16862>

Lampiran 1. Peta Lokasi Kecamatan Cilincing (Wikipedia, 2008)



## Lampiran 2. Daftar Nasabah Swamitra Mina Pantura Jaya, Cilincing Jakarta Utara .

No.	Nama	Alamat	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
1	Usman El Hamid	Kalibaru Barat II Rt. 09/10	Pedagang Ikan	10,000,000	3,178,844	24	01/08/2008	31/08/2010
2	Suta	Jl. Marunda Tiram Rt.007/002	Budidaya Ikan	2,550,000	2,550,000	6	03/04/2008	30/10/2008
3	Darip Bin Sarman	KP. Bogor 2 Rt.01/06	Pedagang Ikan	4,000,000	2,000,000	12	04/06/2008	30/06/2009
4	Sunaryo	Kalibaru Barat Rt.003/010	Pedagang Ikan	6,000,000	4,997,601	15	04/09/2008	30/12/2009
5	Asan Basri	Jl. Sungai Tiram Rt.07/02	Pedagang Ikan	10,000,000	4,837,198	18	05/12/2008	30/06/2010
6	Suratno	Sungai Tiram Rt.003/002	Pedagang Ikan	13,000,000	12,438,006	30	05/12/2008	30/06/2011
7	Rokmah	Sungai Tiram Rt.007/002	Pedagang Ikan	1,300,000	1,035,174	12	06/03/2008	30/03/2009
8	Kusnadi	Sungai Tiram Rt.003/002	Pedagang Ikan	6,200,000	6,200,000	12	14/03/2008	30/03/2009
9	Toipah	Jl. Bakti IX No. 8 B Rt.003/006	Pedagang Ikan	20,000,000	7,235,583	24	15/12/2008	31/12/2010
10	Nani	Jl. Kerang Hijau Rt.006/001	Pedagang Ikan	1,600,000	1,484,021	12	16/05/2008	31/05/2009
11	Selamat Widodo	Jl. Sungai Tiram Rt.006/002	Pedagang Ikan	1,150,000	718,275	5	16/05/2008	31/10/2008
12	Hanifudin	Kebantenan Rt.004/007	Pengolah Ikan	5,000,000	5,000,000	24	17/09/2008	30/09/2010
13	Raci	Jl. Kalibaru Barat Rt.007/05	Pedagang Ikan	10,000,000	3,178,844	24	18/07/2008	30/07/2010
14	Haeruddin	Jl. Kalibaru Timur IV D Rt.002/01	Pedagang Ikan	2,100,000	2,100,000	6	18/12/2008	30/06/2009
15	Suhadi Joko	Jl. Sungai Tiram Rt.003/002	Pedagang Ikan	6,000,000	6,000,000	6	18/12/2008	30/06/2009
16	Tariman	Jl. Kalibaru Rt.02/013	Pedagang Ikan	3,150,000	3,150,000	6	18/12/2008	30/06/2009
17	Desy Kurniawati	Jl. Nanas Raya No.98 Rt.006/001	Pedagang Ikan	3,000,000	3,000,000	12	20/10/2008	31/10/2009
18	Sunayah	Jl. Sungai Tiram Rt.11/02	Pedagang Ikan	5,000,000	5,000,000	18	22/04/2008	30/10/2009
19	Apan	Jl. Sungai Tiram Rt.005/02	Nelayan	1,440,000	1,210,000	12	22/10/2008	31/10/2009
20	Hyang Kala Saputra	Jl. Marunda Cilincing Rt.007/001	Budidaya Ikan	3,000,000	1,840,000	10	22/10/2008	31/08/2009
21	Aminah	Bakti Rt. 003/006	Nelayan	5,000,000	4,579,444	18	24/03/2008	30/09/2009
22	Daskem	Bakti Rt. 009/005	Nelayan	25,000,000	15,780,529	36	24/04/2008	30/04/2011
23	Abdul Gani	Bambu Kuning Rt. 012/002	Nelayan	10,000,000	5,511,007	24	26/11/2008	30/11/2010
24	Naamin	Bidara Rt. 005/001	Nelayan	8,000,000	2,179,277	18	26/11/2008	30/05/2010
25	Nurdin	Bidara Rt. 007/001	Nelayan	8,000,000	2,978,106	18	26/11/2008	30/05/2010
26	Yusuf	Cilincing Lama Rt. 008/004	Nelayan	7,000,000	583,337	12	26/11/2008	30/11/2009
27	Siti Komariah	Genteng Rt. 003/001	Pedagang Ikan	5,000,000	681,968	16	28/11/2008	30/03/2010
28	Darga	Gg. Usaha Rt.005/005	Pedagang Ikan	15,000,000	10,562,744	12	29/07/2008	30/07/2009

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
29	Warana Bin Mukhtar	H. Enjong Rt. 009/001	Pedagang Ikan	5,000,000	1,363,504	12	29/07/2008	31/07/2009
30	A. Suhaeli	Raya Marunda Rt. 007/008	Nelayan	20,000,000	17,540,000	6	29/08/2008	28/02/2009
31	H. Sudrajat	Rekreasi Rt. 003/004	Nelayan	68,250,000	68,250,000	12	29/08/2008	31/08/2009
32	Raswen	Rekreasi Rt. 003/004	Nelayan	30,000,000	3,315,850	24	30/04/2008	30/04/2010
33	Darmadi	Rekreasi Rt. 003/004	Nelayan	7,260,000	5,538,648	18	30/06/2008	31/12/2009
34	M Yusuf R	Sarang Bango Rt. 001/005	Nelayan	15,000,000	2,496,739	22	30/10/2008	31/08/2010
35	Abdul Latif	Sarang Bango Rt. 008/002	Pedagang Ikan	23,700,000	21,510,099	24	31/01/2008	31/01/2010
36	Subarji Hadi	Semangka Rt. 001.010	Pedagang Ikan	30,000,000	28,709,078	18	31/01/2008	31/07/2009
37	Edi Susanto	Kebantenan Rt.001/007	Nelayan	7,000,000	5,920,000	12	01/12/2009	31/12/2010
38	Siti Nafsiah	Kebantenan Rt.003/007	Nelayan	30,000,000	25,428,968	24	01/12/2009	31/12/2011
39	Sumiati	Kebantenan Rt.006/006	Nelayan	1,800,000	1,800,000	6	02/12/2009	30/06/2010
40	Subiyanto	Jl. Kerang Hijau Rt.006/001	Nelayan	5,000,000	2,499,998	12	03/06/2009	30/06/2010
41	Sawad	Jl. Kerang Hijau Rt.014/001	Nelayan	2,500,000	2,291,667	12	03/12/2009	31/12/2010
42	Jainuddin Rachman	Kesatria Rt.004/005	Nelayan	9,000,000	2,250,000	12	04/05/2009	31/05/2010
43	Anton Sujarwo	Kolonel Sutomo Rt.005/006	Nelayan	8,000,000	3,333,331	12	04/06/2009	30/06/2010
44	Fitriyani	Kosambi 2 Rt.014/003	Nelayan	1,000,000	300,000	10	04/06/2009	30/04/2010
45	Hafid	Kp. Bali Rt.002/002	Nelayan	4,000,000	1,600,000	10	04/08/2009	04/06/2010
46	Wiryem	Kp. Pisangan Rt.009/004	Nelayan	5,000,000	2,500,001	6	04/11/2009	31/05/2010
47	Bakir	Lagoa Terusan Rt.003/004	Nelayan	5,000,000	833,330	12	05/03/2009	31/03/2010
48	Wasiah	Lagoa Terusan Rt.006/003	Nelayan	3,000,000	250,000	12	05/03/2009	31/03/2010
49	Roedi	Lagoa Terusan Rt.007/002	Nelayan	5,000,000	3,333,332	12	05/08/2009	31/08/2010
50	Karta	Lagoa Terusan Rt.009/002	Nelayan	3,000,000	1,000,000	6	05/10/2009	30/04/2010
51	Farid Jatinendra	Lagoa Terusan Rt.009/004	Nelayan	2,000,000	1,499,999	12	06/03/2009	31/03/2010
52	Ratisa	Lagoa Terusan Rt.014/002	Nelayan	10,000,000	983,510	12	06/03/2009	31/03/2010
53	Arba	Lagoa Terusan Rt.016/002	Nelayan	4,000,000	1,000,003	12	06/04/2009	30/04/2010
54	Suherman	Lagoa Terusan Rt.016/007	Nelayan	50,000,000	36,988,165	24	06/05/2009	31/05/2010
55	Sartini	Lagoa Terusan Rt.017/007	Nelayan	20,000,000	15,438,486	18	06/08/2009	28/02/2011
56	Suratman	Lagoa Terusan Rt.017/007	Nelayan	15,000,000	14,106,601	24	06/08/2009	31/08/2011

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
57	Bibah	Mangga Rt.012/010	Pedagang Ikan	3,000,000	1,750,000	12	07/08/2009	31/08/2011
58	Sri Subekti	Marunda 4 Rt.006/006	Budidaya Ikan	2,000,000	1,499,999	12	07/10/2009	31/10/2010
59	Sumiati	Marunda Baru Rt.007/006	Budidaya Ikan	5,000,000	3,647,831	10	07/10/2009	30/08/2010
60	Wartam	Marunda Polo Rt.002/007	Budidaya Ikan	5,000,000	4,375,001	24	07/10/2009	31/10/2011
61	Darno	Marunda Rt.007/007	Budidaya Ikan	5,000,000	3,333,332	12	08/09/2009	30/09/2010
62	Tawang	Marunda Rt.007/007	Budidaya Ikan	2,000,000	1,600,000	10	08/10/2009	30/08/2010
63	Suwanto	Marunda Rt.013/003	Budidaya Ikan	3,000,000	250,000	12	09/02/2009	28/02/2010
64	Irsad	Marunda Tiram Rt.001/004	Budidaya Ikan	5,000,000	3,611,110	18	09/07/2009	31/01/2011
65	Rusli	Marunda Tiram Rt.004/006	Budidaya Ikan	5,000,000	2,000,000	10	09/07/2009	31/05/2010
66	Arif Saputra	Marunda Tiram Rt.009/006	Budidaya Ikan	10,000,000	9,292,038	12	09/12/2009	31/12/2010
67	Suryatih	Masjid Al-Alam Rt.005/004	Nelayan	4,000,000	1,000,003	12	10/03/2009	31/03/2010
68	Sukim	Menteng Terusan Rt.015/007	Nelayan	4,000,000	2,816,735	12	10/07/2009	31/07/2010
69	Casina	Pedongkelan Rt.001/009	Nelayan	4,000,000	1,500,000	8	10/08/2009	30/04/2010
70	Daram Bin Sudjai	Pedongkelan Rt.003/009	Nelayan	15,000,000	8,145,268	12	10/08/2009	31/08/2010
71	Dasuki	Rawa Malang Rt.008/010	Nelayan	3,700,000	3,700,000	6	10/11/2009	31/05/2010
72	Halimah	Raya Cilincing Rt.014/002	Nelayan	3,500,000	2,800,000	10	10/11/2009	30/09/2010
73	Sumarto	Raya Marunda Rt.007/008	Budidaya Ikan	8,000,000	5,700,000	6	10/11/2009	31/05/2010
74	M. Patmaja	Raya Marunda Rt.007/008	Budidaya Ikan	15,000,000	14,559,721	24	10/12/2009	31/12/2011
75	Wahyu Pahlevi	Raya Marunda Rt.007/008	Budidaya Ikan	5,000,000	3,514,105	24	11/03/2009	31/03/2011
76	Fatmawati	Rekreasi Rt. 003/004	Pedagang Ikan	5,000,000	3,190,032	18	11/11/2009	31/05/2011
77	Supandi	Rekreasi Rt. 003/004	Pedagang Ikan	7,000,000	4,676,529	12	11/11/2009	30/11/2010
78	Mulyatim	Rekreasi Rt. 003/004	Pedagang Ikan	35,000,000	34,437,572	36	13/07/2009	31/07/2012
79	Abd Hamid Marshud	Sarang Bango Rt.001/005	Pedagang Ikan	5,000,000	4,100,996	18	13/08/2009	28/02/2011
80	Asanah	Sarang Bango Rt.008/002	Pedagang Ikan	3,000,000	1,750,000	12	13/08/2009	31/08/2010
81	Maryani	Semangka Rt.001/010	Pedagang Ikan	5,000,000	2,916,665	12	13/08/2009	31/08/2010
82	Wargana	Sindangiang Rt.002/008	Pedagang Ikan	2,000,000	1,166,665	12	13/08/2009	31/08/2010
83	Kamin	Sungai Begog Rt.007/003	Pedagang Ikan	7,000,000	4,040,000	6	13/10/2009	30/04/2010
84	Rohaemi	Sungai Begog Rt.007/003	Pedagang Ikan	15,000,000	12,845,139	12	13/11/2009	30/11/2010
85	DRS Kurdi	Sungai Tiram Rt.001/004	Pedagang Ikan	20,000,000	12,513,458	24	14/01/2009	31/01/2011

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
86	Carsim	Sungai Tiram Rt.001/004	Pedagang Ikan	4,000,000	2,666,668	12	14/09/2009	30/09/2010
87	Sairah	Sungai Tiram Rt.001/004	Pedagang Ikan	500,000	3,000,000	10	14/09/2009	31/07/2010
88	Ramos	Sungai Tiram Rt.001/006	Pedagang Ikan	1,500,000	13,938,056	12	14/12/2009	31/12/2010
89	Adi Suriadi Zebua B.	Sungai Tiram Rt.001/006	Pedagang Ikan	20,000,000	13,427,714	24	15/01/2009	31/01/2011
90	Yahya	Sungai Tiram Rt.001/009	Nelayan	15,000,000	10,833,620	18	15/06/2009	31/12/2010
91	Ahmat Supryatno	Sungai Tiram Rt.002/002	Nelayan	2,000,000	417,240	6	15/09/2009	31/03/2010
92	Saepudin	Sungai Tiram Rt.002/004	Nelayan	25,000,000	17,604,570	12	15/09/2009	30/09/2010
93	Hendra	Sungai Tiram Rt.002/004	Nelayan	5,000,000	3,500,000	10	15/10/2009	31/08/2010
94	Djuhri	Sungai Tiram Rt.002/004	Nelayan	3,000,000	500,000	12	16/02/2009	28/02/2010
95	H. Olih Ansori	Sungai Tiram Rt.002/004	Nelayan	15,000,000	2,905,222	12	16/03/2009	31/03/2010
96	Sutiyah	Sungai Tiram Rt.002/009	Nelayan	3,000,000	500,000	12	16/03/2009	31/03/2010
97	Busro	Sungai Tiram Rt.003/002	Nelayan	7,000,000	4,992,934	15	16/07/2009	31/10/2010
98	H. Moh. Sukri	Sungai Tiram Rt.003/002	Nelayan	25,000,000	9,500,000	24	16/07/2009	31/07/2011
99	Tjarmita	Sungai Tiram Rt.003/002	Nelayan	35,000,000	28,368,777	24	16/07/2009	31/07/2011
100	Moch. Anwar	Sungai Tiram Rt.003/002	Nelayan	70,000,000	67,717,481	36	16/09/2009	30/09/2012
101	Nurjaman	Sungai Tiram Rt.003/004	Nelayan	5,000,000	1,380,326	8	16/09/2009	31/05/2010
102	Rochani BT Tarsim	Sungai Tiram Rt.003/004	Nelayan	10,000,000	7,041,832	12	16/09/2009	30/09/2010
103	Suherman	Sungai Tiram Rt.003/004	Nelayan	2,000,000	866,719	8	16/09/2009	31/05/2010
104	Agus Irianto	Sungai Tiram Rt.003/004	Nelayan	2,000,000	800,000	6	16/12/2009	30/06/2010
105	Drs. Budiyatno,M.Si	Kalibaru Barat Rt.004/007	Pedagang Ikan	20,000,000	20,000,000	36	16/12/2009	31/12/2012
106	Kardi	Kalibaru Barat Rt.004/008	Pedagang Ikan	8,000,000	1,653,983	12	16/12/2009	31/12/2010
107	Paijan	Kalibaru Barat Rt.004/008	Pedagang Ikan	5,000,000	1,710,000	10	16/12/2009	31/10/2010
108	Suherti	Kalibaru Barat Rt.004/008	Pedagang Ikan	4,000,000	2,760,000	25	16/12/2009	31/01/2012
109	Taupik	Kalibaru Barat Rt.004/008	Pedagang Ikan	15,000,000	4,319,745	7	16/12/2009	31/07/2010
110	Warsih	Kalibaru Barat Rt.005/004	Pedagang Ikan	5,000,000	3,740,000	7	16/12/2009	31/07/2010
111	Darwinah	Kalibaru Barat Rt.005/004	Pedagang Ikan	5,000,000	1,666,664	12	17/02/2009	28/02/2010
112	Nurawi	Kalibaru Barat Rt.005/004	Pedagang Ikan	13,000,000	10,279,754	30	17/03/2009	30/09/2011
113	Kosim Bin Radum	Kalibaru Barat Rt.005/004	Pedagang Ikan	10,000,000	7,577,337	20	17/07/2009	31/03/2011
114	Samikun	Kalibaru Barat Rt.005/005	Pedagang Ikan	8,000,000	5,777,932	18	17/07/2009	31/01/2011

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
115	Achmad Dahlan	Kalibaru Barat Rt.005/009	Pedagang Ikan	12,000,000	2,390,000	6	17/12/2009	30/06/2010
116	Agus	Kalibaru Barat Rt.005/009	Pedagang Ikan	3,700,000	3,160,000	6	17/12/2009	30/06/2010
117	Dasi	Kalibaru Barat Rt.005/009	Pedagang Ikan	40,000,000	18,950,000	6	17/12/2009	30/06/2010
118	Ikyani	Kalibaru Barat Rt.005/009	Pedagang Ikan	12,500,000	4,500,000	10	17/12/2009	31/10/2010
119	Neni Rusnaeni	Kalibaru Barat Rt.006/004	Pedagang Ikan	6,000,000	3,118,674	5	17/12/2009	31/05/2010
120	Rimah	Kalibaru Barat Rt.006/006	Pedagang Ikan	10,000,000	2,786,617	6	17/12/2009	30/06/2010
121	Rohmat	Kalibaru Barat Rt.006/0083	Pedagang Ikan	4,500,000	860,000	6	17/12/2009	30/06/2010
122	Siti Hamidah	Kalibaru Barat Rt.007/004	Pedagang Ikan	16,000,000	12,960,000	24	17/12/2009	31/12/2011
123	Suryani Asri	Kalibaru Barat Rt.007/009	Pedagang Ikan	15,000,000	9,660,000	24	17/12/2009	31/12/2011
124	Totong Priatna	Kalibaru Barat Rt.007/010	Pedagang Ikan	7,000,000	3,820,000	13	17/12/2009	31/01/2011
125	Lasono Joyo Puspita	Kalibaru Barat Rt.007/010	Pedagang Ikan	20,000,000	5,721,717	12	18/03/2009	31/03/2010
126	Rumiyati	Kalibaru Barat Rt.008/004	Pedagang Ikan	50,000,000	33,240,073	24	18/03/2009	31/03/2011
127	Watini	Kalibaru Barat Rt.008/006	Pedagang Ikan	2,000,000	1,333,332	12	19/08/2009	31/08/2010
128	Nawiyah	Kalibaru Barat Rt.008/006	Pedagang Ikan	8,000,000	5,309,456	24	19/10/2009	31/10/2011
129	Nurus Safari R.	Kalibaru Barat Rt.009/004	Pedagang Ikan	20,000,000	18,808,800	24	19/11/2009	30/11/2011
130	Setiawan	Kalibaru Barat Rt.010/015	Pedagang Ikan	4,000,000	400,000	10	20/03/2009	31/01/2010
131	Yaya Suharya	Kalibaru Barat Rt.012/004	Pedagang Ikan	5,000,000	1,249,997	12	20/04/2009	30/04/2010
132	Arsyid Abrahas	Kalibaru Barat Rt.012/004	Pedagang Ikan	10,000,000	7,397,633	24	20/05/2009	31/05/2011
133	Subandi	Kalibaru Barat Rt.012/004	Pedagang Ikan	5,000,000	2,083,331	12	20/05/2009	31/05/2011
134	Tuningsih	Kalibaru Barat Rt.012/004	Pedagang Ikan	20,000,000	14,795,265	24	20/05/2009	31/05/2011
135	Risan Bin Simun	Sindangiang Rt.002/008	Pedagang Ikan	10,000,000	4,200,000	6	20/08/2009	28/02/2010
136	Arfan Dadi	Sungai Begog Rt.007/003	Pedagang Ikan	4,000,000	2,726,164	10	20/11/2009	30/09/2010
137	Casinih	Sungai Begog Rt.007/003	Pedagang Ikan	8,000,000	6,666,666	12	20/11/2009	30/11/2010
138	Hermansyah	Sungai Tiram Rt.001/004	Pedagang Ikan	8,000,000	8,000,000	12	20/11/2009	30/11/2010
139	Andri Lazuardi	Sungai Tiram Rt.001/004	Pedagang Ikan	50,000,000	45,460,000	36	21/12/2009	31/12/2012
140	Casman	Sungai Tiram Rt.001/004	Pedagang Ikan	2,500,000	1,500,000	9	21/12/2009	30/09/2010
141	Dyah Ayu R.	Sungai Tiram Rt.001/006	Pedagang Ikan	50,000,000	45,000,000	24	21/12/2009	31/12/2011
142	Jaka M.	Sungai Tiram Rt.001/006	Pedagang Ikan	60,000,000	35,040,000	12	21/12/2009	31/12/2010
143	Tjan Wan Nio	Sungai Tiram Rt.001/009	Nelayan	25,000,000	20,600,000	6	21/12/2009	30/06/2010

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
144	Udin	Sungai Tiram Rt.002/002	Nelayan	46,000,000	46,000,000	6	21/12/2009	30/06/2010
145	Matum	Sungai Tiram Rt.002/004	Nelayan	5,000,000	1,666,664	12	22/05/2009	31/05/2010
146	Mustiyem	Sungai Tiram Rt.002/004	Nelayan	10,000,000	1,269,368	5	22/10/2009	31/03/2010
147	Rahmawati	Sungai Tiram Rt.002/004	Nelayan	6,300,000	6,300,000	6	22/10/2009	30/04/2010
148	Yuli Supriyatin	Sungai Tiram Rt.002/004	Nelayan	5,000,000	3,128,364	24	23/02/2009	28/02/2011
149	Tohari	Sungai Tiram Rt.002/009	Pedagang Ikan	3,000,000	750,000	12	23/04/2009	30/04/2010
150	Wiwik Kadimin	Sungai Tiram Rt.003/002	Pedagang Ikan	4,000,000	1,200,000	10	23/06/2009	30/04/2010
151	Aspah Supriadi	Sungai Tiram Rt.003/002	Pedagang Ikan	60,000,000	59,035,838	36	23/11/2009	30/11/2012
152	Andi Hakmawati	Sungai Tiram Rt.003/002	Pedagang Ikan	30,000,000	28,200,000	36	23/12/2009	31/12/2012
153	M. Firdaus	Sungai Tiram Rt.003/002	Pedagang Ikan	50,000,000	50,000,000	6	23/12/2009	30/06/2010
154	Roostanto Yudi E.	Sungai Tiram Rt.003/004	Pedagang Ikan	3,475,000	2,450,000	6	23/12/2009	30/06/2010
155	Sa'ari	Sungai Tiram Rt.003/004	Pedagang Ikan	25,000,000	19,500,000	24	23/12/2009	31/12/2011
156	Mukti	Sungai Tiram Rt.003/004	Pedagang Ikan	20,000,000	5,664,206	12	24/03/2009	31/03/2010
157	Sukimin	Sungai Tiram Rt.003/004	Pedagang Ikan	40,000,000	29,590,533	24	24/04/2009	30/04/2011
158	Fatkhur Rohman	Sungai Tiram Rt.003/009	Pedagang Ikan	25,000,000	20,263,412	24	24/07/2009	31/07/2011
159	Jubaedah	Sungai Tiram Rt.004/002	Pedagang Ikan	6,000,000	2,400,000	10	24/07/2009	31/05/2010
160	Uminah	Sungai Tiram Rt.004/002	Pedagang Ikan	20,000,000	10,860,353	12	24/07/2009	31/07/2010
161	Abdurohim	Sungai Tiram Rt.004/002	Pedagang Ikan	2,500,000	416,670	12	25/02/2009	28/02/2010
162	Kuswoyo	Sungai Tiram Rt.004/009	Pedagang Ikan	2,500,000	2,145,488	10	25/02/2009	31/12/2009
163	Lely Darwati	Sungai Tiram Rt.005/002	Pedagang Ikan	4,000,000	800,000	10	25/05/2009	31/03/2010
164	Sarin	Sungai Tiram Rt.006/002	Pedagang Ikan	10,000,000	4,747,037	24	25/06/2009	30/06/2011
165	Kalim Bin Ali	Sungai Tiram Rt.006/002	Pedagang Ikan	6,500,000	750,000	6	25/08/2009	28/02/2010
166	Rokmani	Sungai Tiram Rt.007/002	Pedagang Ikan	5,000,000	3,956,694	16	25/08/2009	31/12/2010
167	Adi Sultani	Sungai Tiram Rt.007/002	Pedagang Ikan	5,000,000	4,166,667	6	25/11/2009	31/05/2010
168	Asmaul Husna	Sungai Tiram Rt.007/002	Pedagang Ikan	5,000,000	3,441,262	18	25/11/2009	31/05/2010
169	Mardani	Sungai Tiram Rt.007/002	Pedagang Ikan	8,000,000	1,882,597	6	25/11/2009	31/05/2010
170	Muklas	Sungai Tiram Rt.007/002	Pedagang Ikan	5,000,000	4,166,666	12	25/11/2009	30/11/2010
171	Rokayah	Sungai Tiram Rt.007/006	Pedagang Ikan	3,000,000	1,740,000	6	25/11/2009	31/05/2010
172	Sanahati	Sungai Tiram Rt.008/002	Pedagang Ikan	1,500,000	462,150	5	25/11/2009	30/04/2010

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
173	Solichin	Sungai Tiram Rt.008/002	Pedagang Ikan	10,000,000	2,737,303	10	25/11/2009	30/09/2010
174	Wandi	Sungai Tiram Rt.008/002	Nelayan	2,000,000	990,000	6	25/11/2009	31/05/2010
175	Sabar	Sungai Tiram Rt.008/002	Nelayan	15,000,000	6,847,966	18	26/02/2009	31/08/2010
176	Pulung	Sungai Tiram Rt.008/002	Nelayan	10,000,000	8,105,365	24	26/06/2009	30/06/2011
177	M. Kanafiyah	Sungai Tiram Rt.008/002	Nelayan	4,000,000	2,333,335	12	26/08/2009	31/08/2010
178	Siti Sumaryah	Sungai Tiram Rt.009/002	Nelayan	5,000,000	3,333,332	12	26/08/2009	31/08/2010
179	Lustiati	Sungai Tiram Rt.010/002	Nelayan	5,000,000	4,702,200	24	26/10/2009	31/10/2011
180	Romeli	Sungai Tiram Rt.011/002	Nelayan	35,000,000	35,000,000	36	26/10/2009	31/10/2012
181	Sukkre	Marunda Tiram Rt.009/006	Nelayan	5,000,000	4,000,000	10	26/10/2009	31/08/2010
182	Tasiyah	Masjid Al-Alam Rt.005/004	Nelayan	7,000,000	5,994,399	12	26/10/2009	31/10/2010
183	Satiri	Menteng Terusan Rt.015/007	Nelayan	3,000,000	550,787	12	27/02/2009	28/02/2010
184	Ipah Hayati	Pedongkelan Rt.001/009	Nelayan	2,000,000	499,997	12	27/04/2009	30/04/2010
185	Syamsu Alam	Pedongkelan Rt.003/009	Nelayan	9,000,000	4,887,163	12	27/07/2009	31/07/2010
186	Jalal Yusuf	Rawa Malang Rt.008/010	Nelayan	4,000,000	388,881	5	28/01/2009	30/06/2009
187	M. Masduki BM.	Raya Cilincing Rt.014/002	Nelayan	15,000,000	4,248,160	12	28/04/2009	30/04/2010
188	Mista	Raya Marunda Rt.007/008	Nelayan	15,000,000	10,542,318	24	28/04/2009	30/04/2011
189	Kujer	Raya Marunda Rt.007/008	Nelayan	25,000,000	9,307,853	12	28/05/2009	31/05/2010
190	Yaya	Raya Marunda Rt.007/008	Nelayan	18,000,000	15,199,666	24	28/07/2009	31/07/2011
191	Abdulali	Rekreasi Rt. 003/004	Nelayan	3,000,000	1,408,369	12	28/08/2009	31/08/2010
192	Bakri	Rekreasi Rt. 003/004	Nelayan	4,000,000	1,000,000	6	28/08/2009	28/02/2010
193	Imam Sairoji BT.	Rekreasi Rt. 003/004	Nelayan	25,000,000	19,533,905	12	28/08/2009	31/08/2010
194	Usman	Sarang Bango Rt.001/005	Nelayan	3,000,000	1,140,000	6	28/08/2009	28/02/2010
195	Budi Kusmanto	Sarang Bango Rt.008/002	Nelayan	2,000,000	1,400,000	10	28/10/2009	31/08/2010
196	Jasih Bin Asmat	Semangka Rt.001/010	Nelayan	5,000,000	1,345,613	14	29/01/2009	31/03/2010
197	Syamsoeddin AK	Kalibaru Barat Rt.004/008	Nelayan	50,000,000	46,857,735	36	29/04/2009	30/04/2012
198	Sugianto	Kalibaru Barat Rt.004/008	Nelayan	150,000,000	68,833,880	12	29/05/2009	31/05/2010
199	Suprihatin	Kalibaru Barat Rt.004/008	Nelayan	5,000,000	413,405	10	29/06/2009	30/04/2010
200	Ajuk Kuryanto	Kalibaru Barat Rt.005/004	Nelayan	7,000,000	6,231,615	15	26/11/2009	28/02/2011
201	Aris	Kalibaru Barat Rt.005/004	Nelayan	1,965,000	1,469,648	14	29/07/2009	30/09/2010

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
202	Pami	Kalibaru Barat Rt.005/004	Nelayan	8,000,000	2,552,068	12	29/07/2009	31/07/2010
203	Ratmi	Kalibaru Barat Rt.005/004	Nelayan	3,700,000	2,111,280	18	29/07/2009	31/01/2011
204	Sodikun	Kalibaru Barat Rt.005/005	Nelayan	3,600,000	848,010	12	29/07/2009	31/07/2010
205	Dedi Suherman	Kalibaru Barat Rt.005/009	Nelayan	5,000,000	3,333,332	12	29/09/2009	30/09/2010
206	Amirudin	Kalibaru Barat Rt.005/009	Nelayan	3,000,000	1,629,058	12	30/06/2009	30/06/2010
207	Arsih	Kalibaru Barat Rt.005/009	Nelayan	3,200,000	3,200,000	6	30/10/2009	30/04/2010
208	Nurhikmah	Kalibaru Barat Rt.005/009	Nelayan	50,000,000	33,700,000	24	30/10/2009	30/10/2011
209	Tambar	Kalibaru Barat Rt.006/004	Nelayan	3,730,000	2,916,600	18	30/10/2009	30/04/2011
210	Wasti	Kalibaru Barat Rt.006/006	Nelayan	8,000,000	2,000,000	5	30/10/2009	31/03/2010
211	Asmi BT Encim	Kalibaru Barat Rt.006/008	Nelayan	4,900,000	3,849,872	20	30/11/2009	31/07/2011
212	Idris	Kalibaru Barat Rt.007/004	Nelayan	5,000,000	4,070,000	6	30/11/2009	30/05/2010
213	Imas Sari Dewi	Kalibaru Barat Rt.007/009	Nelayan	10,000,000	7,778,605	36	30/11/2009	30/11/2012
214	Nuridin	Kalibaru Barat Rt.007/010	Nelayan	12,800,000	10,820,000	6	30/11/2009	30/05/2010
215	Rumiyati	Kalibaru Barat Rt.007/010	Nelayan	10,000,000	7,359,094	18	30/11/2009	30/05/2011
216	Yunengsih	Kalibaru Barat Rt.008/004	Nelayan	7,000,000	6,165,320	20	30/11/2009	31/07/2011
217	Hardjono	Kalibaru Barat Rt.008/006	Nelayan	20,000,000	13,000,000	6	31/03/2009	30/09/2009
218	Sawadi	Kalibaru Barat Rt.008/006	Nelayan	150,000,000	105,423,150	24	31/03/2009	31/03/2011
219	Sudjai	Kalibaru Barat Rt.009/004	Nelayan	30,000,000	5,745,229	12	31/03/2009	31/03/2010
220	A. Salam H.	Kalibaru Barat Rt.012/004	Nelayan	18,000,000	11,245,655	12	31/08/2009	31/08/2010
221	Taspan B. Karyan	Kalibaru Barat Rt.012/004	Nelayan	25,000,000	15,618,963	12	31/08/2009	31/08/2010
222	Wartono	Kalibaru Barat Rt.012/004	Nelayan	25,000,000	25,000,000	6	31/08/2009	28/02/2010

Lampiran 3. Daftar Nasabah Swamitra Mina Mitra Usaha Muara Gembong Jawa Barat .

No.	Nama	Alamat	Desa	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
1	A. Kusni Bin Sugandi	Muaragembong	Pantai Bakti	Budidaya	10,000,000	3,178,844	24	01/08/2008	31/08/2010
2	Amzah	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	10,000,000	4,837,198	18	05/12/2008	30/06/2010
3	A. Natawijaya	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	10,000,000	3,178,844	24	18/07/2008	30/07/2010
4	Abdul Hasyim	Muaragembong	Pantai Sederhana	Budidaya	15,000,000	2,496,739	22	30/10/2008	31/08/2010
5	Muslim	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	1,800,000	1,800,000	6	02/12/2009	30/06/2010
6	Ahmad Sukandi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	5,000,000	2,499,998	12	03/06/2009	30/06/2010
7	Karnata Bin Sumi	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	8,000,000	3,333,331	12	04/06/2009	30/06/2010
8	Ramlan	Muaragembong	Pantai Mekar	Penangkapan	4,000,000	1,600,000	10	04/08/2009	04/06/2010
9	Saripudin	Muaragembong	Pantai Mekar	Pengolahan	5,000,000	3,333,332	12	05/08/2009	31/08/2010
10	Abdul Rojak	Muaragembong	Pantai Mekar	Petambak	5,000,000	3,647,831	10	07/10/2009	30/08/2010
11	Tihari	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	2,000,000	1,600,000	10	08/10/2009	30/08/2010
12	Murtali	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	4,000,000	2,816,735	12	10/07/2009	31/07/2010
13	Sumi Bin Saanan	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	15,000,000	8,145,268	12	10/08/2009	31/08/2010
14	Salamah	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	3,000,000	1,750,000	12	13/08/2009	31/08/2010
15	Jaenul Asrorudin	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	5,000,000	2,916,665	12	13/08/2009	31/08/2010
16	Tari	Muaragembong	Pantai Bahagia	Petambak	2,000,000	1,166,665	12	13/08/2009	31/08/2010
17	Bonin	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	500,000	3,000,000	10	14/09/2009	31/07/2010
18	Khairil Anwar	Muaragembong	Pantai Sederhana	Budidaya	5,000,000	3,500,000	10	15/10/2009	31/08/2010
19	Castini	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	2,000,000	800,000	6	16/12/2009	30/06/2010
20	M Soleh HS	Muaragembong	Pantai Sederhana	Penangkapan	15,000,000	4,319,745	7	16/12/2009	31/07/2010
21	Aman	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	5,000,000	3,740,000	7	16/12/2009	31/07/2010
22	Sidik	Muaragembong	Pantai Bakti	Budidaya	12,000,000	2,390,000	6	17/12/2009	30/06/2010
23	Sarni Binti Parta	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	3,700,000	3,160,000	6	17/12/2009	30/06/2010
24	Haeroni Binti Marjuki	Muaragembong	Pantai Sederhana	Budidaya	40,000,000	18,950,000	6	17/12/2009	30/06/2010
25	Hatipah Binti Dagang	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	10,000,000	2,786,617	6	17/12/2009	30/06/2010
26	Gamung	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	4,500,000	860,000	6	17/12/2009	30/06/2010
27	Mulyadi Bin Boyong	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	2,000,000	1,333,332	12	19/08/2009	31/08/2010
28	Tandi	Muaragembong	Pantai Mekar	Penangkapan	25,000,000	20,600,000	6	21/12/2009	30/06/2010

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Desa	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
29	Nana Bin Salihun	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	46,000,000	46,000,000	6	21/12/2009	30/06/2010
30	Agus Salim	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	50,000,000	50,000,000	6	23/12/2009	30/06/2010
31	Ny. Ade	Muaragembong	Pantai Sederhana	Pedagang	3,475,000	2,450,000	6	23/12/2009	30/06/2010
32	Sakam	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	20,000,000	10,860,353	12	24/07/2009	31/07/2010
33	Agus	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	15,000,000	6,847,966	18	26/02/2009	31/08/2010
34	Kanta / Sa'an	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	4,000,000	2,333,335	12	26/08/2009	31/08/2010
35	Nurkat	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	5,000,000	3,333,332	12	26/08/2009	31/08/2010
36	Sanaji	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	5,000,000	4,000,000	10	26/10/2009	31/08/2010
37	Hj. Nurjanah	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	9,000,000	4,887,163	12	27/07/2009	31/07/2010
38	Jubed	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	3,000,000	1,408,369	12	28/08/2009	31/08/2010
39	Salam	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	25,000,000	19,533,905	12	28/08/2009	31/08/2010
40	Sunadi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Penangkapan	2,000,000	1,400,000	10	28/10/2009	31/08/2010
41	Ahmad Tasbin	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	8,000,000	2,552,068	12	29/07/2009	31/07/2010
42	Anton Bin Entong	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	3,600,000	848,010	12	29/07/2009	31/07/2010
43	Darsono	Muaragembong	Pantai Bahagia	Penangkapan	3,000,000	1,629,058	12	30/06/2009	30/06/2010
44	Bibit Binti Ayub	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	18,000,000	11,245,655	12	31/08/2009	31/08/2010
45	Asikin	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	25,000,000	15,618,963	12	31/08/2009	31/08/2010
46	Carmin	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	40,000,000	18,950,000	6	17/12/2009	30/06/2010
47	Mirta Wijaya	Muaragembong	Pantai Bahagia	Penangkapan	10,000,000	2,786,617	6	17/12/2009	30/06/2010
48	Khaidir	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	4,500,000	860,000	6	17/12/2009	30/06/2010
49	Tiharoh	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	2,000,000	1,333,332	12	19/08/2009	31/08/2010
50	Saifullah	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	25,000,000	20,600,000	6	21/12/2009	30/06/2010
51	Mulyadi	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	46,000,000	46,000,000	6	21/12/2009	30/06/2010
52	Satori Bin H. Salwi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	50,000,000	50,000,000	6	23/12/2009	30/06/2010
53	Maryadi	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	3,475,000	2,450,000	6	23/12/2009	30/06/2010
54	Inan	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	20,000,000	10,860,353	12	24/07/2009	31/07/2010
55	Marjuki Bin Kusen	Muaragembong	Pantai Harapan Jaya	Penangkapan	3,000,000	1,000,000	6	05/10/2009	30/04/2010
56	Ny. Lianah	Muaragembong	Pantai Sederhana	Budidaya	2,000,000	1,499,999	12	06/03/2009	31/03/2010
57	Tinosah	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	10,000,000	983,510	12	06/03/2009	31/03/2010

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Desa	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
58	Ribut Wahidi	Muaragembong	Pantai Sederhana	Budidaya	4,000,000	1,000,003	12	06/04/2009	30/04/2010
59	Denibo	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	50,000,000	36,988,165	24	06/05/2009	31/05/2010
60	Sanudin	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	5,000,000	2,000,000	10	09/07/2009	31/05/2010
61	Arjazi	Muaragembong	Pantai Sederhana	Penangkapan	4,000,000	1,000,003	12	10/03/2009	31/03/2010
62	Nawiyah	Muaragembong	Pantai Sederhana	Budidaya	4,000,000	1,500,000	8	10/08/2009	30/04/2010
63	Suwarno	Muaragembong	Pantai Sederhana	Budidaya	3,700,000	3,700,000	6	10/11/2009	31/05/2010
64	Manaf	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	8,000,000	5,700,000	6	10/11/2009	31/05/2010
65	Jaja Bin Seri	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	7,000,000	4,040,000	6	13/10/2009	30/04/2010
66	Mustajah	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	2,000,000	417,240	6	15/09/2009	31/03/2010
67	Israd	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	15,000,000	2,905,222	12	16/03/2009	31/03/2010
68	Jumadi Bin Salim	Muaragembong	Pantai Sederhana	Budidaya	3,000,000	500,000	12	16/03/2009	31/03/2010
69	Saanah	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	5,000,000	1,380,326	8	16/09/2009	31/05/2010
70	Majudin	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	2,000,000	866,719	8	16/09/2009	31/05/2010
71	Baning	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	6,000,000	3,118,674	5	17/12/2009	31/05/2010
72	Ahmad Mauludin	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	20,000,000	5,721,717	12	18/03/2009	31/03/2010
73	Nalih Maulah	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	5,000,000	1,249,997	12	20/04/2009	30/04/2010
74	H. Darnali	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	5,000,000	1,666,664	12	22/05/2009	31/05/2010
75	Catisan	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	10,000,000	1,269,368	5	22/10/2009	31/03/2010
76	Nia Daniati	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	6,300,000	6,300,000	6	22/10/2009	30/04/2010
77	Sangid Bin Darmin	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	3,000,000	750,000	12	23/04/2009	30/04/2010
78	Engkus Kusnadi	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	4,000,000	1,200,000	10	23/06/2009	30/04/2010
79	Acut	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	20,000,000	5,664,206	12	24/03/2009	31/03/2010
80	Jaya Bin Dalam	Muaragembong	Pantai Sederhana	Penangkapan	6,000,000	2,400,000	10	24/07/2009	31/05/2010
81	Kanang	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	4,000,000	800,000	10	25/05/2009	31/03/2010
82	Nursanah Bin Ali	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	5,000,000	4,166,667	6	25/11/2009	31/05/2010
83	Kaswi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	5,000,000	3,441,262	18	25/11/2009	31/05/2010
84	Zaenudin Bin H Sanali	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	8,000,000	1,882,597	6	25/11/2009	31/05/2010
85	Dakum	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	3,000,000	1,740,000	6	25/11/2009	31/05/2010
86	Napih Arifin	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	1,500,000	462,150	5	25/11/2009	30/04/2010

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Desa	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
87	Sutiman	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	2,000,000	990,000	6	25/11/2009	31/05/2010
88	Muslim	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	2,000,000	499,997	12	27/04/2009	30/04/2010
89	A Tajwini Bin H rafei	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	15,000,000	4,248,160	12	28/04/2009	30/04/2010
90	Misnan	Muaragembong	Pantai Bahagia	Penangkapan	25,000,000	9,307,853	12	28/05/2009	31/05/2010
91	Sahroni Bin Jaiman	Muaragembong	Pantai Bahagia	Penangkapan	5,000,000	1,345,613	14	29/01/2009	31/03/2010
92	Didit Imam Orabowo	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	150,000,000	68,833,880	12	29/05/2009	31/05/2010
93	Nani Sutani	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	5,000,000	413,405	10	29/06/2009	30/04/2010
94	Namit	Muaragembong	Pantai Sederhana	Penangkapan	3,200,000	3,200,000	6	30/10/2009	30/04/2010
95	Karim	Muaragembong	Pantai Bahagia	Penangkapan	8,000,000	2,000,000	5	30/10/2009	31/03/2010
96	Dadang	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	5,000,000	4,070,000	6	30/11/2009	30/05/2010
97	Randeg	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	12,800,000	10,820,000	6	30/11/2009	30/05/2010
98	Encih	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	30,000,000	5,745,229	12	31/03/2009	31/03/2010
99	Kasna	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	4,000,000	800,000	10	25/05/2009	31/03/2010
100	Saarih Bin Mner	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	5,000,000	4,166,667	6	25/11/2009	31/05/2010
101	Suharto	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	5,000,000	3,441,262	18	25/11/2009	31/05/2010
102	Kartam bin Rasban	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	8,000,000	1,882,597	6	25/11/2009	31/05/2010
103	Marjuki	Muaragembong	Pantai Mekar	Nelayan	3,000,000	1,740,000	6	25/11/2009	31/05/2010
104	Meni	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	1,500,000	462,150	5	25/11/2009	30/04/2010
105	Jawinah	Muaragembong	Pantai Bakti	Budidaya	2,000,000	990,000	6	25/11/2009	31/05/2010
106	Surya	Muaragembong	Pantai Harapan Jaya	Pedagang	2,000,000	499,997	12	27/04/2009	30/04/2010
107	Asmui	Muaragembong	Pantai Harapan Jaya	Jasa Transf	15,000,000	4,248,160	12	28/04/2009	30/04/2010
108	Surya	Muaragembong	Pantai Sederhana	Penangkapan	25,000,000	9,307,853	12	28/05/2009	31/05/2010
109	Jaman Bin Sailan	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	5,000,000	1,345,613	14	29/01/2009	31/03/2010
110	Jaelani	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	150,000,000	68,833,880	12	29/05/2009	31/05/2010
111	Jaenam	Muaragembong	Pantai Sederhana	Budidaya	5,000,000	413,405	10	29/06/2009	30/04/2010
112	Arman	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	3,200,000	3,200,000	6	30/10/2009	30/04/2010
113	Rusdi	Muaragembong	Pantai Bakti	Jasa Transf	8,000,000	2,000,000	5	30/10/2009	31/03/2010
114	Juriah	Muaragembong	Pantai Sederhana	Pedagang	15,000,000	10,562,744	12	29/07/2008	30/07/2009

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Desa	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
115	M Nur Bin H Karim	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	5,000,000	1,363,504	12	29/07/2008	31/07/2009
116	Edi Kusnaedi	Muaragembong	Pantai Bahagai	Pedagang	20,000,000	17,540,000	6	29/08/2008	28/02/2009
117	Danil Masaro	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	68,250,000	68,250,000	12	29/08/2008	31/08/2009
118	Supendi	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	7,260,000	5,538,648	18	30/06/2008	31/12/2009
119	Muhamad Naseh	Muaragembong	Pantai Bahagia	Penangkapan	23,700,000	21,510,099	24	31/01/2008	31/01/2010
120	Jaut	Muaragembong	Pantai Bahagia	Penangkapan	30,000,000	28,709,078	18	31/01/2008	31/07/2009
121	Ita Bin Nairam	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	3,000,000	250,000	12	09/02/2009	28/02/2010
122	Sarim	Muaragembong	Pantai Sederhana	Budidaya	3,000,000	500,000	12	16/02/2009	28/02/2010
123	Tong Ali	Muaragembong	Pantai Sederhana	Penangkapan	5,000,000	1,666,664	12	17/02/2009	28/02/2010
124	Wiri Bin Kuduk	Muaragembong	Pantai Mekar	Penangkapan	4,000,000	400,000	10	20/03/2009	31/01/2010
125	Babon	Muaragembong	Pantai Bahagai	Budidaya	10,000,000	4,200,000	6	20/08/2009	28/02/2010
126	Asa	Muaragembong	Pantai Sederhana	Pedagang	2,500,000	416,670	12	25/02/2009	28/02/2010
127	Okin	Muaragembong	Pantai Sederhana	Penangkapan	2,500,000	2,145,488	10	25/02/2009	31/12/2009
128	Ripan	Muaragembong	Pantai Mekar	Penangkapan	6,500,000	750,000	6	25/08/2009	28/02/2010
129	tanah Garapan	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	3,000,000	550,787	12	27/02/2009	28/02/2010
130	Dewi Nana Herlina	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	4,000,000	388,881	5	28/01/2009	30/06/2009
131	Syakiran	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	4,000,000	1,000,000	6	28/08/2009	28/02/2010
132	Nurzaman	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	3,000,000	1,140,000	6	28/08/2009	28/02/2010
133	Dani Bin Usman	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	20,000,000	13,000,000	6	31/03/2009	30/09/2009
134	Syamsudin	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	25,000,000	25,000,000	6	31/08/2009	28/02/2010
135	Rawijan	Muaragembong	Pantai Bahagia	Penangkapan	2,550,000	2,550,000	6	03/04/2008	30/10/2008
136	Asim	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	4,000,000	2,000,000	12	04/06/2008	30/06/2009
137	Atikah	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	6,000,000	4,997,601	15	04/09/2008	30/12/2009
138	Mustafarudin	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	1,300,000	1,035,174	12	06/03/2008	30/03/2009
139	Surono	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	6,200,000	6,200,000	12	14/03/2008	30/03/2009
140	Antonik	Muaragembong	Pantai Sederhana	Penangkapan	1,600,000	1,484,021	12	16/05/2008	31/05/2009
141	Saniman	Muaragembong	Pantai Sederhana	Penangkapan	1,150,000	718,275	5	16/05/2008	31/10/2008
142	Sopiyah	Muaragembong	Pantai Mekar	Penangkapan	2,100,000	2,100,000	6	18/12/2008	30/06/2009
143	Murni	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	6,000,000	6,000,000	6	18/12/2008	30/06/2009

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Desa	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
144	Rohani	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	3,150,000	3,150,000	6	18/12/2008	30/06/2009
145	Askanda	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	3,000,000	3,000,000	12	20/10/2008	31/10/2009
146	Sa'amin	Muaragembong	Pantai Sederhana	Budidaya	5,000,000	5,000,000	18	22/04/2008	30/10/2009
147	Koin	Muaragembong	Pantai Mekar	Penangkapan	1,440,000	1,210,000	12	22/10/2008	31/10/2009
148	Neman	Muaragembong	Pantai Sederhana	Penangkapan	3,000,000	1,840,000	10	22/10/2008	31/08/2009
149	Ratmo	Muaragembong	Pantai Sederhana	Penangkapan	7,000,000	583,337	12	26/11/2008	30/11/2009
150	Dalih bin Naong	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	15,000,000	10,562,744	12	29/07/2008	30/07/2009
151	Wati	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	5,000,000	1,363,504	12	29/07/2008	31/07/2009
152	Maman Suryaman	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	20,000,000	17,540,000	6	29/08/2008	28/02/2009
153	Naileh Bin Maisin	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	68,250,000	68,250,000	12	29/08/2008	31/08/2009
154	Superi	Muaragembong	Pantai Sederhana	Pedagang	7,260,000	5,538,648	18	30/06/2008	31/12/2009
155	Nahar Hermawan	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	23,700,000	21,510,099	24	31/01/2008	31/01/2010
156	Manan	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	30,000,000	28,709,078	18	31/01/2008	31/07/2009
157	Anah	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	3,000,000	250,000	12	09/02/2009	28/02/2010
158	Durahman	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	3,000,000	500,000	12	16/02/2009	28/02/2010
159	Miftachudin TB	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	5,000,000	1,666,664	12	17/02/2009	28/02/2010
160	Marudin	Muaragembong	Pantai Mekar	Penangkapan	4,000,000	400,000	10	20/03/2009	31/01/2010
161	Mirin	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	10,000,000	4,200,000	6	20/08/2009	28/02/2010
162	Munah	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	2,500,000	416,670	12	25/02/2009	28/02/2010
163	Munan	Muaragembong	Pantai Harapan Jaya	Jasa Bengkel	2,500,000	2,145,488	10	25/02/2009	31/12/2009
164	Olim	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	6,500,000	750,000	6	25/08/2009	28/02/2010
165	Soeparno	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	3,000,000	550,787	12	27/02/2009	28/02/2010
166	Burhani	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	4,000,000	388,881	5	28/01/2009	30/06/2009
167	Simah	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	4,000,000	1,000,000	6	28/08/2009	28/02/2010
168	Aji	Muaragembong	Pantai Bahagia	Jasa Bengkel	3,000,000	1,140,000	6	28/08/2009	28/02/2010
169	Sawen	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	20,000,000	13,000,000	6	31/03/2009	30/09/2009
170	Taryudi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	25,000,000	25,000,000	6	31/08/2009	28/02/2010
171	H.M.Asas sasmita	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	15,000,000	10,562,744	12	29/07/2008	30/07/2009
172	Endang L Bin Ayim	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	5,000,000	1,363,504	12	29/07/2008	31/07/2009

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Desa	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
173	Musa	Muaragembong	Pantai Harapan Jaya	Petambak	20,000,000	17,540,000	6	29/08/2008	28/02/2009
174	Waryana	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	68,250,000	68,250,000	12	29/08/2008	31/08/2009
175	Ujang Hermawan	Muaragembong	Pantai Mekar	Jasa Bengkel	7,260,000	5,538,648	18	30/06/2008	31/12/2009
176	Abdurahman	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	23,700,000	21,510,099	24	31/01/2008	31/01/2010
177	Kusnadi Bin H sarkawi	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	4,000,000	2,000,000	12	04/06/2008	30/06/2009
178	Nurjaya	Muaragembong	Pantai Bahagia	Petambak	6,000,000	4,997,601	15	04/09/2008	30/12/2009
179	Denson Tambunan	Muaragembong	Pantai Sederhana	Pedagang	1,300,000	1,035,174	12	06/03/2008	30/03/2009
180	Sumirah	Muaragembong	Pantai Sederhana	Pedagang	6,200,000	6,200,000	12	14/03/2008	30/03/2009
181	M.Usman	Muaragembong	Pantai Sederhana	Pedagang	1,600,000	1,484,021	12	16/05/2008	31/05/2009
182	Saripudin	Muaragembong	Pantai Sederhana	Petambak	1,150,000	718,275	5	16/05/2008	31/10/2008
183	Asman	Muaragembong	Pantai Mekar	Nelayan	2,100,000	2,100,000	6	18/12/2008	30/06/2009
184	Maemunah binti Asmuni	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	6,000,000	6,000,000	6	18/12/2008	30/06/2009
185	Saepudin	Muaragembong	Pantai Sederhana	Nelayan	3,150,000	3,150,000	6	18/12/2008	30/06/2009
186	Supardi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Petambak	3,000,000	3,000,000	12	20/10/2008	31/10/2009
187	Rahmat	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	5,000,000	5,000,000	18	22/04/2008	30/10/2009
188	Rasim	Muaragembong	Pantai Bahagia	Nelayan	1,440,000	1,210,000	12	22/10/2008	31/10/2009
189	Rahmat	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	3,000,000	1,840,000	10	22/10/2008	31/08/2009
190	Tinah	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	7,000,000	583,337	12	26/11/2008	30/11/2009
191	Sainan	Muaragembong	Pantai Bahagia	Petambak	15,000,000	10,562,744	12	29/07/2008	30/07/2009
192	Samani	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	5,000,000	1,363,504	12	29/07/2008	31/07/2009
193	Romeli	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	20,000,000	17,540,000	6	29/08/2008	28/02/2009
194	Ujang	Muaragembong	Pantai Harapan Jaya	Bengkel	68,250,000	68,250,000	12	29/08/2008	31/08/2009
195	Asep	Muaragembong	Pantai Mekar	Nelayan	7,260,000	5,538,648	18	30/06/2008	31/12/2009
196	Nisin	Muaragembong	Pantai Harapan Jaya	Bengkel	23,700,000	21,510,099	24	31/01/2008	31/01/2010
197	Acim Bin Jalim	Muaragembong	Pantai Bahagia	Nelayan	30,000,000	28,709,078	18	31/01/2008	31/07/2009
198	Ni'ih	Muaragembong	Pantai Bahagia	Nelayan	3,000,000	250,000	12	09/02/2009	28/02/2010
199	Amin Nudin	Muaragembong	Pantai Bahagia	Nelayan	3,000,000	500,000	12	16/02/2009	28/02/2010

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Desa	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
200	Mirat	Muaragembong	Pantai Harapan Jaya	Bengkel	5,000,000	1,666,664	12	17/02/2009	28/02/2010
201	Slamet	Muaragembong	Pantai Sederhana	Pedagang	4,000,000	400,000	10	20/03/2009	31/01/2010
202	Abdul Rohim	Muaragembong	Pantai Bahagia	Penangkapan	10,000,000	4,200,000	6	20/08/2009	28/02/2010
203	Idup	Muaragembong	Pantai Bahagia	Petambak	2,500,000	416,670	12	25/02/2009	28/02/2010
204	Jenal	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	2,500,000	2,145,488	10	25/02/2009	31/12/2009
205	Keneng	Muaragembong	Pantai Sederhana	Petambak	6,500,000	750,000	6	25/08/2009	28/02/2010
206	M.Uci Maryadi	Muaragembong	Pantai Sederhana	Petambak	3,000,000	550,787	12	27/02/2009	28/02/2010
207	H.Sahari	Muaragembong	Pantai Bahagia	Petambak	4,000,000	388,881	5	28/01/2009	30/06/2009
208	Tijol	Muaragembong	Pantai Sederhana	Pedagang	4,000,000	1,000,000	6	28/08/2009	28/02/2010
209	A.Sujai	Muaragembong	Pantai Bahagia	Petambak	3,000,000	1,140,000	6	28/08/2009	28/02/2010
210	Tarsun	Muaragembong	Pantai Bahagai	Nelayan	20,000,000	13,000,000	6	31/03/2009	30/09/2009
211	Maali	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	25,000,000	25,000,000	6	31/08/2009	28/02/2010
212	Saleh	Muaragembong	Pantai Bahagia	Nelayan	2,550,000	2,550,000	6	03/04/2008	30/10/2008
213	Saidah	Muaragembong	Pantai Bahaggia	Petambak	4,000,000	2,000,000	12	04/06/2008	30/06/2009
214	Yono	Muaragembong	Pantai Mekar	Petambak	6,000,000	4,997,601	15	04/09/2008	30/12/2009
215	Badeng Setiawan	Muaragembong	Pantai Mekar	Petambak	1,300,000	1,035,174	12	06/03/2008	30/03/2009
216	Norsan	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	6,200,000	6,200,000	12	14/03/2008	30/03/2009
217	Musahar Bin wasmin	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	1,600,000	1,484,021	12	16/05/2008	31/05/2009
218	Entong S	Muaragembong	Pantai Mekar	Petambak	1,150,000	718,275	5	16/05/2008	31/10/2008
219	Sarpan	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	2,100,000	2,100,000	6	18/12/2008	30/06/2009
220	Djamal Ludin	Muaragembong	Pantai Mekar	Jasa Transf	6,000,000	6,000,000	6	18/12/2008	30/06/2009
221	Juhaeirah	Muaragembong	Pantai Mekar	Petambak	3,150,000	3,150,000	6	18/12/2008	30/06/2009
222	Sobari	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	3,000,000	3,000,000	12	20/10/2008	31/10/2009
223	Mamat S	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	5,000,000	5,000,000	18	22/04/2008	30/10/2009
224	Sumardi Asnan	Muaragembong	Pantai Sederhana	Pedagang	1,440,000	1,210,000	12	22/10/2008	31/10/2009
225	Ruslani	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	3,000,000	1,840,000	10	22/10/2008	31/08/2009
226	Nawawi Bin Riman	Muaragembong	Pantaia Bahagia	Petambak	7,000,000	583,337	12	26/11/2008	30/11/2009
227	M.Soleh	Muaragembong	Pantai Bahagia	Nelayan	15,000,000	10,562,744	12	29/07/2008	30/07/2009
228	Saili Bin Rohadi	Muaragembong	Pantai Bahaia	Nelayan	5,000,000	1,363,504	12	29/07/2008	31/07/2009

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Desa	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
229	Musidin	Muaragembong	Pantai Bahagia	Petambak	20,000,000	17,540,000	6	29/08/2008	28/02/2009
230	Masito	Muaragembong	Pantai Sederhana	Petambak	68,250,000	68,250,000	12	29/08/2008	31/08/2009
231	H.Rafei	Muaragembong	Pantai Mekar	Nelayan	7,260,000	5,538,648	18	30/06/2008	31/12/2009
232	Enzen	Muaragembong	Pantai Sederhana	Nelayan	23,700,000	21,510,099	24	31/01/2008	31/01/2010
233	Suwarman	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	30,000,000	28,709,078	18	31/01/2008	31/07/2009
234	M.Bahri	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	3,000,000	250,000	12	09/02/2009	28/02/2010
235	Soleh	Muaragembong	Pantai Sederhana	Pedagang	3,000,000	500,000	12	16/02/2009	28/02/2010
236	Nudin	Muaragembong	Pantai Mekar	Bengkel	5,000,000	1,666,664	12	17/02/2009	28/02/2010
237	Maryanih Binti Muksin	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	4,000,000	400,000	10	20/03/2009	31/01/2010
238	Engkad	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	10,000,000	4,200,000	6	20/08/2009	28/02/2010
239	Ajun	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	2,500,000	416,670	12	25/02/2009	28/02/2010
240	Sahroni	Muaragembong	Pantai Mekar	Nelayan	2,500,000	2,145,488	10	25/02/2009	31/12/2009
241	Keling	Muaragembong	Pantai Sederhana	Petambak	6,500,000	750,000	6	25/08/2009	28/02/2010
242	Zaenal Arifin	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	3,000,000	550,787	12	27/02/2009	28/02/2010
243	Nuraenah	Muaragembong	Pantai Sederhana	Petambak	4,000,000	388,881	5	28/01/2009	30/06/2009
244	Mursidi Bin Amo	Muaragembong	Pantai Bahagia	Nelayan	4,000,000	1,000,000	6	28/08/2009	28/02/2010
245	Muhidin	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	3,000,000	1,140,000	6	28/08/2009	28/02/2010
246	Tiwi	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	20,000,000	13,000,000	6	31/03/2009	30/09/2009
247	Tarim	Muaragembong	Pantai Bahagia	Nelayan	25,000,000	25,000,000	6	31/08/2009	28/02/2010
248	Ato Dasa	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	2,550,000	2,550,000	6	03/04/2008	30/10/2008
249	Hj.Sarkiyah	Muaragembong	Pantai Bahagia	Petambak	4,000,000	2,000,000	12	04/06/2008	30/06/2009
250	Aam Aminah	Muaragembong	Pantai Sederhana	Pedagang	6,000,000	4,997,601	15	04/09/2008	30/12/2009
251	Karto	Muaragembong	Pantai Bahagai	Nelayan	1,300,000	1,035,174	12	06/03/2008	30/03/2009
252	Sulaeman	Muaragembong	Pantai Sederhana	Pedagang	6,200,000	6,200,000	12	14/03/2008	30/03/2009
253	Minan	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	1,600,000	1,484,021	12	16/05/2008	31/05/2009
254	Moch Nuhrasjidin S	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	1,150,000	718,275	5	16/05/2008	31/10/2008
255	Cardi Bin Durakim	Muaragembong	Pantai Sederhana	Nelayan	2,100,000	2,100,000	6	18/12/2008	30/06/2009
256	Tano Sutrisno	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	6,000,000	6,000,000	6	18/12/2008	30/06/2009
257	Alis Marni	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	3,150,000	3,150,000	6	18/12/2008	30/06/2009

(Lanjutan)

No.	Nama	Alamat	Desa	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Outstanding	Jangka waktu (bulan)	Tanggal Cair	Jatuh Tempo
258	Rakman	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	3,000,000	3,000,000	12	20/10/2008	31/10/2009
259	Nana Bin Salihun	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	5,000,000	5,000,000	18	22/04/2008	30/10/2009
260	Kanta	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	1,440,000	1,210,000	12	22/10/2008	31/10/2009
261	Ahmad Gumawan Bin Riman	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	3,000,000	1,840,000	10	22/10/2008	31/08/2009
262	Tabrani	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	7,000,000	583,337	12	26/11/2008	30/11/2009
263	Jaja Bin Seri	Muaragembong	pantai Bahagia	Budidaya	15,000,000	10,562,744	12	29/07/2008	30/07/2009
264	Saidin Bin Astari	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	5,000,000	1,363,504	12	29/07/2008	31/07/2009
265	Nimam Susanto	Muaragembong	Pantai Bakti	Pedagang	20,000,000	17,540,000	6	29/08/2008	28/02/2009
266	Magfuroh	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	68,250,000	68,250,000	12	29/08/2008	31/08/2009
267	Hasim Ali	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	7,260,000	5,538,648	18	30/06/2008	31/12/2009
268	Atmah Binti Muis	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	23,700,000	21,510,099	24	31/01/2008	31/01/2010
269	Andi Suhendi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	30,000,000	28,709,078	18	31/01/2008	31/07/2009
270	Hj Natijah	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	3,000,000	250,000	12	09/02/2009	28/02/2010
271	Sadan	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	3,000,000	500,000	12	16/02/2009	28/02/2010
272	Castinih	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	5,000,000	1,666,664	12	17/02/2009	28/02/2010
273	Salamah	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	4,000,000	400,000	10	20/03/2009	31/01/2010
274	Manaf	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	10,000,000	4,200,000	6	20/08/2009	28/02/2010
275	Basir	Muaragembong	Pantai Bakti	Budidaya	2,500,000	416,670	12	25/02/2009	28/02/2010
276	Nuryanah	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	2,500,000	2,145,488	10	25/02/2009	31/12/2009
277	Amzah	Muaragembong	Pantai Mekar	Pedagang	6,500,000	750,000	6	25/08/2009	28/02/2010
278	Ali	Muaragembong	Jaya Sakti	Pedagang	3,000,000	550,787	12	27/02/2009	28/02/2010
279	Sunadi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Penangkapan	4,000,000	388,881	5	28/01/2009	30/06/2009
280	Darsono	Muaragembong	Pantai Bahagia	Penangkapan	4,000,000	1,000,000	6	28/08/2009	28/02/2010
281	Denibo	Muaragembong	Pantai Bahagia	Pedagang	3,000,000	1,140,000	6	28/08/2009	28/02/2010
282	Satori Bin H. Salwi	Muaragembong	Pantai Bahagia	Budidaya	20,000,000	13,000,000	6	31/03/2009	30/09/2009
283	Agus	Muaragembong	Pantai Mekar	Budidaya	25,000,000	25,000,000	6	31/08/2009	28/02/2010

Lampiran 4. Pohon Masalah

